

**EVALUASI PROGRAM BANGUN PRAJA: STUDI KASUS
KOTA SEMARANG JAWA TENGAH**



Bernanda Kurniawan

NI M L4K002005

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU LINGKUNGAN

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2004

TESIS
EVALUASI PROGRAM BANGUN PRAJA: STUDI KASUS
KOTA SEMARANG JAWA TENGAH

Disusun oleh

Bernanda Kurniawan

NIM L4K002005

Telah dipertahankan di depan Tim penguji
Pada tanggal 20 Agustus 2004
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui

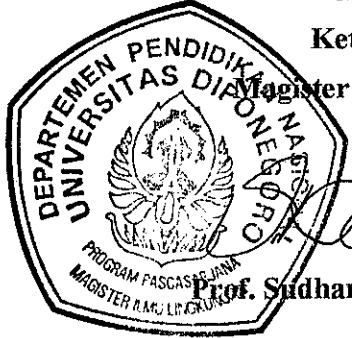

Pembimbing I


Prof. Sudharto P Hadi, MES. PhD

Pembimbing II


Ir. Wahyu Krisna Hidajat, MT

Mengetahui
Ketua Program
Magister Ilmu Lingkungan



Prof. Sudharto P Hadi, MES. PhD

UPT-PUSTAK-UNDIP	
No. Daft:	3552/T/MP/01
Tgl.	4/3 05

LEMBAR PENGESAHAN

**EVALUASI PROGRAM BANGUN PRAJA : STUDI KASUS KOTA
SEMARANG JAWA TENGAH**

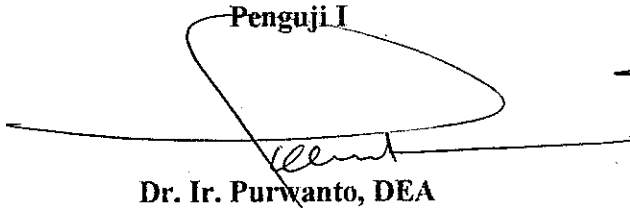
Disusun Oleh :

Bernanda Kurniawan
NIM L4K002005

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 20 Agustus 2004
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui

Penguji I



Dr. Ir. Purwanto, DEA

Penguji II



Dr. Tonny Bachtiar, MSc

Pembimbing I



Prof. Sudharto P. Hadi, MES, PhD

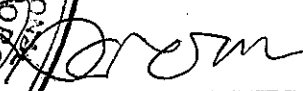
Pembimbing II



Ir. Wahyu Krisna Hidajat, MT

Mengetahui
Ketua Program
Magister Ilmu Lingkungan




Prof. Sudharto P. Hadi, MES, PhD

Abstrak

Eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan kegiatan pembangunan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan telah menimbulkan permasalahan seperti timbulnya bencana banjir dan tanah longsor. Kemerosotan kualitas lingkungan sebagai konsekwensi kegiatan pembangunan membutuhkan suatu pengelolaan yang baik dan efektif dalam suatu kerangka pembangunan berkelanjutan. Menurut WCED (1998), pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Berkaitan dengan hal itu program Bangun Praja merupakan salah satu program untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik di bidang lingkungan.

Penelitian studi kasus ini menganalisis perencanaan dan pelaksanaan program Bangun Praja yang dilaksanakan mulai tahun 2002 di Kota Semarang. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan kuisisioner dan wawancara terhadap responden yang telah ditetapkan sebagai sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Analisis perencanaan dilakukan terhadap penyusunan perencanaan program Bangun Praja yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

Implementasi program Bangun Praja pada tahun 2002 di Semarang menunjukkan bahwa perencanaan Program Bangun Praja masih memerlukan penyempurnaan dalam hal mekanisme dan tatalaksana pelaksanaan program. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa penyusunan perencanaan program Bangun Praja dapat dikategorikan pada teori perencanaan sinoptik komprehensif yang menempatkan perencana sebagai birokrat teknis. Kelemahan dari perencanaan program Bangun Praja ini adalah pada tatanan operasional di lapangan dengan terjadinya distorsi dalam penentuan pelaksanaan program. Penyusunan perencanaan program yang cenderung rasional ilmiah, terstandarisasi, tidak fleksibel, dengan lingkup yang luas dan tersentralisasi menyebabkan mekanisme pelaksanaan di lapangan menjadi tidak efektif.

Rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan implementasi program Bangun Praja tahun pertama ini adalah perlu dilakukan penyesuaian perencanaan dan pelaksanaan program dengan lebih mengedepankan pembelajaran sosial untuk mencapai suatu kesadaran kolektif pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan dengan keterlibatan seluruh *stakeholders*. Perencanaan program Bangun Praja direkomendasikan mengadopsi teori perencanaan transaktif yang menempatkan perencana sebagai fasilitator dan mediator pendidik. Keterlibatan *stakeholders* dalam identifikasi masalah, perumusan tujuan, penilaian situasi, inventarisasi alternatif kebijakan, penentuan pilihan kebijakan, kajian dampak dan pengambilan keputusan mutlak diperlukan. Di samping itu perlu dilakukan peningkatan peran legislatif dalam pengawasan pembangunan yang dilakukan oleh eksekutif.

Kata kunci : Program Bangun Praja, tata praja, lingkungan

Abstract

Excessive natural resources exploitation and development activities that neglect environmental carrying capacity have caused various environmental problems. Degradation of environmental quality as a consequence of development activities needs effective and sound management in the framework of sustainable development. According to OECD (1998), sustainable development is the development that aimed at meeting the needs of the present generation without neglecting the needs of the future generation to meet their needs. Related to this concept, *Bangun Praja* is a program aimed at creating good environmental governance.

This case study research analysed *Bangun Praja* Program plan and its implementation since its first inception in 2002 in Semarang. Data was taken using questionnaires and interview to respondents that were chosen using purposive sampling technique. Plan analyzes was done to *Bangun Praja* Program plan formulation written by the Ministry of Environment.

Analysis on the implementation of this program in Semarang shows that improvement should be made to its plan, in terms of its mechanism and execution procedures. Based on the research result it is also known that *Bangun Praja* Program plan could be categorized into comprehensive synoptic plan theory that plays planner as a technician bureaucrat. The weakness of this program was that there was distortion in the planning of field implementation. The program planning tends to be scientific rational, standardized, inflexible, wide scope and decentralized, causing ineffective mechanism of field implementation.

Therefore it is recommended that there should be adjustment in the planning and implementation of *Bangun Praja* program, by stressing more on social learning to create collective consciousness on sustainable development by involving all stakeholders. Besides, transactive planning theory that plays planner as a facilitator and educational mediator should be adopted. The importance of stakeholders involvement in problem identification, objective arrangement, situation judgement, inventory of policy alternatives, policy decision and decision-making is paramount. Moreover, there should also be enhancement in the monitoring role by the legislative on development activities done by the executive.

Keywords: *Bangun Praja* program, governance, environment.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT dimana atas Berkat Rahmat dan KaruniaNya penulisan Tesis penelitian ini dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Tesis ini diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam penyelesaian studi pada Program Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro. Adapun judul Tesis ini adalah: **“EVALUASI PROGRAM BANGUN PRAJA: STUDI KASUS KOTA SEMARANG JAWA TENGAH”**. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSc sebagai Rektor Universitas Diponegoro atas segala kesempatan dan kemudahan yang diberikan sehingga penelitian ini dapat terlaksana.
2. Bapak Prof. Sudharto P. Hadi, MES., PhD sebagai Ketua Program Magister Ilmu Lingkungan sekaligus sebagai pembimbing I dalam pelaksanaan penyusunan Tesis ini yang telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga penulisan Tesis ini dapat terlaksana.
3. Bapak Ir. Wahyu Krisna Hidajat, MT sebagai pembimbing II atas segala bimbingan dan masukan bagi penyempurnaan penyusunan Tesis ini.
4. Bapak Ir Agus Hadiyanto, MT sebagai sekretaris Magister Ilmu Lingkungan atas segala kemudahan yang diberikan dalam pelaksanaan penulisan Tesis ini.
5. Bapak Dr. Ir. Toni Bachtiar, MSc sebagai penguji I dalam ujian Tesis yang telah memberikan masukan dalam penyempurnaan Tesis ini.
6. Bapak Dr. Ir. Purwanto, DEA., sebagai penguji II dalam ujian Tesis atas segala masukan dan saran bagi perbaikan Tesis ini.
7. Teman-teman satu angkatan dan semua pihak yang banyak memberikan bantuan dalam pelaksanaan penulisan Tesis ini.

Penulis menyadari masih banyak sekali kekurangan dan kelemahan dalam penulisan Tesis ini, karena keterbatasan yang ada pada penulis sendiri diantaranya keterbatasan kemampuan dan pemahaman yang dimiliki penulis. Penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran-saran untuk perbaikan dan penyempurnaan Tesis ini.

Semarang, 15 September 2004

Penulis

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Muko-Muko Propinsi Bengkulu pada tanggal 8 Oktober 1970, yang merupakan putra ke lima dari sembilan bersaudara dari pasangan Yoebahar Ayoeb dan Komariah. Pendidikan yang telah ditempuh penulis tahun 1974-1976 Taman Kanak-Kanak di Muko-Muko, tahun 1977-1983 pada Sekolah Dasar Negeri 2 Kepahiang, tahun 1983-1986 pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bengkulu, tahun 1986-1989 pada Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bengkulu, tahun 1990-1997 pada Fakultas Pertanian jurusan Budidaya Pertanian Universitas Negeri Bengkulu, tahun 2002-2004 pada Program Pasca Sarjana Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro Semarang Jawa Tengah.

Beberapa organisasi pernah ditekuni penulis baik di kampus selama menjalani pendidikan di Universitas Negeri Bengkulu maupun diluar kampus. Pengalaman kerja yang pernah dijalani penulis antara lain : Koordinator Pemasaran PT. SAN FARM Bengkulu pada Maret-juli 1997, Asisten Manager Pada Perkebunan PT. Lonsum Tbk Muara Rupit Sumatera Selatan pada Agustus 1997- Februari 1998, Fasilitator Konservasi Desa pada proyek *Integrated Conservation and Devolepment Project Kerinci Seblat National Park (ICDPKSNP) WWF ID 0094* pada Maret 1999- Maret 2002, Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat sekitar waduk Tempuran Kabupaten Blora dan waduk Banyukuwung Kabupaten Blora Jawa Tengah. Anggota tim evaluasi pelaksanaan program Bangun Praja tahap pertama di empat Kota di Jawa Tengah yang terdiri dari Kota Semarang, Surakarta, Kebumen, dan Purbalingga yang merupakan kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup dan Program Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro Semarang. Pelatihan yang pernah diikuti penulis : pelatihan bagi Fasilitator Konservasi Desa pada proyek *ICDP-KSNP* yang diselenggarakan oleh *WWF ID 0094* di Sungai Penuh Jambi, pelatihan penyegaran Fasilitator Konservasi Desa pada proyek *ICDP-KSNP* yang diselenggarakan oleh *WWF ID 0094* di Padang Sumatera Barat, dan pelatihan pelestarian satwa liar di Pulau Sempu Malang Jawa Timur yang diselenggarakan oleh ProFauna Indonesia. Disamping itu penulis juga aktif mengikuti diskusi dan seminar di Bengkulu dan Semarang tentang pemberdayaan masyarakat dan lingkungan hidup.

HACAMAN PERSEMBAHAN

*Jika adalah yang harus kau lakukan
Ialah menyampaikan kebenaran*

*Jika adalah yang tidak bisa diperjualbelikan
Ialah yang bernama keyakinan*

*Jika adalah yang harus kau tumbangkan
Ialah menumbangkan segenap paham kezaliman*

*Jika adalah orang yang harus kau agungkan
Ialah hanya Rasul Tuhan*

*Jika adalah kesempatan memilih mati
Ialah syahid di jalan Illahi*

(“Nasihat l orang tua pada anaknya yang berangkat dewasa” karya Taufik Ismail)

Ku persembahkan Tesis Ini pada :

*Alm. Papa Yoebahar Ayoeb, Mama Komariah, Papa Eddy
Hendrarno, Mama Sukartinah, Istriku Tercinta Vivien
Maharany Hanum, Anak Ku Tersayang Assyfa Kurnia Rohima
yang telah memberikan segalanya dalam hidupku ini. Serta
Semua saudara dan keponakanku tersayang atas segala
dukungan yang telah diberikan.*

DAFTAR ISI

TESIS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
Abstrak	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Landasan Teori dan Pengkajian Teoritis	7
2.1.1. Perkembangan Perkotaan	8
2.1.2. Pengertian Program Bangun Praja	10
2.1.3. Prinsip-prinsip Perencanaan	11
2.2. Pembahasan Penelitian Terdahulu yang Relevan	12
2.3. Keaslian Penelitian	14
2.4. Hipotesis	14
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	15
3.1. Rancangan Penelitian dan Perspektif Pendekatan Penelitian	16
3.2. Ruang Lingkup dan Fokus Penelitian	17
3.2.1. Ruang lingkup penelitian	17
3.2.2. Fokus penelitian	17
3.3. Lokasi penelitian	18
3.4. Variabel Penelitian dan Fenomena yang diamati	18
3.4.1. Klasifikasi variabel	18
3.4.2. Definisi konseptual variabel	18
3.4.3. Definisi operasional variabel	19
3.5. Jenis dan Sumber Data	19
3.6. Instrumen Penelitian	20
3.7. Populasi dan teknik pengambilan sampel	20
3.8. Teknik Pengumpulan Data	20
3.9. Teknik Analisis Data	21
3.10. Alur Penelitian	22
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	23
4.1. Rona lingkungan daerah penelitian	23
4.2. Hasil penelitian	24
4.2.1. Ekspos Kementerian Lingkungan Hidup dan Tim evaluasi program Bangun Praja	25
4.2.1.1. Ekspos Kementerian Lingkungan Hidup	25
4.2.1.2. Hasil Ekspos tim evaluasi program Bangun Praja tahun pertama	28
4.2.2. Penerimaan, pemahaman, keterlibatan, dan tindak lanjut di lapangan dari penggalan kuesioner pada jajaran pemerintah Kota Semarang terhadap pelaksanaan Program Bangun Praja	32

4.2.3. Penerimaan, pemahaman, keterlibatan, dan tindak lanjut di lapangan jajaran dari hasil kuisioner pada masing-masing Dinas/Instansi	36
4.2.3.1. Tingkat penerimaan, pemahaman, keterlibatan, dan tindakan lapangan yang dilakukan Bapedalda Kota dalam pelaksanaan program Bangun Praja.....	36
4.2.3.2. Tingkat penerimaan, pemahaman, keterlibatan, dan tindakan lapangan yang dilakukan Bappeda Kota dalam pelaksanaan program Bangun Praja.....	37
4.2.3.3. Tingkat penerimaan, pemahaman, keterlibatan, dan tindakan lapangan yang dilakukan Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota dalam pelaksanaan program Bangun Praja	38
4.2.3.4. Tingkat penerimaan, pemahaman, keterlibatan, dan tindakan lapangan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Kota dalam pelaksanaan program Bangun Praja.....	39
4.2.3.5. Tingkat penerimaan, pemahaman, keterlibatan, dan tindakan lapangan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota dalam pelaksanaan program Bangun Praja.....	39
4.2.3.6. Tingkat penerimaan, pemahaman, keterlibatan, dan tindakan lapangan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota dalam pelaksanaan program Bangun Praja.....	40
4.2.3.7. Tingkat penerimaan, pemahaman, keterlibatan, dan tindakan lapangan yang dilakukan Dinas Pasar Kota dalam pelaksanaan program Bangun Praja.....	41
4.2.3.8. Tingkat penerimaan, pemahaman, keterlibatan, dan tindakan lapangan yang dilakukan Dinas Kebersihan Kota dalam pelaksanaan program Bangun Praja.....	42
4.2.3.9. Tingkat penerimaan, pemahaman, keterlibatan, dan tindakan lapangan yang dilakukan Dinas Pariwisata Kota dalam pelaksanaan program Bangun Praja.....	42
4.2.3.10. Tingkat penerimaan, pemahaman, keterlibatan, dan tindakan lapangan yang dilakukan Kantor Infokom Kota dalam pelaksanaan program Bangun Praja.....	43
4.2.3. Kondisi pelaksanaan program Bangun Praja pada jajaran Pemerintah Kota Semarang	44
4.2.3.1. Penerimaan (<i>acceptability</i>) masing-masing Dinas/Instansi dari penggalan wawancara jajaran Pemerintah Kota Semarang terhadap program Bangun Praja.....	44
4.2.3.1.1. Penerimaan (<i>acceptability</i>) Bapedalda Kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang.....	44
4.2.3.1.2. Penerimaan (<i>acceptability</i>) Bappeda Kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang	45
4.2.3.1.3. Penerimaan (<i>acceptability</i>) Dinas Pertamanan dan Pemakaman Bapedalda Kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang.....	46
4.2.3.1.4. Penerimaan (<i>acceptability</i>) Dinas Pekerjaan Umum Kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang	46
4.2.3.1.5. Penerimaan (<i>acceptability</i>) Dinas Perhubungan Kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang.....	47
4.2.3.1.6. Penerimaan (<i>acceptability</i>) Dinas Kesehatan Kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang.....	47

4.2.3.1.7. Penerimaan (acceptability) Dinas Pasar Kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang.....	47
4.2.3.1.8. Penerimaan (acceptability) Dinas Kebersihan Kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang.....	48
4.2.3.1.9. Penerimaan (acceptability) Dinas Pariwisata Kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang.....	48
4.2.3.1.10. Penerimaan (acceptability) Kantor Infokom Kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang.....	48
4.2.3.2. Pemahaman (<i>understanding</i>) masing-masing Dinas/Instansi dari penggalian wawancara jajaran Pemerintah Kota Semarang terhadap program Bangun Praja.....	49
4.2.3.2.1. Pemahaman (<i>understanding</i>) Bapedalda Kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang.....	49
4.2.3.2.2. Pemahaman (<i>understanding</i>) Bappedda Kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang.....	49
4.2.3.2.3. Pemahaman (<i>understanding</i>) Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang.....	49
4.2.3.2.4. Pemahaman (<i>understanding</i>) Dinas Pekerjaan Umum Kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang	50
4.2.3.2.5. Pemahaman (<i>understanding</i>) Dinas Perhubungan Kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang.....	50
4.2.3.2.6. Pemahaman (<i>understanding</i>) Dinas Kesehatan Kota Kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang	51
4.2.3.2.7. Pemahaman (<i>understanding</i>) Dinas Pasar Kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang.....	51
4.2.3.2.8. Pemahaman (<i>understanding</i>) Dinas Kebersihan Kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang.....	52
4.2.3.2.9. Pemahaman (<i>understanding</i>) Dinas Pariwisata Kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang.....	52
4.2.3.2.10. Pemahaman (<i>understanding</i>) Kantor Infokom Kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang.....	52
4.2.3.3. Keterlibatan (<i>involvement</i>) masing-masing Dinas/Instansi dari penggalian wawancara jajaran Pemerintah Kota Semarang terhadap program Bangun Praja.....	53
4.2.3.3.1. Keterlibatan (<i>involvement</i>) Bapedalda Kota dalam pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang	53
4.2.3.3.2. Keterlibatan (<i>involvement</i>) Bappedda Kota dalam pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang	53
4.2.3.3.3. Keterlibatan (<i>involvement</i>) Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota dalam pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang.....	54
4.2.3.3.4. Keterlibatan (<i>involvement</i>) Dinas Pekerjaan Umum Kota dalam pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang.....	54
4.2.3.3.5. Keterlibatan (<i>involvement</i>) Dinas Perhubungan Kota dalam pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang.....	55
4.2.3.3.6. Keterlibatan (<i>involvement</i>) Dinas Kesehatan Kota dalam pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang.....	55
4.2.3.3.7. Keterlibatan (<i>involvement</i>) Dinas Pasar Kota dalam pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang.....	56
4.2.3.3.8. Keterlibatan (<i>involvement</i>) Dinas Kebersihan Kota dalam pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang.....	56

4.2.3.3.9. Keterlibatan (involvement) Dinas Pariwisata Kota dalam pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang.....	57
4.2.3.3.10. Keterlibatan (involvement) Kantor Infokom Kota dalam pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang.....	57
4.2.3.4. Tindakan di Lapangan (<i>action</i>) masing-masing Dinas/Instansi dari penggalan wawancara jajaran Pemerintah Kota Semarang terhadap program Bangun Praja.....	57
4.2.3.4.1. Tindak Lanjut kegiatan di lapangan (<i>action</i>) oleh Bapedalda Kota sehubungan dengan pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang.....	57
4.2.3.4.2. Tindak Lanjut kegiatan di lapangan (<i>action</i>) oleh Bappeda Kota sehubungan dengan pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang	61
4.2.3.4.3. Tindak Lanjut kegiatan di lapangan (<i>action</i>) oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota sehubungan dengan pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang.....	61
4.2.3.4.4. Tindak Lanjut kegiatan di lapangan (<i>action</i>) oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota sehubungan dengan pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang.....	61
4.2.3.4.5. Tindak Lanjut kegiatan di lapangan (<i>action</i>) oleh Dinas Perhubungan Kota sehubungan dengan pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang.....	62
4.2.3.4.6. Tindak Lanjut kegiatan di lapangan (<i>action</i>) oleh Dinas Kesehatan Kota sehubungan dengan pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang.....	62
4.2.3.4.7. Tindak Lanjut kegiatan di lapangan (<i>action</i>) oleh Dinas Pasar Kota sehubungan dengan pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang.....	62
4.2.3.4.8. Tindak Lanjut kegiatan di lapangan (<i>action</i>) oleh Dinas Kebersihan Kota sehubungan dengan pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang.....	63
4.2.3.4.9. Tindak Lanjut kegiatan di lapangan (<i>action</i>) oleh Dinas Pariwisata Kota sehubungan dengan pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang.....	64
4.2.3.4.10. Tindak Lanjut kegiatan di lapangan (<i>action</i>) oleh Kantor Infokom Kota sehubungan dengan pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang.....	64
4.3. Analisis Hasil Penelitian.....	65
4.4. Pembahasan.....	66
4.4.1. Evaluasi terhadap penyusunan perencanaan perencanaan program Bangun Praja oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.....	67
4.4.2. Evaluasi terhadap pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang.....	71
4.4.3. Model penyempurnaan pelaksanaan program Bangun Praja.....	75
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	79
5.1. Kesimpulan.....	79
5.2. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN.....	83

DAFTAR TABEL

Table 1. Tabulasi skoring kuisioner.....	16
Table 2. Kondisi kependudukan di Kota Semarang	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Diagram alur penelitian.....	22
Gambar 2. Peta wilayah Kota Semarang.....	24
Gambar 3. Aspek legal pelaksanaan program Bangun Praja	25
Gambar 4. Skema pelaksanaan program Bangun Praja.....	26
Gambar 5. Agenda Nasional pelaksanaan program Bangun Praja	27
Gambar 6. Agenda Daerah pelaksanaan program Bangun Praja.....	27
Gambar 7. Mekanisme pemantauan program Bangun Praja.....	31
Gambar 8. Gambar frekwensi tingkat penerimaan jajarannya Pemerintah Kota Semarang terhadap pelaksanaan program Bangun Praja.....	32
Gambar 9. Grafik tingkat pemahaman jajarannya Pemerintah Kota Semarang terhadap pelaksanaan program Bangun Praja.....	33
Gambar 10. Grafik tingkat keterlibatan jajarannya Pemerintah Kota Semarang terhadap pelaksanaan program Bangun Praja	34
Gambar 11. Grafik frekwensi tingkat tindakan di lapangan jajarannya Pemerintah Kota Semarang terhadap pelaksanaan program Bangun Praja.....	35
Gambar 12. Lokasi pantau pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang	60
Gambar 0.13. Model penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan Program Bangun Praja.....	78

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuisisioner penelitian	83
Lampiran 2. Panduan wawancara bebas	88
Lampiran 3. Hasil analisis kuisisioner jajarannya Pemerintah kota Semarang terhadap pelaksanaan Program Bangun Praja	89
Lampiran 4. Hasil analisis frekwensi penerimaan, pemahaman, keterlibatan, dan tindakan di lapangan jajarannya Pemerintah Kota Semarang terhadap pelaksanaan program Bangun Praja	90
Lampiran 5. Hasil analisis kuisisioner pada masing-masing Dinas/Instansi dalam jajarannya Pemerintah Kota Semarang	91
Lampiran 6. Hasil analisis data kuisisioner Bapedalda Kota	91
Lampiran 7. Hasil analisis frekwensi penerimaan, pemahaman, keterlibatan, dan tindakan di lapangan Bapedalda Kota Semarang terhadap pelaksanaan program Bangun Praja	92
Lampiran 8. Hasil analisis data kuisisioner Bappeda	93
Lampiran 9. Hasil analisis frekwensi penerimaan, pemahaman, keterlibatan, dan tindakan di lapangan Bappeda Kota Semarang terhadap pelaksanaan program Bangun Praja	94
Lampiran 10. Hasil analisis data kuisisioner Dinas Pertamanan dan Permakaman Kota	95
Lampiran 11. Hasil analisis frekwensi penerimaan, pemahaman, keterlibatan, dan tindakan di lapangan Dinas Pertamanan dan permakaman Kota Semarang terhadap pelaksanaan program Bangun Praja	96
Lampiran 12. Hasil Analisis Data Kuisisioner Dinas Pekerjaan Umum Kota	97
Lampiran 13. Hasil analisis frekwensi penerimaan, pemahaman, keterlibatan, dan tindakan di lapangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang terhadap pelaksanaan program Bangun Praja	98
Lampiran 14. Hasil Analisis Data Kuisisioner Dinas Perhubungan Kota	99
Lampiran 15. Hasil analisis frekwensi penerimaan, pemahaman, keterlibatan, dan tindakan di lapangan Dinas Perhubungan Kota Semarang terhadap pelaksanaan program Bangun Praja	100
Lampiran 16. Hasil Analisis Data Kuisisioner Dinas Kesehatan Kota	101
Lampiran 17. Hasil analisis frekwensi penerimaan, pemahaman, keterlibatan, dan tindakan di lapangan Dinas Kesehatan Kota Semarang terhadap pelaksanaan program Bangun Praja	102
Lampiran 18. Hasil Analisis Data Kuisisioner Dinas Pasar Kota	103
Lampiran 19. Hasil analisis frekwensi penerimaan, pemahaman, keterlibatan, dan tindakan di lapangan Dinas Pasar Kota Semarang terhadap pelaksanaan program Bangun Praja	104
Lampiran 20. Hasil Analisis Data Kuisisioner Dinas Kebersihan Kota	105
Lampiran 21. Hasil analisis frekwensi penerimaan, pemahaman, keterlibatan, dan tindakan di lapangan Dinas Kebersihan Kota Semarang terhadap pelaksanaan program Bangun Praja	106
Lampiran 22. Hasil Analisis Data Kuisisioner Dinas Pariwisata Kota	107

Lampiran 23. Hasil analisis frekwensi penerimaan, pemahaman, keterlibatan, dan tindakan di lapangan Dinas Pariwisata Kota Semarang terhadap pelaksanaan program Bangun Praja.....	108
Lampiran 24.. Hasil Analisis Data Kuisisioner Kantor Infokom Kota	109
Lampiran 25.. Hasil analisis frekwensi penerimaan, pemahaman, keterlibatan, dan tindakan di lapangan Kantor Infokom Kota Semarang terhadap pelaksanaan program Bangun Praja.....	110
Lampiran 26. Foto-foto dokumentasi penelitian	111

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kegiatan pembangunan diartikan sebagai suatu upaya untuk meningkatkan sesuatu menuju ke arah yang lebih baik. Kemajuan di bidang iptek telah ikut memberikan andil bagi percepatan pembangunan di segala aspek kehidupan manusia. Menurut Hadi (2001), pembangunan memiliki makna ganda. Tipe pembangunan yang pertama lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dimana fokusnya adalah pada masalah kuantitatif dari produksi dan penggunaan sumber daya. Tipe kedua, pembangunan yang lebih memperhatikan pada perubahan dan pendistribusian barang-barang dan peningkatan hubungan sosial. Tipe yang kedua lebih berorientasi pada pembangunan sosial dimana fokusnya pada kualitatif dan pendistribusian perubahan dalam struktur dari masyarakat yang diukur dari berkurangnya diskriminasi dan eksploitasi dan meningkatnya kesempatan yang sama dan distribusi yang seimbang dari keuntungan pembangunan pada seluruh masyarakat.

Perubahan tatanan kehidupan sebagai konsekwensi logis pembangunan tidak hanya pada tatanan struktur dan dinamika sosial tetapi juga menyangkut perubahan perilaku serta cara pandang akan pengertian pembangunan itu sendiri. Kelembagaan pembangunan yang secara struktural berada pada eksekutif, dalam hal ini pemerintah sebagai pengelola kegiatan pembangunan tidak bisa lepas dari dua aspek yaitu aspek ekonomi dan aspek keberlanjutan kegiatan pembangunan itu sendiri. Perubahan dari desa menjadi Kota kecil dan selanjutnya berkembang menjadi Kota sedang terus menjadi Kota besar bahkan menjadi Kota Metropolitan telah berdampak pada lingkungan fisik dan daya dukung lingkungan tempat dimana proses pembangunan itu berlangsung.

Menurut Ryadi (1984), setiap pengelolaan pembangunan membutuhkan suatu perencanaan yang teliti dan seksama sejak awal. Teliti dan seksama dalam arti mampu memperhitungkan segala aspek yang berkaitan dengan kelancaran proses pembangunan secara menyeluruh. Segala aspek yang sedini mungkin patut diduga dapat mempengaruhi atau menimbulkan hambatan terhadap pelaksanaan pembangunan tersebut maupun dampak negatif yang menyimpang dari tujuan pembangunan itu sendiri.

Kelembagaan pengelolaan pembangunan harus didukung oleh perangkat perundang-undangan dan aparat pelaksana yang mampu menjamin realisasi pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan sehingga mampu mengakomodir kebutuhan pembangunan secara proporsional.

Kota Semarang sebagai salah satu Kota Metropolitan di Indonesia juga menghadapi persoalan yang sangat kompleks. Penataan Kota selalu menjadi arena tarik menarik kepentingan ekonomi dan kepentingan kelestarian ekologis Kota. Krisis ekonomi yang berlarut-larut melanda Indonesia turut mempengaruhi perkembangan Kota Semarang ke arah yang kurang menguntungkan.

Menurut *Ryadi* (1984), pengelolaan dan pengembangan suatu sistem perkotaan tidak dapat dilepaskan dan memerlukan segala perencanaan seteliti-telitinya, mempunyai kemampuan berkesinambungan dalam tahap-tahap pengembangan suatu sistem secara keseluruhan. Pengembangan yang dimaksud harus sejalan dengan pengembangan lokal maupun regional, menyelaraskan diri dalam suatu pola pembangunan secara lebih luas. Perencanaan sistem perkotaan yang untuk selanjutnya kita sebut "Tata Kota" hendaknya dipandang sebagai bagian dari suatu sistem perencanaan pembangunan di suatu daerah tingkat Kabupaten dan Kota (*Ryadi*, 1984).

Pengabaian kemampuan fisik lingkungan Kota dalam mendukung kegiatan pembangunan di atasnya atau yang lebih dikenal dengan daya dukung lingkungan Kota akan berdampak pada kerusakan lingkungan perkotaan secara permanen. Menurut *Bintarto* (1983), kemunduran lingkungan hidup Kota yang juga dikenal dengan istilah *Urban environmental Degradation* pada saat ini telah meluas di berbagai Kota di dunia dan beberapa Kota di Indonesia yang sudah menampakkan adanya beberapa gejala yang membahayakan.

Sumber kemerosotan kualitas lingkungan fisik Kota diantaranya disebabkan oleh terbatasnya fasilitas publik, berkurangnya ruang terbuka hijau, penurunan kualitas air, pencemaran udara dan kebisingan yang disebabkan oleh permasalahan yang kompleks dan kait mengkait satu sama lain. Tumbuh kembangnya industri dengan buangan limbah yang melampaui batas ambang ketentuan pembuangan ditambah limbah domestik dari rumah tangga dan dari sektor informal, jumlah kendaraan bermotor yang semakin bertambah sejalan dengan dinamika perkembangan Kota yang cepat makin memperparah degradasi lingkungan perkotaan. Kondisi demikian telah

menyebabkan ketidaknyamanan dari penduduk Kota yang menyebabkan beberapa dampak sosial seperti meningkatnya kriminalitas, kesemrawutan pada fasilitas-fasilitas umum, rendahnya kesadaran warga pada beberapa hal yang makin melengkapi kompleksitas permasalahan Kota.

Keinginan untuk menciptakan suatu tatanan perkotaan yang nyaman harus didukung dengan kelembagaan atau tata pemerintahan yang saling sinergis antar sektor, kemauan politik dari legislatif dan yang terpenting adalah dukungan penuh dari masyarakat pada setiap tingkatan sosial.

Telah dipahami bahwa penyelesaian permasalahan perkotaan harus secara holistik dengan mengikutsertakan para pihak yang mewakili berbagai kepentingan pada tiap level pengambilan keputusan. Upaya kajian dan studi tentang daya dukung lingkungan perkotaan hendaknya dapat dijadikan suatu pertimbangan dalam suatu penetapan program pengelolaan pembangunan perkotaan yang bermuara pada kebijakan pengelolaan yang mendapat dukungan secara menyeluruh dari masing-masing sektor pembangunan.

Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dalam hal ini telah meluncurkan suatu program strategis, yang bertujuan untuk mendorong pengelolaan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pemerintah Daerah diharapkan dapat menciptakan suatu Tata Pemerintahan yang baik di bidang lingkungan hidup yang dikenal dengan program Bangun Praja.

Upaya ini dilakukan untuk mendapatkan atau membuat suatu sistem pengelolaan perkotaan yang ramah lingkungan. Salah satu upaya strategis dari program tersebut adalah melakukan suatu evaluasi kinerja Pemerintah Daerah dalam penanganan isu sampah, ruang terbuka hijau, fasilitas publik dan pengendalian kualitas air. Pemantauan dan evaluasi merupakan salah satu mata rantai siklus dalam pelaksanaan program Bangun Praja.

Pengelolaan pembangunan perkotaan tidak bisa dipisahkan dari Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) yang mengacu pada perencanaan wilayah dan ruang Kota. Menurut *Jayadinata* (1986), perencanaan wilayah atau perencanaan ruang Kota merupakan campuran dari perencanaan umum dan perencanaan fisik. Perencanaan umum adalah suatu prosedur, dimana sebuah skema diatur sebelumnya dan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang, macam-macam badan dan sebagainya. Perencanaan fisik disebut juga perencanaan tata ruang, menunjukkan suatu

perencanaan dari sesuatu yang telah ada dan mungkin yang akan ada di kemudian hari, dan rencana itu merupakan representasi unsur-unsur dan struktur fisik sebetulnya, dilihat secara geografis atau secara ruang.

1.2. Perumusan Masalah

Kota Semarang adalah Kota yang tergolong penting di Indonesia, jumlah penduduk sebanyak 1.322.320 menjadikan Kota Semarang masuk dalam kategori sebagai Kota Metropolitan, penetapan tersebut mengacu pada pedoman pelaksanaan program Bangun praja yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Sebagai Kota Metropolitan keberadaan Kota Semarang sebagai pusat pertumbuhan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kota lain disekitarnya, baik secara sosial ekonomi maupun perubahan lingkungannya.

Pelaksanaan program Bangun Praja sendiri di Kota Semarang sangat diperlukan untuk lebih meningkatkan kinerja Pemerintah Kota dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang belum diketahui sejauh mana kendala dan potensi keberhasilan keberlangsungan pelaksanaan program itu sendiri.

Dalam pelaksanaan program Bangun Praja fokus kegiatan adalah pelaksanaan pemantauan dan evaluasi yang telah disusun dalam suatu buku pedoman pelaksanaan pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi yang dimaksud dalam pedoman evaluasi Bangun Praja adalah pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pemerintahan Kota dan Pemerintahan Kabupaten dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup, pada tahun 2002-2003 lingkup kegiatannya dititikberatkan pada pengelolaan sampah, ruang terbuka hijau, fasilitas publik dan pengendalian kualitas air. Pedoman evaluasi Bangun Praja merupakan informasi terbuka bagi para pihak yang berkepentingan, sehingga pelaksanaan program Bangun Praja memenuhi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*), seperti transparansi, akuntabilitas dan partisipasi (*Anonimous, 2003*).

Sasaran dan lingkup kegiatan pelaksanaan Bangun Praja direncanakan akan dikembangkan secara bertahap, sehingga pada akhirnya akan mencakup aspek pengelolaan lingkungan secara utuh dan menyeluruh, yang mengintegrasikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik di bidang lingkungan atau Tata Praja Lingkungan (*Good Environmental Governance*). Pengembangan tersebut disesuaikan dengan

kewenangan dan tingkat kapasitas/kemampuan Pemerintahan Kota dan Pemerintahan Kabupaten dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup (*Anonimous*, 2003)

Informasi tentang tingkat penerimaan (*acceptability*), pemahaman (*understanding*), keterlibatan (*involvement*), dan tindak lanjut kegiatan di lapangan (*action*) oleh jajaran Pemerintahan Kota Semarang sangat diperlukan untuk menyusun suatu model pendekatan pelaksanaan program Bangun Praja yang lebih baik. Penataan pola koordinasi bagi tercapainya keterpaduan pelaksanaan pembangunan menjadi hal yang sangat menentukan dalam pencapaian terciptanya Tata Praja Lingkungan.

Penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisis pelaksanaan program Bangun Praja yang meliputi analisis perencanaan program yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, pelaksanaan program Bangun Praja oleh jajaran Pemerintah Kota Semarang, dan menyusun alternatif pelaksanaan program Bangun Praja berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kota Semarang.

Pemilihan Kota Semarang Sebagai daerah yang akan diteliti mengingat Kota Semarang merupakan Kota peserta program Bangun Praja berdasarkan SK Walikota Semarang No : 660.2.05/132 tentang pembentukan tim pelaksana program Bangun Praja Kota Semarang dan SK Walikota Semarang No : 660./05/049 tentang pembentukan tim teknis program Bangun Praja Kota Semarang, dengan kategori Kota Metropolitan. Sebagai Kota Metropolitan Kota Semarang mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan kompleksitas permasalahan yang tinggi yang akan berpengaruh terhadap perkembangan Kota di sekitarnya, hal ini menuntut adanya suatu pengelolaan pembangunan yang berwawasan lingkungan oleh jajaran Pemerintah Kota Semarang.

Permasalahan pembangunan yang terjadi di Kota Semarang lebih kepada dampak dari perkembangan Kota sendiri yang menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan. diantaranya : kepadatan penduduk dan kendaraan bermotor, penataan pedagang kaki lima (PKL) yang belum baik, berkurangnya ruang terbuka hijau, serta permasalahan banjir dan tanah longsor tidak pernah bisa teratasi bahkan cenderung meningkat baik frekwensi dan kerugian yang ditimbulkan.

1.3. Tujuan Penelitian

1. Melakukan analisis perencanaan program Bangun Praja yang disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia kedalam kerangka teori perencanaan.

2. Melakukan analisis terhadap pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang, yang meliputi ; penerimaan (*acceptability*), pemahaman (*understanding*), keterlibatan (*involvement*), dan tindak lanjut kegiatan di lapangan (*action*) oleh jajaran Pemerintahan Kota Semarang.
3. Menyusun suatu alternatif pendekatan dalam suatu model pelaksanaan program Bangun Praja berdasarkan hasil analisis terhadap tahap pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini penting dilaksanakan dan di harapkan dapat bermanfaat bagi penyediaan informasi yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan program Bangun Praja dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik di bidang lingkungan atau Tata Praja lingkungan (*Good Environmental Governance*) di wilayah studi dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Hasil penelitian ini berupa model penyempurnaan pelaksanaan program Bangun Praja diharapkan akan dapat menjadi masukan bagi pelaksanaan program Bangun Praja dimasa yang akan datang.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Penjelasan tentang kegiatan pembangunan yang mengacu pada pengelolaan pembangunan berwawasan lingkungan dalam hal ini untuk menciptakan suatu tata Pemerintahan yang berwawasan lingkungan pada program Bangun Praja sesuai dengan lingkup penelitian ini akan dijelaskan dalam landasan teori dan pengkajian teoritis.

Landasan teori dan kajian teoritis terdiri dari uraian mengenai perkembangan perkotaan, pengertian program Bangun Praja, dan prinsip-prinsip perencanaan. Hal ini diikuti juga dengan pembahasan penelitian terdahulu yang relevan dan penjelasan tentang keaslian penelitian serta penyusunan hipotesis penelitian.

2.1. Landasan Teori dan Pengkajian Teoritis

Pembangunan yang dilakukan atas tujuan pertumbuhan yang cepat tanpa mengindahkan distribusi hasil pembangunan itu sendiri secara proporsional terbukti menunjukkan kelemahan dari pembangunan itu sendiri. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan untuk mempercepat kegiatan pembangunan seringkali tidak memperhatikan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Pembangunan disisi lain juga disertai dengan perkembangan dari suatu daerah dari desa menjadi Kota Kecil, Kota sedang, Kota besar, Kota Metropolitan, dan bahkan menjadi Kota Megapolitan.

Pembangunan yang mengabaikan pendistribusian hasil secara tidak merata telah menyebabkan perkembangan suatu wilayah secara terpusat yang seringkali melebihi daya dukung lingkungan yang ada. Kerusakan lingkungan di pusat perkembangan dan pertumbuhan pada pusat Kota semakin parah sehingga menuntut peran serta semua pihak untuk secara terpadu menentukan langkah preventif dibawah satu koordinasi yaitu Pemerintah Kota.

Kota sebagai pusat pembangunan dapat dipandang sebagai suatu sistem ekonomi dan sebagai ekosistem. Menurut *Douglas* (1983), sebagai suatu sistem ekonomi Kota merupakan tempat beredarnya uang, pelayanan barang dan jasa. Sebagai suatu ekosistem Kota merupakan suatu tempat aliran energi, aliran air, elemen kimia, dan sebagai tempat hidup bagi mahluk hidup terutama manusia.

Pembangunan ekonomi di Negara industri dan Negara berkembang dalam kenyataannya sangat ditentukan oleh ketersediaan dan potensi dari sumber daya alam

dan sistem alamiah yang ada seperti kondisi topografi, cadangan bahan tambang, iklim dan lain-lain. Implikasi meningkatnya keberlanjutan ekonomi bertumpu kepada peningkatan pemeliharaan alam yang baik dan perlakuan yang bersahabat terhadap alam yang menjadi keharusan bagi keberlangsungan dan produktipitas sumber daya alam dalam sistem alamiah. Pemeliharaan lingkungan alam akan mampu memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi sebagai implikasi dari hubungan timbal balik dari pembangunan ekonomi (*Hufschmidt et al*, 1983)

2.1.1. Perkembangan Perkotaan

Istilah perkembangan sering dikaitkan dengan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan perubahan menuju ke suatu kondisi yang lebih baik. Perkembangan wilayah perkotaan sangat terkait dengan kegiatan pembangunan pada Kota yang bersangkutan yang meliputi pemanfaatan sumber daya yang ada dan pemanfaatan keruangan yang dimiliki.

Kegiatan pembangunan atau pengembangan suatu wilayah yang baik setidaknya mencakup beberapa tahap yaitu; perencanaan kegiatan, pelaksanaan operasional kegiatan, evaluasi kegiatan, dan monitoring kegiatan. Penyusunan suatu perencanaan pembangunan yang mampu mengakomodir banyak kepentingan dipercaya akan memiliki keberhasilan yang signifikan bila disertai mekanisme kontrol yang baik.

Pembangunan dapat mempunyai skala Nasional, Regional, atau Lokal. Pembangunan Nasional meliputi seluruh Negara dengan tekanan pada perekonomian. Pembangunan lokal meliputi kawasan kecil dengan tekanan pada keadaan fisik, pembangunan regional meliputi suatu wilayah dan mempunyai tekanan utama pada perekonomian dan tekanan kedua pada keadaan fisik sehingga merupakan gabungan dari kedua hal tersebut di atas (*Jayadinata*, 1986).

Tidak bisa dipungkiri bahwa baik pembangunan Nasional, Regional, maupun lokal memerlukan perencanaan dan pengawasan. Menurut *Soegijoko* (1997), tujuan-tujuan yang dirumuskan (dan ingin dicapai) dalam pembangunan ekonomi perlu dipertimbangkan secara realistis, dari segi adanya sumber kekayaan alam yang ada dan yang akan dipakai dalam pembangunan itu. Sebaliknya sumber-sumber kekayaan alam itu perlu dihubungkan dengan keadaan sosial yang ada dan perkiraan perubahan yang akan diharapkan terjadi, dalam lingkup perencanaan fisik suatu wilayah atau suatu daerah.

Tugas dari perancangan fisik untuk menentukan macam unsur dalam suatu rencana pembangunan untuk suatu wilayah atau daerah dalam penentuan tata guna tanah untuk industri, untuk daerah pertanian, untuk daerah perumahan, dan penggunaan untuk sosial

dan kebudayaan, dengan mengadakan pola yang rasional untuk transportasi dan perhubungan pada umumnya, dan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan alam dan jaringan utilitas lainnya. Atas dasar yang demikian, maka perancangan fisik merupakan wadah dalam mana perbedaan interes dari masing-masing unsur diserasikan untuk tujuan kemakmuran masyarakat dan hubungan rural-urban yang seimbang (*balanced*) di dalam daerah perancangan tersebut (*Soegijoko, 1997*).

Pengembangan wilayah Kota yang kian pesat menuntut adanya pemekaran wilayah Kota. Menurut *Bintarto (1984)*, masalah-masalah yang ditimbulkan sebagai akibat pemekaran Kota adalah masalah perumahan, masalah kekurangan gedung sekolah, masalah terdesaknya daerah persawahan di perbatasan luar Kota, dan masalah administratif pemerintahan. Masalah-masalah yang banyak ini kemudian mendesak para perencana dan pengatur Kota untuk segera dapat mengatasi masalah-masalah tersebut. Masalah yang bersifat fisis ini ternyata juga bersangkutan-paut dengan masalah sosial ekonomi.

Bila kita lihat arah tujuan dari suatu pembangunan, maka kita dihadapkan kepada dua proses, yaitu proses "tumbuh" (*growth*) dengan pengertian tumbuh dalam skala ukuran atau volume yang meningkat dari pada semula serta proses "berkembang" (*developing*). Berkembang dalam lingkup fungsional sehubungan dengan adanya pertumbuhan itu. Istilah berkembang menimbulkan konsekwensi bahwa bila suatu Kota itu ditumbuhkan berarti harus dilengkapi dengan sarana-sarana dan infrastruktur yang memadai antara jumlah penduduk Kota dengan volume sarana sosial dan jenis aktivitas-aktivitas di dalam Kota itu. Semuanya adalah untuk menjamin berbagai sistem keseimbangan antara lain; ekosistem lingkungan (*ecology*) yang meliputi keseimbangan antara tersedianya sumber daya/energi dengan kuantitas penduduk dan lain-lain. Bila keadaan ini tidak dapat dicapai, maka kita akan dihadapkan kepada Kota yang "hipertrofis", yaitu Kota yang besar dalam ukurannya tetapi tidak memiliki kemampuan fungsional yang potensial (*Ryadi, 1984*).

Makin mengarah suatu Kota ke arah Metropolis, beban pengendalian masalah lingkungan makin tinggi. Beban ini diakibatkan mobilitas penduduk yang makin tinggi.

Mobilitas tersebut diakibatkan antara lain karena meningkatnya berbagai mata rantai dari pada jangkauan pengertian Kota, baik sebagai kesatuan ekonomis, pusat berbagai pengembangan dan lain-lain. Seperti variabel besarnya jumlah penduduk di tengah-tengah aktivitas sosial yang mengakibatkan interaksi sosial meningkat pula. Peningkatan ini lebih lanjut justru menambah penggunaan sistem transportasi. Demikian secara daur ulang setiap kegiatan apapun dalam sistem Kota disamping menggambarkan dinamikanya juga akan meninggalkan berbagai eksese manakala penataan sistem Kota tidak dilakukan (Ryadi, 1984).

2.1.2. Pengertian Program Bangun Praja

Ada hubungan erat antara penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan pengelolaan lingkungan yang baik. Bahkan ada korelasi yang sangat positif antara penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik akan memengaruhi dan menentukan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan hidup yang baik mencerminkan tingkat penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Keraf, 2002)

Kesinambungan pembangunan dalam visi pembangunan berkelanjutan serta upaya untuk melindungi kehidupan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum yang menjadi tugas Pemerintahan Negara sebagaimana terdapat dalam UUD 1945 menjadi dasar yang melatarbelakangi dikeluarkannya program bangun Praja oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

Besarnya tantangan yang dihadapi pada era Otonomi Daerah ini menuntut adanya pembinaan dan pengawasan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Sebab setiap daerah memiliki kapasitas yang berbeda-beda dalam pengelolaan lingkungan hidup. Padahal, pencapaian Tata Praja Lingkungan sangat tergantung dari kapasitas dan kinerja dan kelembagaan lingkungan hidupnya (Anonimous, 2003).

Program Bangun Praja adalah salah satu program kerja Kementerian Lingkungan Hidup yang bertujuan membantu Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten) meningkatkan kemampuannya dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya, sehingga Pemerintah Daerah dapat mencapai Tata Praja Lingkungan yang baik (*good environmental governance*). Pelaksanaan program Bangun Praja yang mulai dilaksanakan pada tanggal 5 juni 2002 meliputi Kota/Kabupaten yang keikutsertaanya

adalah berdasarkan komitmen daerah dalam melaksanakan pengelolaan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Dengan tercapainya Tata Praja Lingkungan, berarti daerah telah dapat mendayagunakan semua pihak yang berkepentingan dan kemampuan yang dimilikinya untuk melaksanakan pemanfaatan sumber daya alam yang berimbang dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan (*Anonimous*, 2003).

Program Bangun Praja kegiatan utamanya adalah pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kota dan Kabupaten dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan dan diketahui oleh pemerintah Kota/Kabupaten melalui sosialisasi dan asistensi teknis yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

2.1.3. Prinsip-prinsip Perencanaan

Kesulitan-kesulitan lingkungan yang muncul bukanlah sesuatu yang baru, namun belakangan ini baru dipahami kerumitannya. Sebelumnya perhatian lebih tercurah pada dampak pembangunan terhadap lingkungan. Sekarang diperlukan kebersamaan untuk memperhatikan bagaimana kerusakan lingkungan dapat menghambat atau membalik pertumbuhan ekonomi. Di daerah satu setelah lainnya, kerusakan lingkungan mengerosi potensi-potensi bagi pembangunan. Hubungan dasar ini terungkap menjadi perhatian utama akibat krisis lingkungan dan pembangunan pada tahun 1980 (*WCED*, 1987).

Kota sebagai pusat dari kegiatan ekonomi, pendidikan, sosial dan pemerintahan merupakan wilayah yang memiliki potensi besar mengalami degradasi kualitas lingkungan. Tekanan penduduk telah menambah beban Kota dengan kompleksitas permasalahan sosial yang selanjutnya akan berdampak pada lingkungan Kota secara keseluruhan.

Di dalam lingkup perencanaan Tata Kota pengertian "Kota" dapat dijelaskan baik dari segi struktural maupun fungsionalnya. Bila dihubungkan dengan segi strukturalnya maka Kota itu dapat diartikan sebagai suatu area/daerah atau wilayah yang secara administratif memiliki batas-batas dengan di dalamnya terdapat komponen-komponen yang meliputi antara lain: penduduk dengan ukuran jumlah, sistem ekonomi, sistem sosial, sarana maupun infrastruktur yang semuanya merupakan sebagai suatu kelengkapan keseluruhan. Sebaliknya dari segi fungsionalnya pengertian Kota dapat

diartikan sebagai pusat permukiman penduduk maupun pusat pertumbuhan dalam sistem pengembangan kehidupan sosio kultural yang luas (Ryadi, 1984).

Tanggung jawab perencanaan wilayah perkotaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dan Pemerintahan Kota yang dilimpahkan kepada Bappeda sebagai instrumen yang penting di daerah. Menurut *Soegijoko* (1997), akan terjadi penambahan penduduk Kota sejalan dengan perkembangan dari Kota tersebut yang menuntut dipersiapkannya pendidikan rencana Kota dan wilayah.

Mengikuti perkembangannya, maka fungsi pemerintahan zaman sekarang, khususnya negara-negara yang sedang berkembang, berusaha merumuskan konsep umum dan melaksanakan rencana perekonomiannya. Persoalan-persoalan: pendidikan, perumahan, dan kesehatan di samping pencapaian kemakmuran, seperti pangan pada umumnya merupakan komponen rencana pembangunan yang tidak terpisahkan dengan fisik lingkungan. Akhir-akhir ini perhatian terhadap fisik lingkungan mulai diakui pentingnya bersamaan dengan komponen-komponen ekonomi dan sosial. (*Soegijoko*, 1997).

Perancangan fisik merupakan wadah dalam mana perbedaan interest dari masing-masing unsur diserasikan untuk tujuan kemakmuran masyarakat dan hubungan rural urban yang seimbang (*balance*) di dalam daerah perancangan tersebut. Dengan demikian, perancangan fisik adalah sebagian dari proses yang mempunyai banyak segi dan proses itu tergantung dari bermacam-macam faktor perkembangan (*Soegijoko*, 1997).

Dalam suatu perencanaan yang terpenting bahwa suatu planning haruslah dalam skala regional, karena regional plan memberikan rangka dasar (*frame work*) dalam mana proyek-proyek yang mempunyai arti nasional dan lokal dapat mempunyai tempatnya masing-masing. *Regional planning* juga memberikan kemungkinan untuk dapat memobilisir melalui pembangunan masyarakat terutama pada tingkat lokal (*Soegijoko*, 1997).

2.2. Pembahasan Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian yang berkaitan dengan kondisi dan permasalahan Kota serta upaya pengelolaan pembangunan perkotaan telah banyak diteliti di antaranya:

1. Partisipasi Masyarakat Kawasan Terbangun Terhadap kebijakan Pengelolaan Sampah Pemerintah Kota Semarang (Studi Kasus di Perumahan Aryamukti Semarang) diteliti oleh Djaka Prakosa tahun 2000.

2. Kajian Pola Tata Ruang Kawasan Alun-Alun Semarang diteliti oleh Prabekti tahun 2001.
3. Pencemaran Udara di Kota Semarang Akibat Lalu Lintas Jalan Raya diteliti oleh Suwodo tahun 2001.
4. Analisa dan Rencana Kerangka Umum Kota Lhokseumawe diteliti oleh Direktorat Tata Kota dan Tata Daerah Direktorat Jendral Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum 1982.
5. Ruang Terbuka Untuk Kota yang Padat dan Majemuk diteliti oleh Usman Pelly tahun 2001.
6. Penerapan Pendekatan Pemberdayaan Dalam Pembangunan Kampung Perkotaan diteliti oleh Pinky Saptandary tahun 2001.
7. Pengkajian Pola Peremajaan Kawasan Kumuh Perkotaan diteliti oleh Litbang Bidang Permukiman Departemen Pekerjaan Umum 1997.
8. Tipologi Pola Spatial Kota diteliti oleh Ahmad Junaedi 1995
9. Globalisasi Sub-Urbanisasi ; Jakarta dan Transformasi Sosial Ekonomi Depok diteliti oleh Asep Suryana 2001.
10. Pengembangan Sistem Informasi Peraturan Bangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta diteliti oleh Ahmad Junaedi tahun 1998.
11. Perkembangan Perencanaan Kota di Malaysia dan Indonesia; Studi Komparatif diteliti oleh Ahmad Junaedi 1999.

Dari beberapa penelitian tersebut di atas secara umum informasi yang diperoleh banyak menerangkan aspek fisik dan sosial ekonomi suatu Kota dan belum ada informasi tentang peran Dinas/Instansi dalam suatu pengelolaan pemerintahan dalam suatu program yang ditujukan untuk menciptakan tata Pemerintahan yang baik dibidang lingkungan yaitu program Bangun Praja.

Penelitian dengan mengambil bidang kajian Evaluasi Program Bangun Praja; Studi Kasus Kota Semarang Jawa Tengah belum pernah diteliti oleh penelitian lain. Dalam usulan penelitian ini difokuskan pada aspek perencanaan, penerepan di Lapangan, dan merekomendasikan model yang tepat bagi pelaksanaan program Bangun Praja untuk menemukan sinergitas antar instansi terkait dalam menciptakan keterpaduan kinerja pembangunan pada tatanan pemerintahan yang baik di bidang lingkungan atau Tata Praja lingkungan (*Good Environmental Governance*) yang terkait

dengan Evaluasi Bangun Praja oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

2.3. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian terhadap suatu program yang baru dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup yaitu program Bangun Praja. Banyak penelitian mengenai lingkungan yang dilakukan di Kota Semarang namun belum ada yang melakukan penelitian terhadap pelaksanaan program Bangun Praja. Spesifikasi dari penelitian ini adalah mencoba memotret aspek perencanaan program Bangun Praja dan melakukan evaluasi pelaksanaan program terhadap Kota peserta program Bangun Praja yaitu Kota Metropolitan.

Dengan pertimbangan bahwa program Bangun Praja yang baru dilaksanakan secara Nasional mulai tanggal 5 Juni 2002 tepatnya pada hari lingkungan sedunia, maka penulis yakin bahwa penelitian ini merupakan suatu penelitian yang benar-benar belum pernah dilakukan berdasarkan prosedur kerja penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini juga merupakan penelitian awal yang bisa ditindak lanjuti mengingat permasalahan lingkungan yang berkaitan dengan mekanisme pengelolaan pembangunan masih belum banyak dilakukan.

2.4. Hipotesis

Penelitian ini disusun dengan hipotesis sebagai berikut :

Pelaksanaan Program Bangun Praja yang bertujuan untuk mewujudkan suatu Tata Pemerintahan yang baik di bidang lingkungan (*Good Environmental Governance*) akan mampu meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Semarang dalam pengelolaan sampah, ruang terbuka hijau, pengelolaan fasilitas publik, dan pengendalian kualitas air dalam suatu pengelolaan pembangunan berwawasan lingkungan.

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian ini adalah dengan penguraian kondisi objek penelitian melalui penggalian data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari pengkajian literatur dan penjelasan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan penjelasan dari hasil kajian tim Magister Ilmu Lingkungan Undip terhadap pelaksanaan program Bangun Praja di 4 Kota di Jawa Tengah yang terdiri dari Kota Semarang, Surakarta, Kebumen, dan Purbalingga.

Data primer diperoleh dengan penyebaran kuisioner dan wawancara di jajaran Pemerintah Kota Semarang. Kuisioner diberikan pada 10 Dinas instansi dengan masing-masing mendapat 5 kuisioner. Pemberian skor nilai 1 – 6 ditujukan untuk melihat tingkat responsi dari responden terhadap variabel penerimaan, pemahaman, keterlibatan, dan tindakan di lapangan dalam pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang. Skor nilai 1,2,3,4,5,dan 6 masing-masing merepresentasikan *sangat rendah, rendah, ragu-ragu mungkin rendah, ragu-ragu mungkin tinggi, tinggi, dan sangat tinggi* dari masing-masing variabel. Skor tersebut diperoleh masing-masing jawaban kuisioner a skor =6, b skor = 5, c skor =4, d skor = 3, e skor = 2, dan f skor =1. Dengan tabulasi skoring sebagai berikut :

Dinas/Instansi	Variabel	Responden	Jawaban pertanyaan										Skor	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Dinas/ instansi dalam jajaran Pemerintah Kota Semarang yang terdiri dari: Bapedalda, Bappeda, Dinas Kebersihan, Dinas Pariwisata, Dinas Pasar, Dinas perhubungan, Dinas, Kesehatan,	Penerimaan	1	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	5
		2												
		3												
		4												
		5												
	Pemahaman	1	b	b	b	c	c	c	a	a	a	b	5	
		2												
		3												
		4												
		5												
Keterlibatan	1	c	c	c	b	b	b	d	d	d	c	4		

Dinas Pertamanan, DPU, dan Kantor Infokom		2											
		3											
		4											
		5											
	Tindakan dilatangan	1	e	f	e	f	d	d	b	b	b	d	3
		2											
		3											
		4											
		5											

Table 1. Tabulasi skoring kuisisioner

Skor nilai merupakan rata-rata dari 5 responden dimasing-masing Dinas/Instansi Kuisisioner yang berjumlah 50 kuisisioner dengan masing-masing Dinas/Instansi 5 kuisisioner akan dilakukan analisis deskriptif frekwensi yang menggambarkan tingkat keyakinan responden terhadap seri pertanyaan masing-masing variabel, yaitu penerimaan (*acceptability*), pemahaman (*understanding*), keterlibatan (*involvement*), dan tindakan dilatangan (*action*) dalam pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang.

Selanjutnya dilakukan wawancara untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dari masing-masing Dinas/instansi yang menjadi sampel.

Hasil yang diperoleh dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif akan di deskripsikan dalam suatu pembahasanan penelitian berdasarkan proporsi informasi yang diperoleh untuk menjelaskan fenomena yang ada pada objek penelitian. Menurut *Moleong* (2000), penggunaan penelitian kuantitatif dalam penelitian kualitatif adalah untuk melihat hubungan antar variabel.

3.1. Rancangan Penelitian dan Perspektif Pendekatan Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan ini merupakan penelitian studi kasus (*case study*) dimana pengambilan data dilakukan dengan menggunakan kuisisioner dan wawancara terhadap sampel populasi yang telah ditetapkan dengan menggunakan metode *purpossive sampling*. Observasi dilakukan terhadap variabel data setelah mendapatkan gambaran kondisi lapangan. Selanjutnya akan dilakukan kompilasi data

yang diperoleh untuk selanjutnya diolah dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dan kualitatif diharapkan akan mampu menjelaskan fenomena yang diperoleh secara lebih luas.

Tahap penelitian ini terbagi tiga: *Pertama*, merupakan upaya untuk mengetahui kondisi latar fokus penelitian dengan mempelajari dokumen resmi untuk memperoleh gambaran umum tentang wilayah, kelembagaan pemerintah, dan penduduk di Kota Semarang. Kajian dokumen juga dilakukan terhadap dokumen pelaksanaan program Bangun Praja yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup. Selanjutnya dilakukan penyusunan kuisioner untuk mengumpulkan informasi kondisi Dinas Instansi terkait terhadap program Bangun Praja terhadap aspek yang akan diamati yaitu: penerimaan, persepsi, partisipasi, dan tindakan nyata di lapangan. *Kedua*, setelah data awal yang dibutuhkan diperoleh maka akan dilakukan pengumpulan data secara lebih mendalam melalui wawancara dan observasi untuk menguji validitas data yang diperoleh. *Ketiga*, melengkapi data yang ada dengan catatan lapangan sehingga sebelum data diolah sudah memenuhi standar validitas dan reabilitas untuk dilakukan analisis. *Keempat*, melakukan analisis data untuk menjelaskan temuan dan fenomena yang ada dan membuat deskripsi secara analitik.

3.2. Ruang Lingkup dan Fokus Penelitian

3.2.1. Ruang lingkup penelitian

Pembatasan ruang lingkup penelitian di batasi pada pelaksanaan program Bangun Praja yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan memotret penyusunan perencanaan program Bangun Praja kedalam kerangka teori perencanaan. Selanjutnya akan dianalisis pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang yang meliputi penerimaan (*acceptability*), pemahaman (*understanding*), keterlibatan (*involvement*), dan tindak lanjut kegiatan di lapangan (*action*) oleh jajaran Pemerintah Kota Semarang.

3.2.2. Fokus penelitian

Ada dua hal yang akan dianalisis yaitu efektifitas perencanaan program Bangun Praja yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan realisasi pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang. Lingkup penelitian dibatasi pada Dinas Instansi terkait pada jajaran Pemerintah Kota Semarang yang terdiri dari : Bapedalda, Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Dinas Tata Kota dan Pemukiman, Dinas Pekerjaan

Umum (DPU), Dinas Kesehatan, Dinas Pertanahan, Dinas Pertanian, Dinas Kebersihan, Dinas Pasar, Bappeda.

3.3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah Kota Semarang yang menjadi wilayah kerja dari jajaran Pemerintah Kota. Hal ini lebih kepada pembatasan kewenangan dari masing-masing Dinas Instansi terkait yang berkaitan dengan wilayah kerja yang mengacu kepada pedoman evaluasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

3.4. Variabel Penelitian dan Fenomena yang diamati

Untuk melihat atau memotret penyusunan perencanaan program Bangun Praja dilakukan dengan melakukan pengkajian dokumen-dokumen pelaksanaan program Bangun Praja dari Kementerian Lingkungan Hidup dan studi literatur yang berhubungan dengan program Bangun Praja.

Variabel pengamatan pelaksanaan program Bangun Praja oleh jajaran Pemerintah Kota Semarang meliputi: penerimaan (*acceptability*), pemahaman (*understanding*), keterlibatan (*involvement*), dan tindak lanjut kegiatan di lapangan (*action*) akan dilakukan dengan wawancara dan pengisian kuisioner.

3.4.1. Klasifikasi variabel

Variabel yang akan dianalisis merupakan variabel kualitatif dengan diikuti pengumpulan dan analisis data kuantitatif yang selanjutnya akan deskripsikan dengan metode deskripsi analitik. Pengkuantifikasian variabel diharapkan akan mampu menjelaskan taraf atau tingkatan pada setiap level variabel yang akan diamati antara lain: penerimaan (*acceptability*), pemahaman (*understanding*), keterlibatan (*involvement*), dan tindak lanjut kegiatan di lapangan (*action*) oleh jajaran Pemerintah Kota Semarang.

3.4.2 Definisi konseptual variabel

Secara konseptual variabel yang dianalisis adalah sebagai berikut :

Penerimaan (acceptability) adalah : kecenderungan Dinas Instansi terkait dalam jajaran Pemerintah Kota Semarang dalam mengadopsi konsep pelaksanaan program Bangun Praja.

Pemahaman (understanding) adalah : tingkat pengertian dari Dinas Instansi terkait dalam jajaran Pemerintah Kota Semarang yang dalam menterjemahkan konsep pelaksanaan program Bangun Praja.

Keterlibatan (involvement) adalah : seberapa jauh keterlibatan dinas Instansi terkait ikut berpartisipasi dalam mensukseskan program Bangun Praja.

Tindak Lanjut di lapangan (action) adalah : melihat kepada tindakan nyata yang telah dilakukan Dinas Instansi terkait dalam pelaksanaan tugasnya yang mengacu pada konsep program Bangun Praja

3.4.3. Definisi operasional variabel

Dalam menterjemahkan konseptual variabel yang diamati ke dalam kerangka operasional maka dilakukan pengukuran menurut skor 1 sampai 6, urutan penilaian atau tingkat nilai dari terkecil hingga terbesar merupakan urutan nilai masing-masing variabel. Angka 1 menunjukkan ukuran variabel terendah dan secara berurutan semakin besar sampai angka 6 yang merupakan nilai tertinggi.

3.5. Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan pengisian kuisioner yang dilakukan pada Dinas/Instansi pada jajaran Pemerintah Kota Semarang. Data sekunder diperoleh dari dokumen pelaksanaan program Bangun Praja yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, data-data pelaksanaan pembangunan di Dinas/Instansi, dan data dari BPS Kota Semarang.

Sumber data primer diperoleh dari wawancara dan pengisian kuisioner pada Dinas/Instansi pada Pemerintah Kota Semarang yang terdiri dari : Bapedalda, Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Dinas Tata Kota dan Pemukiman, Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Kesehatan, Dinas Pertanahan, Dinas Pertanian, Dinas Kebersihan, Dinas Pasar, Bappeda.

Data sekunder terdiri dari dokumen pelaksanaan program Bangun Praja yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, data-data pelaksanaan pembangunan di Dinas/Instansi, dan data dari BPS Kota Semarang.

3.6. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang diperlukan adalah pedoman kuisisioner, pedoman wawancara, dan alat-alat yang dibutuhkan. Alat yang dibutuhkan adalah alat tulis, *recorder* dan tenaga lapangan untuk melakukan wawancara dan pengisian kuisisioner.

3.7. Populasi dan teknik pengambilan sampel

Populasi penelitian adalah Dinas/Instansi dalam jajaran Pemerintah Kota Semarang dan dari populasi yang ada terpilih sampel penelitian yang terdiri dari: Bapedalda, Bappeda, Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Dinas Kesehatan Kota (DKK), Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Kebersihan, Dinas Pasar, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dan Kantor Infokom Kota. Pemilihan sampel populasi adalah dengan pertimbangan bahwa sampel terpilih memiliki keterkaitan yang erat baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan pelaksanaan penelitian yang ingin di capai.

Dikarenakan penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus (*case study*) dengan pendekatan *purposive sampling* maka setiap sampel terpilih akan dilakukan wawancara dan pengisian kuisisioner. Untuk kuisisioner diberikan kepada 50 responden dengan daftar pertanyaan sama yang telah disusun terlebih dahulu, sedangkan wawancara merupakan wawancara bebas pada masing-masing Dinas/Instansi dengan narasumber pimpinan Dinas/Instansi, kepala Bidang dan staff yang membidangi pelaksanaan program Bangun Praja pada masing-masing Dinas/Instansi.

3.8. Teknik Pengumpulan Data

Data mengenai pelaksanaan program Bangun praja diperoleh dengan melakukan evaluasi terhadap pedoman umum pelaksanaan Bangun Praja dan ekspos Kementerian Lingkungan Hidup mengenai pelaksanaan program Bangun Praja. Evaluasi pelaksanaan progrma Bangun Praja diperoleh dari hasil evaluasi program Bangun Praja diempat Kota di Jawa Tengah yang dilakukan oleh tim evaluasi program Bangun Praja dari Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro.

Pengumpulan data pelaksanaan program Bangun Praja dilakukan pada objek penelitian di Kota Semarang dengan sampel penelitian terdiri dari Dinas/ Instansi di Jajaran Pemerintah Kota Semarang yaitu: Bapedalda, Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Dinas Tata Kota dan Pemukiman, Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas

Kesehatan, Dinas Pertanahan, Dinas Pertanian, Dinas Kebersihan, Dinas Pasar, dan Bappeda. Teknik pengumpulan data pertama kali adalah melakukan pengenalan dengan Dinas serta menyerahkan surat ijin penelitian dan menyerahkan kuisisioner awal untuk memperoleh gambaran umum objek penelitian. Hasil kuisisioner tersebut akan dijadikan acuan untuk penyusunan materi wawancara secara lebih fokus berdasarkan masukan dan informasi kondisi latar objek penelitian. Wawancara akan dilakukan pada level Kepala Dinas atau Kepala Bagian setingkat di bawah Kepala Dinas (eselon 2 dan 3) dengan pertimbangan bahwa informasi yang ingin diperoleh merupakan informasi yang lebih tepat diambil pada level pengambil keputusan untuk memperoleh validitas data yang tinggi. Masing-masing Dinas/Instansi ditetapkan 5 (lima) responden yang diwawancarai sehingga total responden yang diwawancarai sebanyak 50 (lima puluh) responden.

3.9. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh akan dilakukan analisis dengan menggunakan teknik analisis yang disesuaikan dengan jenis data yang diperoleh saat penelitian dilakukan. Pada penelitian ini teknik analisis data yang dilakukan adalah:

1. Analisis dokumen pedoman pelaksanaan program Bangun Praja

Pelaksanaan program Bangun Praja akan dianalisis mengenai pedoman umum pemantauan berdasarkan buku pedoman umum pelaksanaan program Bangun Praja yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada pelaksanaan program Bangun Praja tahap I.

2. Analisis statistik

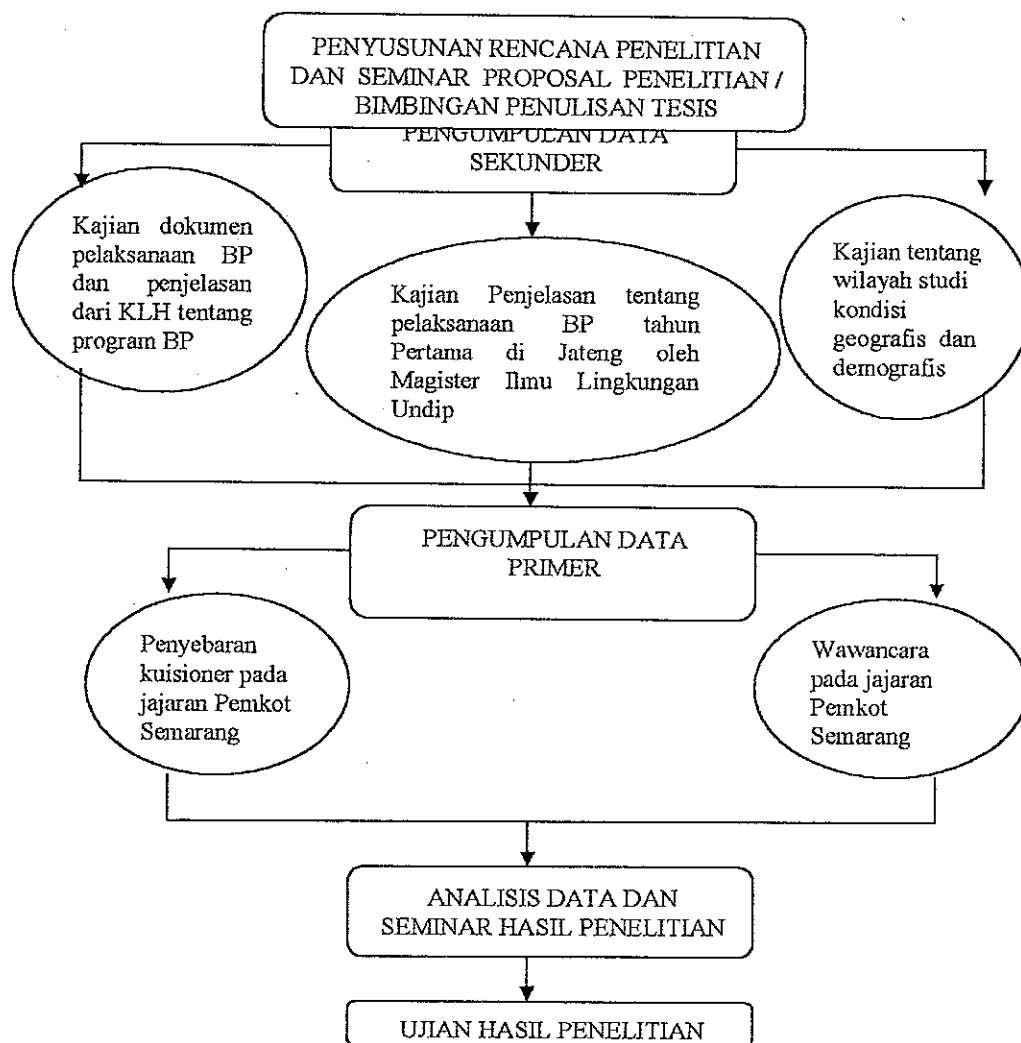
Untuk mengetahui penerimaan (*acceptability*), pemahaman (*understanding*), Keterlibatan (*involvement*), dan tindakan di lapangan (*action*) jajarannya Pemerintah Kota Semarang dalam program Bangun Praja dilakukan analisis statistik frekwensi dan prosentase terhadap kuisisioner yang diisi oleh Dinas/Instansi sampel

3. Deskripsi hasil analisis

Data statistik yang diperoleh dari kuisisioner akan dijadikan bahan untuk melakukan pendeskripsian hasil penelitian yang ditunjang dengan hasil wawancara dan hasil dari kegiatan ekspos Kementerian Lingkungan Hidup dan tim evaluasi program Bangun Praja tahap pertama yang akan dianalisis dengan pendekatan teori perencanaan.

3.10. Alur Penelitian

Pelaksanaan penelitian yang dimulai dengan pengumpulan data primer di jajaran Pemerintah Kota Semarang dilakukan dengan penyebaran kuisisioner dan melalui wawancara terhadap responden. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengikuti penjelasan Kementerian Lingkungan Hidup dan pengkajian pedoman pelaksanaan program Bangun Praja ditambah dengan penjelasan dari tim evaluasi dari Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro tentang pelaksanaan program Bangun Praja di empat Kota di Jawa Tengah yang terdiri dari Semarang, Surakarta, Kebumen, dan Purbalingga. Alur penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram alur penelitian

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil kegiatan penelitian ini meliputi penggambaran rona lingkungan lokasi penelitian yang berisi kondisi geografis dan demografis lokasi dari sumber data sekunder. Sedangkan data primer dari hasil kuisisioner dan hasil wawancara serta data yang diperoleh dari kegiatan tim evaluasi program Bangun Praja dan ekspos tim Kementerian Lingkungan Hidup di Semarang yang diuraikan dalam bentuk narasi. Data sekunder dan data primer akan menjadi acuan pembahasan penelitian secara proporsional untuk menjelaskan temuan penelitian secara deskriptif.

4.1. Rona lingkungan daerah penelitian

Kota Semarang secara geografis terletak pada: sebelah Utara terletak pada $6^{\circ} 50'LS$ berbatasan dengan laut Jawa, sebelah Selatan terletak pada $7^{\circ} 10'LS$ berbatasan dengan Kab. Dati II Semarang, sebelah barat terletak pada $109^{\circ} 50'BT$ berbatasan dengan Kab. Dati II Kendal, dan sebelah timur terletak pada $110^{\circ} 35'BT$ berbatasan dengan Kab. Dati II Demak, dengan luas wilayah $371,52 \text{ km}^2$ yang dihuni oleh 1.322.320 jiwa yang tersebar di 16 Kecamatan dalam Kota Semarang (Anonymous, 2001).

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km)	Jumlah rumah tangga	Jumlah pddk (jiwa)	Kepadatan pddk tiap km^2
1.	Mijen	57,55	8.927	37.927	659
2.	Gunungpati	52,63	15.335	57.485	1.092
3.	Banyumanik	27,73	24.687	104.578	3.771
4.	Gajah Mungkur	10,78	12.399	57.550	5.339
5.	Semarang Selatan	5,92	17.164	78.036	13.182
6.	Candisari	6,80	16.609	77.719	11.429
7.	Tembalang	44,20	25.418	103.343	2.338
8.	Pedurungan	20,72	32.325	137.784	6.650
9.	Genuk	27,39	14.142	62.966	2.300
10.	Gayamsari	5,26	13.706	63.142	12.004
11.	Semarang Timur	7,12	19.417	81.816	11.491
12.	Semarang Utara	10,97	27.633	122.736	11.188
13.	Semarang Tengah	5,14	18.464	77.210	15.021
14.	Semarang Barat	19,96	31.358	146.651	7.347
15.	Tugu	29,38	5.271	24.145	822
16.	Ngaliyan	39,97	25.086	89.202	2.232
Jumlah		371,52	307,941	1.322.320	3.559

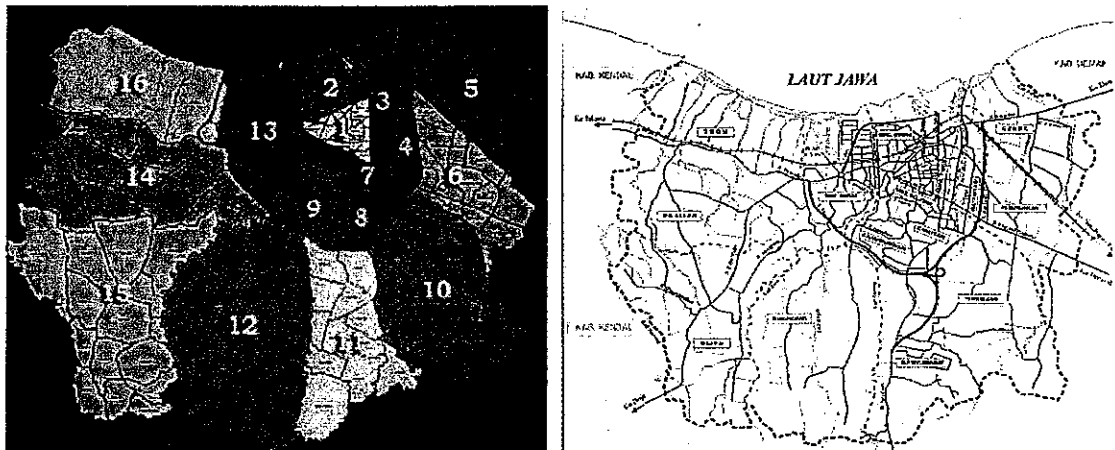
Sumber BPS Kota Semarang

Table 2. Kondisi kependudukan di Kota Semarang

Kota Semarang yang memiliki kepadatan rata-rata penduduk lebih dari 3.559 tiap km membutuhkan suatu sarana prasarana pendukung dan pengelolaan lingkungan yang efektif. Kepadatan penduduk tidak hanya menimbulkan masalah penyediaan lahan bagi pemukiman dan industri namun juga menimbulkan masalah sosial.

Sebagai Kota Metropolitan kegiatan pembangunan di Kota Semarang berlangsung cepat dan pesat yang menuntut tersedianya infrastruktur penunjang dan pengelolaan pembangunan yang baik. Kegiatan pembangunan yang berkembang pesat tersebut telah mengakibatkan dampak terhadap perubahan lingkungan sebagai konsekuensi dari penambahan penduduk dan keterbatasan daya dukung lingkungan dalam menunjang keberlangsungan pembangunan.

Perubahan fungsi lahan yang terjadi akibat tuntutan kebutuhan bagi pengembangan sektor perumahan dan industri menyebabkan berkurangnya ruang yang berfungsi sebagai wilayah penyangga (*buffer zone*) dan untuk kepentingan konservasi Kota seperti ruang terbuka hijau dan fasilitas publik.



Gambar 2. Peta wilayah Kota Semarang

4.2. Hasil penelitian

Data hasil penelitian ini diperoleh dari hasil mengikuti ekspose dari tim Kementerian Lingkungan Hidup tentang program Bangun Praja di Semarang dan tim evaluasi program Bangun Praja dari Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro yang melakukan evaluasi program Bangun Praja diempat Kota di Jawa Tengah yang terdiri

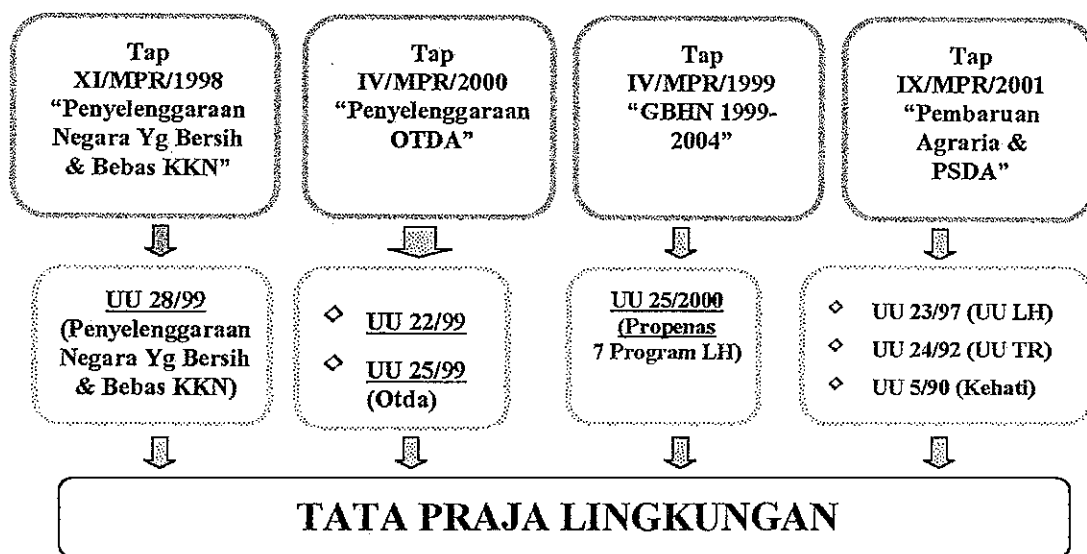
dari Kota Semarang (Kota Metropolitan), Kota Surakarta (Kota Besar), Kota Kebumen (Kota Sedang), Kota Purbalingga (Kota Kecil). Penghimpunan data pelaksanaan program Bangun Praja diperoleh dari kuisioner dan wawancara yang dilakukan terhadap jajaran Pemerintah Kota Semarang yang menjadi obyek penelitian.

4.2.1. Ekspos Kementerian Lingkungan Hidup dan Tim evaluasi program Bangun Praja.

Pelaksanaan program Bangun Praja yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2002 merupakan program yang masih membutuhkan penyempurnaan baik pada mekanisme prosedur maupun tatalaksana di lapangan. Kementerian Lingkungan Hidup dalam hal ini telah melakukan upaya-upaya dengan lebih mendasari penyempurnaan program berdasarkan aspirasi dari daerah dengan melakukan sosialisasi dan mengevaluasi pelaksanaan program Bangun Praja tahun pertama.

4.2.1.1. Ekspos Kementerian Lingkungan Hidup

Program Bangun Praja merupakan program strategis bagi penciptaan suatu tata pemerintahan yang memiliki kemampuan untuk mengakomodir kepentingan pelestarian lingkungan dalam kegiatan pembangunan atau yang dikenal dengan istilah *Good Environmental Governance (GEG)*

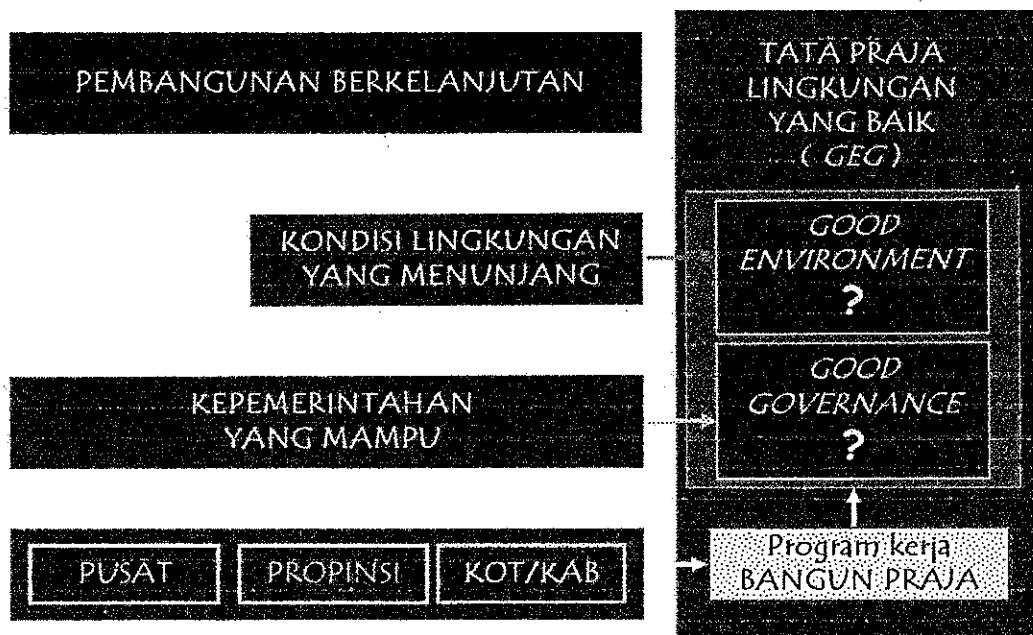


Gambar 3. Aspek legal pelaksanaan program Bangun Praja

Pelaksanaan Program didasarkan pada kepentingan generasi sekarang untuk memenuhi kebutuhannya tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam pemenuhan kebutuhan dimasa datang.

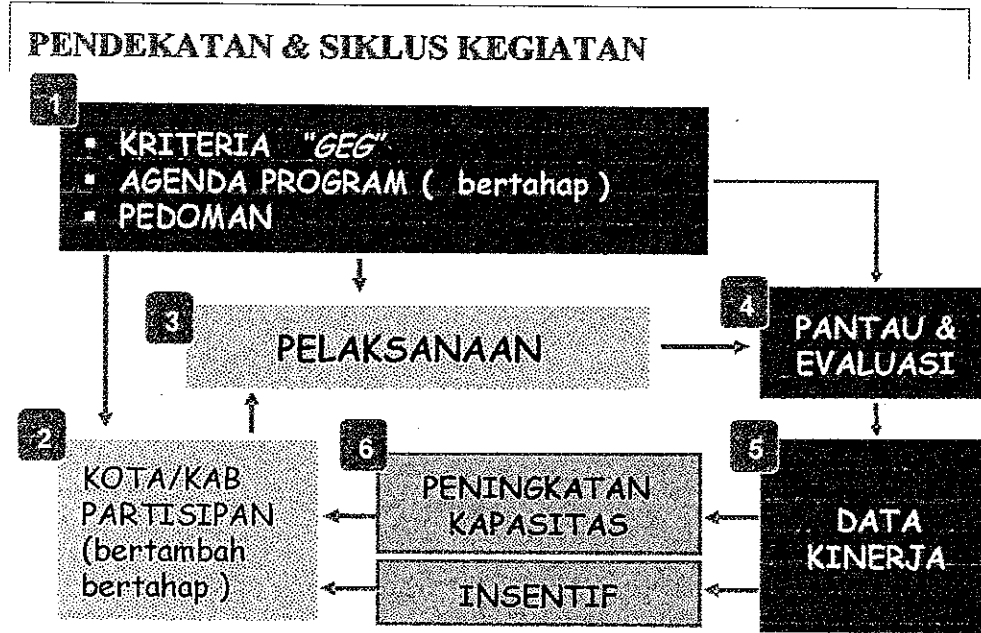
Permasalahan lingkungan hidup merupakan permasalahan Global, Nasional, dan Lokal yang memerlukan keterpaduan penanganan. Komitmen Internasional dalam pertemuan puncak pembangunan berkelanjutan atau *World Summit on Sustainable Development (WSSD)* yang berlangsung di Johannesburg Afrika Selatan tanggal 26 Agustus - 4 September 2002 dimana Indonesia termasuk sebagai salah satu negara peserta telah menghasilkan hasil berupa Deklarasi Johannesburg. Inti dari deklarasi Johannesburg antara lain adalah : Pembangunan berkelanjutan memerlukan perspektif jangka panjang dan partisipasi luas dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan di segala lapangan dari semua kelompok utama termasuk perempuan, penduduk adat, dan sektor swasta (Adnan, 2002).

Sebagai salah satu negara peserta *World Summit on Sustainable Development* Indonesia terikat untuk melaksanakan Deklarasi Johannesburg termasuk peningkatan *governance*. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup mengeluarkan Program Bangun Praja yang bertujuan untuk menciptakan tata Pemerintahan yang baik di bidang lingkungan (*Good Environmental Governance*).



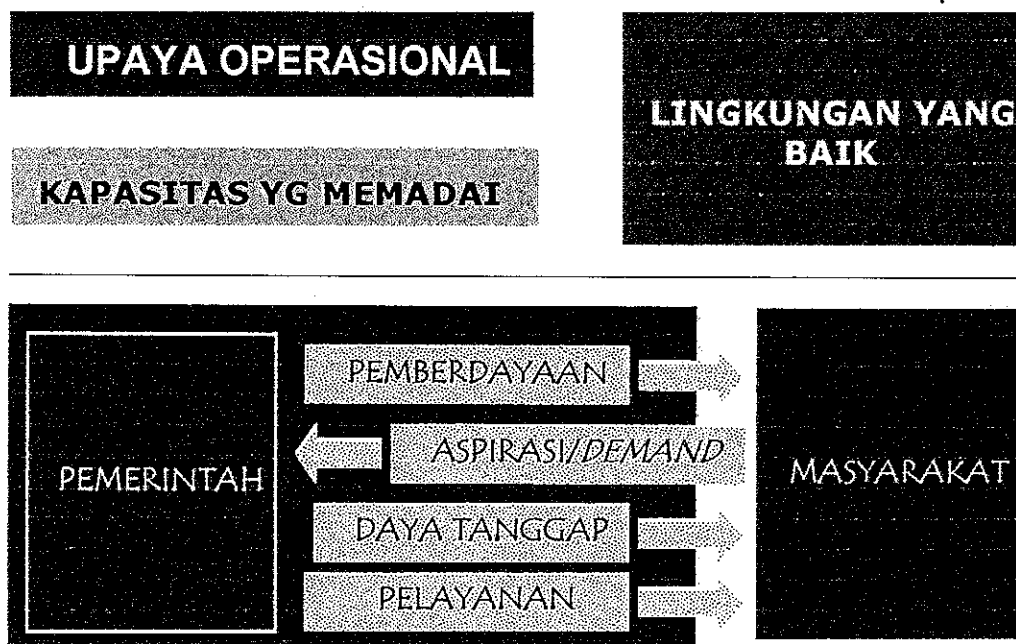
Gambar 4. Skema pelaksanaan program Bangun Praja

AGENDA NASIONAL



Gambar 5. Agenda Nasional pelaksanaan program Bangun Praja

AGENDA DAERAH (PROVINSI & KOTA/KAB)



Gambar 6. Agenda Daerah pelaksanaan program Bangun Praja

4.2.1.2. Hasil Ekspos tim evaluasi program Bangun Praja tahun pertama

Inti dari pelaksanaan program Bangun Praja adalah pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kota/Kabupaten di bidang pengelolaan lingkungan hidup, yang menunjukkan seberapa besar Pemerintah Kota/Kabupaten telah melaksanakan prinsip-prinsip *Good Environmental Governance* atau tata praja lingkungan. Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap aspek-aspek: (1) institusi, (2) manajemen, (3) daya tanggap Pemerintah Kota/Kabupaten, (4) kondisi fisik lingkungan Kota/Kabupaten. Keempat aspek tersebut dipandang mencerminkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup di Kota/Kabupaten dan sejauh mana Kota/Kabupaten telah menerapkan tata praja lingkungan dengan baik.

Pada tahun pertama (2002) Program Bangun Praja, pemantauan dan evaluasi difokuskan pada kinerja : (1) pengelolaan sampah, (2) pengelolaan ruang terbuka hijau, (3) fasilitas publik, (4) pengendalian kualitas air. Pada tahun kedua (2003) fokus pemantauan dan evaluasi akan dikembangkan secara bertahap pada pengelolaan (5) pesisir pantai, (6) amdal, (7) tata ruang, (8). Pada tahun ketiga (2004) fokus pemantauan ditambah dengan (8) pencemaran udara, (9) kerusakan lingkungan hidup, (10) limbah B3.

Pelaksanaan program Bangun Praja pada tahun pertama (2002) dilaksanakan dengan melibatkan 59 Kota dan Kabupaten peserta di seluruh Indonesia. Untuk Jawa Tengah Kota/Kabupaten yang mengikuti program Bangun Praja adalah Semarang, Surakarta, Kebumen, Purbalingga, dan Salatiga. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program Bangun Praja tahap pertama yang dilaksanakan oleh Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro diketahui perlu adanya penyesuaian pedoman evaluasi terhadap karakteristik Kota (kota metropolitan, kota besar, kota sedang, dan kota kecil) yang dievaluasi sehingga kondisi tiap tipologi kota dapat terakomodasi dengan baik dalam program Bangun Praja.

Disamping itu berdasarkan laporan akhir dari pelaksanaan evaluasi program Bangun Praja yang dilakukan oleh Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro di empat Kota di Jawa Tengah yang terdiri dari Semarang, Surakarta, Kebumen, dan Purbalingga ditemukan bahwa pelaksanaan program Bangun Praja Tahun pertama perlu adanya penyempurnaan pedoman umum komponen pemantauan dan evaluasi dari

masing masing aspek yaitu aspek institusi, aspek manajemen, aspek daya tanggap, dan aspek kondisi fisik.

Komponen aspek institusi yang dipantau dan dievaluasi pada pelaksanaan program Bangun Praja tahun pertama terdiri dari a) visi dan misi pembangunan daerah, b) kelembagaan, c) peraturan perundang-undangan, d) anggaran, dan e) sumber daya manusia. Karena komponen anggaran dan sumber daya manusia lebih kepada aspek manajemen maka aspek institusi seharusnya hanya mencakup : a) visi dan misi pembangunan daerah, b) kelembagaan, c) peraturan perundang-undangan.

Aspek manajemen berdasarkan buku pedoman umum evaluasi program Bangun Praja pada tahun pertama terdiri dari komponen a) perencanaan, b) pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, c) pengendalian pengelolaan lingkungan hidup, d) sarana dan prasarana, dan e) tingkat pelayanan. Komponen sarana dan prasarana dan tingkat pelayanan lebih tepat dimasukkan ke dalam komponen aspek daya tanggap pemerintah terhadap aspirasi masyarakat. Dengan demikian pemantauan dan evaluasi terhadap aspek manajemen terdiri dari: a) perencanaan, b) pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, c) pengelolaan pengendalian lingkungan hidup, d) anggaran, dan e) sumber daya manusia.

Aspek daya tanggap pemerintah daerah terhadap aspirasi masyarakat berdasarkan perubahan komponen pemantauan dan evaluasi pada aspek institusi dan manajemen maka aspek daya tanggap pemerintah daerah terhadap aspirasi masyarakat terdiri dari komponen a) unit kerja khusus yang menangani pengaduan masyarakat, b) mekanisme pengaduan, c) informasi lingkungan hidup, dan d) tingkat pelayanan.

Aspek fisik berdasarkan buku pedoman umum pemantauan dan evaluasi program Bangun Praja terdiri dari komponen: a) kawasan permukiman meliputi permukiman mewah, menengah, dan sederhana, b) sarana Kota mencakup pasar, kawasan komersial, kawasan perkantoran, kawasan pendidikan, terminal bis/angkot, stasiun kereta api, pelabuhan laut/sungai, bandara, hotel, dan rumah sakit, c) kawasan industri, d) Perairan terbuka meliputi sungai dan anak sungai, e) Sarana kebersihan meliputi alat angkut pengomposan dan TPA, f) Ruang terbuka hijau dan hutan Kota.

Karena dalam upaya pengendalian kualitas air diperlukan fasilitas fisik, seperti adanya IPAL, stasiun tetap pemantauan kualitas air, dan sumur pantau (*monitoring*

well), maka pada aspek kondisi fisik perlu ditambahkan komponen sarana atau fasilitas pendukung pengendalian kualitas air.

Dalam tata laksana pemantauan dan evaluasi program Bangun Praja pada buku pedoman umum terdapat 3 unsur pelaksana pemantauan yaitu : a) Tim Lapangan (TL), b) Dewan Evaluasi Kota (DEK), c) Dewan Pertimbangan Nasional (DPN).

a. Tim Lapangan (TL)

Dalam buku pedoman umum dijelaskan bahwa Tim Lapangan (TL) terdiri dari Staf Asisten Deputi II Kementerian Lingkungan Hidup yang ditetapkan dengan Keputusan Deputi Bidang Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kewilayahan. Tugas Tim Lapangan adalah mengumpulkan data dan informasi faktual yang berkenaan dengan aspek institusi, aspek manajemen, aspek daya tanggap Pemerintah Daerah, dan aspek kondisi fisik Kota untuk disampaikan kepada Dewan Evaluasi Kota sebagai bahan evaluasi lebih lanjut.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Lapangan Kementerian Lingkungan Hidup menurut Deputi II Bidang Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kewilayahan (2003) menyatakan bahwa pada tahap pertama dan tahap kedua pelaksanaan program Bangun Praja, pemantauan dan evaluasi masih dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup akan tetapi tidak ada penjelasan terinci mengenai lamanya tahap kedua pelaksanaan program akan dilaksanakan. Mengingat keterbatasan yang ada pada Tim Lapangan dari Kementerian Lingkungan karena harus mengevaluasi banyak Kota sebagai peserta kegiatan program Bangun Praja di seluruh Indonesia, maka perlu kiranya pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program Bangun Praja di Jawa Tengah diserahkan ke Dewan Evaluasi Kota (DEK). Dewan Evaluasi Kota Jawa Tengah sendiri telah terbentuk berdasarkan SK Gubernur No 93 tahun 2003.

b. Dewan Evaluasi Kota (DEK)

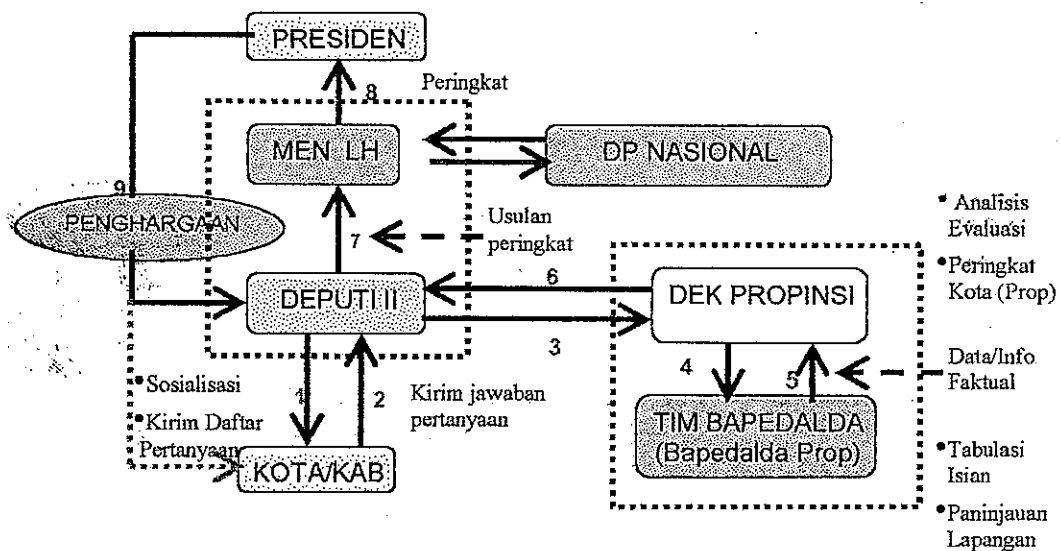
Dewan Evaluasi Kota meskipun sudah terbentuk berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah No 23 tahun 2003 Keberadaannya belum dirasakan oleh jajaran Pemerintah Kota Semarang karena belum menjalankan fungsi dan tugas sesuai kewenangan yang dimiliki. Hal ini disebabkan belum adanya alokasi dana dari Pemerintah Daerah sehingga menyebabkan Dewan Evaluasi Kota belum operasional.

Agar Dewan Evaluasi Kota bisa menjalankan tugasnya maka perlu kiranya Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dan wewenang untuk lebih meningkatkan keterpaduan Dinas/Instansi dalam pelaksanaan program Bangun Praja. Pemerintah Daerah hendaknya memberikan akses yang lebih luas kepada Dewan Evaluasi Kota dalam menyukseskan pelaksanaan program Bangun Praja melalui tata kerja yang disusun sendiri oleh Dewan Evaluasi Kota yang disinergikan dengan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota/kabupaten peserta program Bangun Praja.

c. Dewan Pertimbangan Nasional (DPN)

Dewan Pertimbangan Nasional ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup, yang bertugas memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup berkenaan dengan pelaksanaan Program Bangun Praja, termasuk dalam valuasi kinerja pengelola lingkungan perkotaan.

Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi



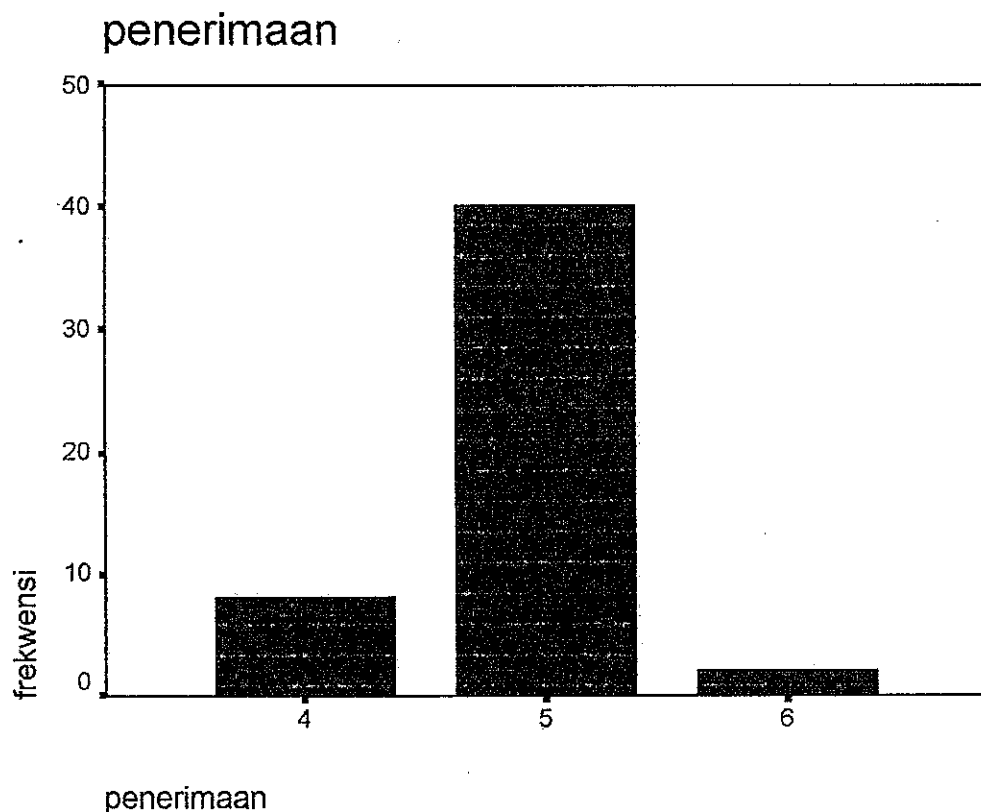
Sumber: Hadi 2003

Gambar 7. Mekanisme pemantauan program Bangun Praja

4.2.2. Penerimaan, pemahaman, keterlibatan, dan tindak lanjut di lapangan dari penggalan kuesioner pada jajaran pemerintah Kota Semarang terhadap pelaksanaan Program Bangun Praja

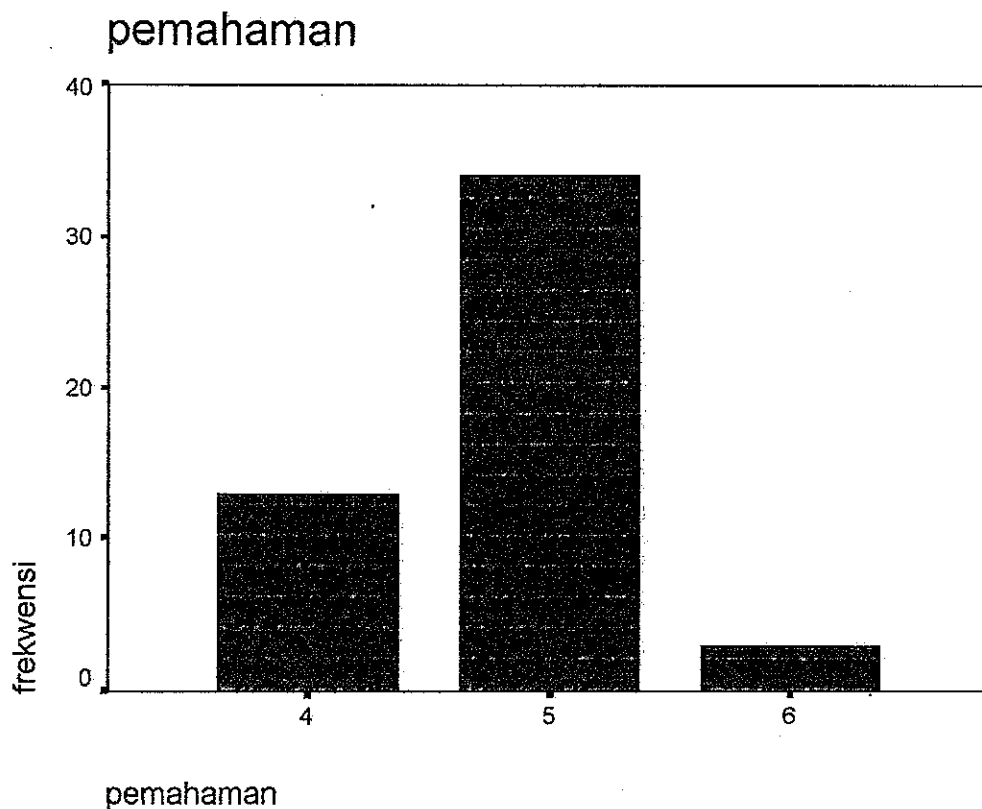
Kuisisioner penelitian yang di peroleh dari pengisian daftar pertanyaan oleh jajaran Pemerintah Kota Semarang yang terdiri dari Bapedalda, Bappeda, Dinas Pertamanan dan Permakaman, Dinas Kebersihan, Dinas Pasar, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum, dan Kantor infokom.

Dari hasil kuisisioner diketahui bahwa frekwensi jawaban menunjukkan kecenderungan skor yang tinggi terhadap variabel penerimaan (*acceptability*), pemahaman (*understanding*), keterlibatan (*involvement*), dan tindak lanjut di lapangan (*action*). Tingkat penerimaan, pemahaman, keterlibatan, dan tindakan dilapangan jajaran Pemerintah Semarang terhadap pelaksanaan program Bangun Praja adalah sebagai berikut :



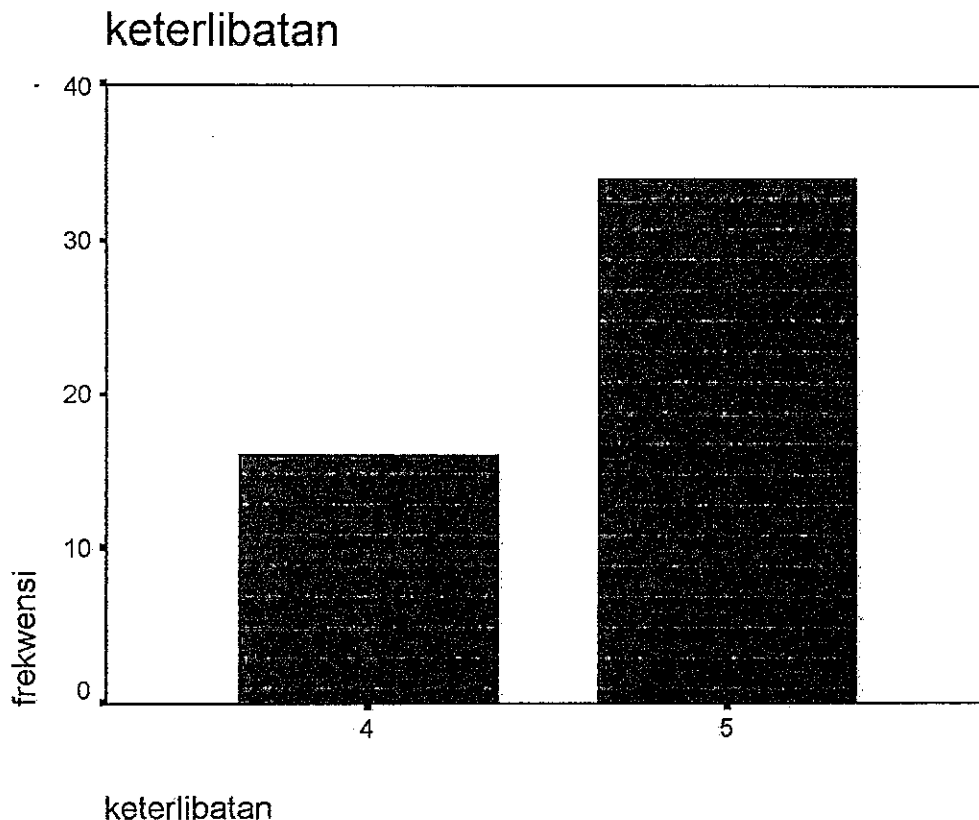
Gambar 8. Gambar frekwensi tingkat penerimaan jajaran Pemerintah Kota Semarang terhadap pelaksanaan program Bangun Praja

Dari jawaban 50 responden pada 10 Dinas/Instansi pada jajarannya Pemerintah Kota Semarang terhadap pertanyaan penerimaan jajarannya Pemerintah Kota Semarang dalam pelaksanaan program Bangun Praja menunjukkan tingkat penerimaan yang tinggi. Responden yang terdiri dari Bapedalda, Bappeda, Dinas Kebersihan, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Pertamanan, Dinas Pasar, dan Kantor Infokom memiliki keyakinan 80% bahwa tingkat penerimaan jajarannya Pemerintah Kota Semarang terhadap pelaksanaan program Bangun Praja tinggi (gambar 8). 4% dari responden memiliki keyakinan bahwa penerimaan jajarannya Pemerintah Kota Semarang terhadap pelaksanaan program Bangun Praja sangat tinggi, sisanya 16% masih belum yakin penerimaan jajarannya Pemerintah Kota Semarang terhadap pelaksanaan program Bangun Praja tinggi. Tidak ada responden yang meyakini jajarannya Pemerintah Kota Semarang menolak pelaksanaan program Bangun Praja.



Gambar 9. Grafik tingkat pemahaman jajarannya Pemerintah Kota Semarang terhadap pelaksanaan program Bangun Praja

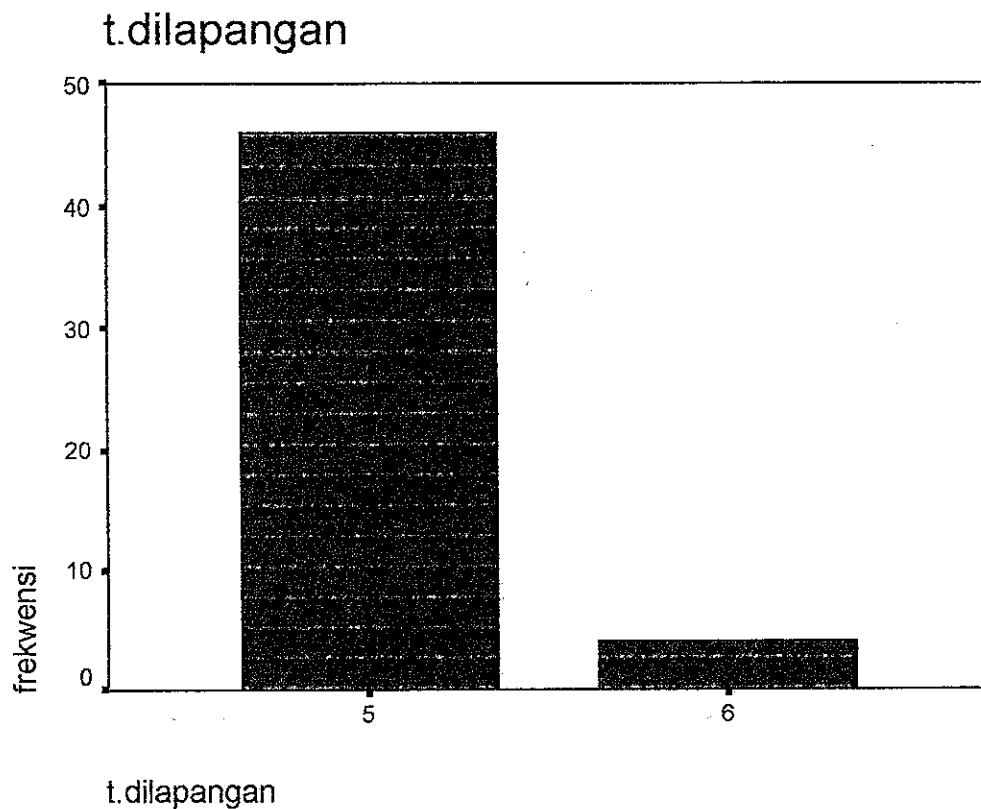
Berdasarkan jawaban responden terhadap pertanyaan tentang pemahaman jajaran pemerintah Kota Semarang dalam pelaksanaan program Bangun Praja menunjukkan keyakinan responden pemahaman jajaran Pemerintah Kota cukup tinggi. Secara persentasi terdapat 68% responden yang meyakini bahwa tingkat pemahaman jajaran Pemerintah Kota Semarang tinggi, 6% meyakini tingkat pemahaman sangat tinggi, 26% belum yakin bila tingkat pemahaman jajaran pemerintah Kota Semarang terhadap pelaksanaan program Bangun Praja tinggi (gambar 9).



Gambar 10. Grafik tingkat keterlibatan jajaran Pemerintah Kota Semarang terhadap pelaksanaan program Bangun Praja

Dari jawaban responden tentang keterlibatan jajaran Pemerintah Kota Semarang dalam pelaksanaan program Bangun Praja menunjukkan adanya

keterlibatann yang diyakini responden cukup tinggi. Responden memiliki keyakinan 68% bahwa keterlibatan jajaran Pemerintah Kota tinggi, dan 32% belum sepenuhnya yakin bila keterlibatan jajaran Pemerintah Kota dalam pelaksanaan program Bangun Praja tinggi.



Gambar 11. Grafik frekwensi tingkat tindakan di lapangan jajaran Pemerintah Kota Semarang terhadap pelaksanaan program Bangun Praja

Dari jawaban responden tentang pertanyaan tindakan di lapangan yang dilakukan jajaran Pemerintah Kota dalam pelaksanaan program Bangun Praja menunjukkan keyakinan responden tindakan di lapangan jajaran Pemerintah Kota tinggi. Responden 92% meyakini bahwa tindakan di lapangan yang dilakukan jajaran pemerintah Kota tinggi, sisanya 8% meyakini tindakan dilapangan jajaran Pemerintah Kota Semarang dalam menyukseskan pelaksanaan program Bangun Praja sangat tinggi. Keyakinan responden tersebut lebih kepada keinginan ideal dari para

responden dan belum pada tatanan operasional dilapangan. Hal ini terungkap dari pada hasil wawancara.

4.2.3. Penerimaan, pemahaman, keterlibatan, dan tindak lanjut di lapangan jajaran dari hasil kuisisioner pada masing-masing Dinas/Instansi

Untuk lebih memahami tingkat penerimaan, pemahaman, keterlibatan, dan tindakan dilapangan dari masing-masing Dinas/Instansi dalam jajaran Pemerintah Kota Semarang yang terdiri dari: Bapedalda, Bappeda, Dinas Pertamanan dan Permakaman, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Pasar, Dinas Kebersihan, Dinas Pariwisata, dan Kantor Infokom yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.2.3.1. Tingkat penerimaan, pemahaman, keterlibatan, dan tindakan dilapangan yang dilakukan Bapedalda Kota dalam pelaksanaan program Bangun Praja

Tingkat penerimaan Bapedalda Kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja berdasarkan hasil kuisisioner menunjukkan tingkat penerimaan Bapedalda tinggi. 80% responden meyakini penerimaan Bapedalda terhadap pelaksanaan program Bangun Praja tinggi, bahkan 20% dari jawaban responden memiliki keyakinan sangat tinggi terhadap penerimaan Bapedalda Kota dalam pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang (lampiran 7). Tidak ada responden yang meyakini bila Bapedalda menolak pelaksanaan program Bangun Praja.

Tingkat pemahaman Bapedalda Kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja berdasarkan hasil kuisisioner menunjukkan keyakinan responden bahwa pemahaman Bapedalda Kota Semarang tinggi. Terdapat 40 % responden yang menyatakan tinggi dan 40% lagi meyakini bahwa pemahaman Bapedalda Kota dalam pelaksanaan program Bangun Praja sangat tinggi. Sedangkan responden yang belum yakin tingkat pemahaman Bapedalda terhadap pelaksanaan program Bangun Praja tinggi hanya 20%. Tidak terdapat responden yang meyakini tingkat pemahaman Bapedalda rendah atau tidak paham terhadap pelaksanaan program Bangun Praja.

Tingkat keterlibatan Bapedalda Kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja berdasarkan hasil kuisisioner menunjukkan tingkat keyakinan responden bahwa keterlibatan Bapedalda Kota Semarang tinggi. Sebanyak 80% responden meyakini

keterlibatan Bapedalda tinggi, 20% menunjukkan jawaban yang belum meyakini bila keterlibatan Bapedalda Kota Semarang tinggi dalam pelaksanaan program Bangun Praja (lampiran 7). Tidak terdapat responden yang meyakini bila Bapedalda Kota tidak terlibat dalam pelaksanaan program Bangun Praja. Hal ini berkaitan dengan peran Bapedalda Kota sebagai *leading sector* dalam pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang.

Tingkat tindakan dilapangan yang dilakukan Bapedalda Kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja berdasarkan hasil kuisisioner menunjukkan keyakinan responden bahwa tindakan di lapangan yang dilakukan Bapedalda Kota tinggi. 80% responden meyakini tindakan dilapangan yang dilakukan Bapedalda Kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja tinggi, dan 20% dari responden meyakini tindakan dilapangan Bapedalda Kota terhadap program Bangun Praja sangat tinggi (lampiran 7). Tidak ada responden yang meyakini bila tindakan di lapangan yang dilakukan Bapedalda Kota terhadap program Bangun Praja tidak ada atau rendah.

4.2.3.2. Tingkat penerimaan, pemahaman, keterlibatan, dan tindakan dilapangan yang dilakukan Bappeda Kota dalam pelaksanaan program Bangun Praja

Tingkat penerimaan Bappeda Kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja berdasarkan hasil kuisisioner menunjukkan keyakinan responden bahwa penerimaan Bappeda tinggi. 80 responden meyakini penerimaan Bappeda tinggi, sisanya sebesar 20% belum yakin kalau penerimaan Bappeda Kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang tinggi. Tidak terdapat responden yang memberikan jawaban bila penerimaan Bappeda terhadap pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang rendah.

Tingkat pemahaman Bappeda Kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja berdasarkan hasil kuisisioner menunjukkan keyakinan responden bahwa pemahaman Bappeda tinggi. Pemahaman tersebut sama dengan penerimaan Bappeda Kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja dimana 80% responden meyakini pemahaman Bappeda terhadap pelaksanaan program Bangun Praja tinggi, dan bahkan 20% meyakini sangat tinggi (lampiran 9). Tidak terdapat responden yang

memberikan jawaban bila pemahaman Bappeda Kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang rendah.

Tingkat keterlibatan Bappeda Kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja berdasarkan hasil kusioner menunjukkan keyakinan 100% dari responden bahwa keterlibatan Bappeda Kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja tinggi (lampiran 9).

Tingkat tindakan dilapangan yang dilakukan Bappeda Kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja berdasarkan hasil kusioner menunjukkan keyakinan 100% dari responden bahwa tindakan di lapangan yang dilakukan Bappeda terhadap pelaksanaan program Bangun Praja tinggi (lampiran 9).

4.2.3.3. Tingkat penerimaan, pemahaman, keterlibatan, dan tindakan dilapangan yang dilakukan Dinas Pertamanan dan Permakaman Kota dalam pelaksanaan program Bangun Praja

Tingkat penerimaan Dinas Pertamanan dan Permakaman Kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja berdasarkan hasil kusioner menunjukkan keyakinan 100% dari responden bahwa penerimaan Dinas Pertamanan dan Permakaman dalam pelaksanaan program Bangun Praja tinggi (lampiran 11).

Tingkat pemahaman Dinas Pertamanan dan Permakaman Kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja berdasarkan hasil kusioner menunjukkan tingkat pemahaman yang cukup tinggi. Jawaban responden yang meyakini pemahaman Dinas Pertamanan dan permakaman tinggi sebesar 60%, sedangkan jawaban responden yang belum yakin bahwa pemahaman Dinas Pertamanan dan Permakaman tinggi adalah sebesar 40% (lampiran 11).

Tingkat keterlibatan Dinas Pertamanan dan Permakaman Kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja berdasarkan hasil kusioner menunjukkan keyakinan 100% dari responden bahwa keterlibatan Dinas Pertamanan dan Permakaman dalam pelaksanaan program Bangun Praja tinggi (lampiran 11).

Tingkat tindakan dilapangan yang dilakukan Dinas Pertamanan dan Permakaman Kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja berdasarkan hasil kusioner menunjukkan keyakinan 100% dari responden bahwa keterlibatan Dinas Pertamanan dan Permakaman dalam pelaksanaan program Bangun Praja tinggi (lampiran 11).

4.2.3.4. Tingkat penerimaan, pemahaman, keterlibatan, dan tindakan dilapangan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Kota dalam pelaksanaan program Bangun Praja

Tingkat penerimaan Dinas Pekerjaan Umum terhadap pelaksanaan program Bangun Praja berdasarkan hasil kuisioner menunjukkan keyakinan 100% dari responden bahwa keterlibatan Dinas Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan program Bangun Praja tinggi (lampiran 13).

Tingkat pemahaman Dinas Pekerjaan Umum terhadap pelaksanaan program Bangun Praja berdasarkan hasil kuisioner menunjukkan keyakinan 100% dari responden bahwa pemahaman Dinas Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan program Bangun Praja tinggi (lampiran 13).

Tingkat keterlibatan Dinas Pekerjaan Umum terhadap pelaksanaan program Bangun Praja berdasarkan hasil kuisioner menunjukkan keyakinan responden bahwa keterlibatan Dinas Pekerjaan Umum cukup tinggi. 60% responden meyakini keterlibatan Dinas Pekerjaan Umum tinggi, sedangkan responden yang belum yakin bahwa pemahaman Dinas Pekerjaan Umum tinggi adalah sebesar 40% (lampiran 13).

Tingkat tindakan di lapangan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum terhadap pelaksanaan program Bangun Praja berdasarkan hasil kuisioner menunjukkan keyakinan 100% dari responden bahwa tindakan di lapangan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan program Bangun Praja tinggi (lampiran 13).

4.2.3.5. Tingkat penerimaan, pemahaman, keterlibatan, dan tindakan dilapangan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota dalam pelaksanaan program Bangun Praja

Tingkat penerimaan Dinas Perhubungan kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja berdasarkan hasil kuisioner menunjukkan keyakinan responden bahwa penerimaan Dinas perhubungan cukup tinggi. 60% responden meyakini penerimaan Dinas Perhubungan tinggi, sedangkan jawaban responden yang belum yakin bahwa penerimaan Dinas Perhubungan tinggi adalah sebesar 40% (lampiran 15).

Tingkat pemahaman Dinas Perhubungan kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja berdasarkan hasil kuisioner menunjukkan keyakinan responden bahwa pemahaman Dinas Perhubungan cukup tinggi. 60% responden belum yakin

pemahaman Dinas perhubungan tinggi, dan 40% responden meyakini bahwa pemahaman Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang tinggi (lampiran 15).

Tingkat keterlibatan Dinas Perhubungan kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja berdasarkan hasil kuisisioner menunjukkan keyakinan responden bahwa keterlibatan Dinas Perhubungan belum cukup tinggi. 80% responden belum yakin bahwa keterlibatan Dinas perhubungan tinggi, dan 20% responden meyakini bahwa keterlibatan Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang tinggi (lampiran 15).

Tingkat tindakan di lapangan yang dilakukan Dinas Perhubungan kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja berdasarkan hasil kuisisioner menunjukkan keyakinan responden bahwa tindakan dilapangan yang dilakukan Dinas Perhubungan tinggi. 80% responden meyakini bahwa keterlibatan Dinas perhubungan tinggi, dan 20% responden meyakini bahwa keterlibatan Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang sangat tinggi (lampiran 15).

4.2.3.6. Tingkat penerimaan, pemahaman, keterlibatan, dan tindakan dilapangan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota dalam pelaksanaan program Bangun Praja

Tingkat penerimaan Dinas Kesehatan Kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja berdasarkan hasil kuisisioner menunjukkan keyakinan responden bahwa penerimaan Dinas Kesehatan Kota tinggi. 80% responden meyakini penerimaan Dinas Kesehatan tinggi, dan 20% belum yakin bahwa penerimaan Dinas Kesehatan Kota dalam pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang tinggi (lampiran 17).

Tingkat pemahaman Dinas Kesehatan Kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja berdasarkan hasil kuisisioner menunjukkan keyakinan responden bahwa pemahaman Dinas Kesehatan tinggi. 80% responden meyakini pemahaman Dinas Kesehatan tinggi, dan 20% belum yakin bahwa penerimaan Dinas Kesehatan Kota dalam pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang tinggi (lampiran 17).

Tingkat keterlibatan Dinas Kesehatan Kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja berdasarkan hasil kuisisioner menunjukkan keyakinan responden bahwa

keterlibatan Dinas Kesehatan belum cukup tinggi. 80% responden belum yakin keterlibatan dinas Kesehatan tinggi, 20% responden meyakini keterlibatan Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang tinggi (lampiran 17).

Tingkat tindakan di lapangan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja berdasarkan hasil kuisisioner menunjukkan keyakinan penuh (100%) dari responden bahwa tindakan di lapangan yang dilakukan Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan program Bangun Praja tinggi (lampiran 17).

4.2.3.7. Tingkat penerimaan, pemahaman, keterlibatan, dan tindakan dilapangan yang dilakukan Dinas Pasar Kota dalam pelaksanaan program Bangun Praja

Tingkat penerimaan Dinas Pasar Kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja berdasarkan hasil kuisisioner menunjukkan keyakinan responden bahwa penerimaan Dinas Pasar tinggi. 80% responden meyakini penerimaan Dinas Pasar tinggi, dan 20% responden belum yakin penerimaan Dinas Pasar terhadap pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang tinggi (lampiran 19).

Tingkat pemahaman Dinas Pasar Kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja berdasarkan hasil kuisisioner menunjukkan keyakinan responden bahwa pemahaman Dinas Pasar tinggi. 60% responden meyakini penerimaan Dinas Pasar tinggi, 20% responden meyakini penerimaan Dinas Pasar sangat tinggi, dan 20% responden belum yakin bahwa pemahaman Dinas Pasar terhadap pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang tinggi (lampiran 19).

Tingkat keterlibatan Dinas Pasar Kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja berdasarkan hasil kuisisioner menunjukkan keyakinan responden bahwa keterlibatan Dinas Pasar cukup tinggi. 60% responden meyakini keterlibatan Dinas Pasar tinggi, dan 40% responden belum meyakini bahwa keterlibatan Dinas Pasar dalam pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang tinggi (lampiran 19).

Tingkat tindakan di lapangan yang dilakukan Dinas Pasar Kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja berdasarkan hasil kuisisioner menunjukkan

keyakinan penuh (100%) responden bahwa keterlibatan Dinas Pasar tinggi (lampiran 19).

4.2.3.8. Tingkat penerimaan, pemahaman, keterlibatan, dan tindakan dilapangan yang dilakukan Dinas Kebersihan Kota dalam pelaksanaan program Bangun Praja

Tingkat penerimaan Dinas Kebersihan Kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja berdasarkan hasil kuisisioner menunjukkan keyakinan penuh (100%) responden bahwa penerimaan Dinas Kebersihan Kota tinggi (lampiran 21).

Tingkat pemahaman Dinas Kebersihan Kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja berdasarkan hasil kuisisioner menunjukkan keyakinan responden bahwa pemahaman Dinas Kebersihan tinggi. Responden 80% meyakini pemahaman Dinas kebersihan tinggi, 20% responden belum yakin bahwa pemahaman Dinas Kebersihan Kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang tinggi (lampiran 21).

Tingkat keterlibatan Dinas Kebersihan Kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja berdasarkan hasil kuisisioner menunjukkan keyakinan penuh (100%) responden bahwa keterlibatan Dinas Kebersihan Kota dalam pelaksanaan program Bangun pra ja di Kota Semarang tinggi (lampiran 21).

Tingkat tindakan di lapangan yang dilakukan Dinas Kebersihan Kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja berdasarkan hasil kuisisioner menunjukkan keyakinan responden bahwa tindakan di lapangan yang dilakukan Dinas Kebersihan tinggi. Responden 80% meyakini tindakan di lapangan yang dilakukan Dinas kebersihan tinggi, 20% responden meyakini tindakan di lapangan yang dilakukan Dinas Kebersihan terhadap pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang sangat tinggi (lampiran 21).

4.2.3.9. Tingkat penerimaan, pemahaman, keterlibatan, dan tindakan dilapangan yang dilakukan Dinas Pariwisata Kota dalam pelaksanaan program Bangun Praja

Tingkat penerimaan Dinas Pariwisata Kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja berdasarkan hasil kuisisioner menunjukkan keyakinan responden bahwa

penerimaan Dinas pariwisata Kota tinggi. 60% responden meyakini penerimaan Dinas Pariwisata tinggi, 20% responden meyakini penerimaan Dinas Pariwisata sangat tinggi, dan 20% responden belum yakin bahwa penerimaan Dinas pariwisata terhadap pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang tinggi (lampiran 23).

Tingkat pemahaman Dinas Pariwisata Kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja berdasarkan hasil kuisisioner menunjukkan keyakinan responden bahwa pemahaman Dinas Pariwisata Kota tinggi. 80% responden meyakini pemahaman Dinas Pariwisata tinggi, dan 20% responden belum yakin bahwa penerimaan Dinas pariwisata terhadap pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang tinggi (lampiran 23).

Tingkat keterlibatan Dinas Pariwisata Kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja berdasarkan hasil kuisisioner menunjukkan keyakinan responden bahwa keterlibatan Dinas pariwisata Kota tidak cukup tinggi. 60% responden belum yakin penerimaan Dinas Pariwisata tinggi, dan hanya 40% responden yang meyakini bahwa keterlibatan Dinas pariwisata Kota dalam pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang tinggi (lampiran 23).

Tingkat tindakan di lapangan yang dilakukan Dinas Pariwisata Kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja berdasarkan hasil kuisisioner menunjukkan keyakinan responden bahwa keterlibatan Dinas Pariwisata Kota tinggi. 80% responden meyakini penerimaan Dinas Pariwisata tinggi, dan 20% responden meyakini bahwa penerimaan Dinas pariwisata terhadap pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang sangat tinggi (lampiran 23).

4.2.3.10. Tingkat penerimaan, pemahaman, keterlibatan, dan tindakan dilapangan yang dilakukan Kantor Infokom Kota dalam pelaksanaan program Bangun Praja

Tingkat penerimaan Kantor Infokom Kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja berdasarkan hasil kuisisioner menunjukkan keyakinan responden bahwa penerimaan Infokom Kota tinggi. 80% responden meyakini penerimaan Kantor Infokom Kota tinggi, dan 20% responden belum yakin bahwa penerimaan Kantor Infokom Kota dalam pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang tinggi (lampiran 25).

Tingkat pemahaman Kantor Infokom Kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja berdasarkan hasil kuisisioner menunjukkan keyakinan responden bahwa pemahaman Kantor Infokom Kota cukup tinggi. 60% responden meyakini pemahaman Kantor Infokom Kota tinggi, 20% responden meyakini pemahaman Kantor Infokom Kota sangat tinggi, dan 20% responden belum yakin bahwa pemahaman Kantor Infokom Kota dalam pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang tinggi (lampiran 25).

Tingkat keterlibatan Kantor Infokom Kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja berdasarkan hasil kuisisioner menunjukkan keyakinan responden bahwa keterlibatan Kantor Infokom Kota cukup tinggi. 60 responden meyakini keterlibatan Kantor Infokom Kota tinggi, dan 40% responden belum yakin bahwa keterlibatan Kantor Infokom Kota dalam pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang tinggi (lampiran 25).

Tingkat tindakan di lapangan yang dilakukan Kantor Infokom Kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja berdasarkan hasil kuisisioner menunjukkan keyakinan penuh (100%) responden bahwa tindakan di lapangan yang dilakukan Kantor infokom Kota dalam pelaksanaan program Bangun praja di Kota Semarang tinggi (lampiran 25).

4.2.3. Kondisi pelaksanaan program Bangun Praja pada jajaran Pemerintah Kota Semarang

Hasil wawancara yang dilakukan dari masing-masing Dinas yang menjadi sampel akan diuraikan substansinya untuk menjelaskan variabel penerimaan (*acceptability*), pemahaman (*understanding*), keterlibatan (*involvement*), dan tindak lanjut kegiatan di lapangan (*action*) secara lebih mendalam.

4.2.3.1. Penerimaan (*acceptability*) masing-masing Dinas/Instansi dari penggalian wawancara jajaran Pemerintah Kota Semarang terhadap program Bangun Praja

4.2.3.1.1. Penerimaan (*acceptability*) Bapedalda Kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang

Program Bangun Praja diterima sangat antusias oleh Bapedalda Kota dan diharapkan dapat menjadi momen perbaikan kualitas lingkungan Kota. Program

Bangun Praja di Kota Semarang merupakan program strategis yang pada awalnya kurang mendapatkan dukungan dari pimpinan Daerah. Dasar kepesertaan Kota Semarang dalam program Bangun Praja adalah Surat edaran dari KLH tentang program Bangun Praja. Pada perkembangan selanjutnya kepesertaan Kota Semarang sebagai peserta program Bangun Praja mendapatkan perhatian dari pimpinan daerah dengan dikeluarkannya SK Walikota Semarang No : 660.2.05/132 tentang pembentukan tim pelaksana program Bangun Praja Kota Semarang dan SK Walikota Semarang No : 660./05/049 tentang pembentukan tim teknis program Bangun Praja Kota Semarang.

Pelaksanaan program Bangun Praja walaupun dalam pelaksanaannya banyak menghadapi kendala intern seperti mutasi pegawai dalam lingkungan Bapedalda namun akan selalu diupayakan efektifitas pelaksanaannya. Untuk meningkatkan peran serta dari semua pihak butuh alokasi dana dan pembagian kerja yang jelas dalam program Bangun Praja sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Dinas instansi terkait.

Pemberian penghargaan menjadi penting baik terhadap perorangan maupun Kota secara keseluruhan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan pemerintah untuk perbaikan fungsi lingkungan. Sebaiknya penghargaan yang diberikan terhadap Kota peserta Bangun Praja diupayakan dalam bentuk program yang akan menunjang keberhasilan program Bangun Praja seperti prokasih dimasa lalu. Sebelum program Bangun Praja Kota Semarang juga pernah mendapatkan piala Adipura Kencana periode 1990-1997 dengan ujung tombak program Kebersihan Keindahan dan Ketertiban (KKK) yang ada pada setiap Kelurahan yang terbukti efektif.

4.2.3.1.2.. *Penerimaan (acceptability) Bappeda Kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang*

Dilihat dari tujuan pelaksanaan program Bangun Praja adalah sangat diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan khususnya bagi Bappeda Kota sangat menunjang bagi penyusunan perencanaan pembangunan yang lebih memperhatikan kualitas lingkungan.

Sesuai dengan peranan Bappeda Kota Semarang sebagai Badan perencanaan Pembangunan Daerah yang membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah menilai bahwa pelaksanaan Program Bangun Praja belum terlaksana sesuai harapan. Sosialisasi program Bangun Praja belum optimal dan perlu ditingkatkan.

Birokrasi pada jajaran Pemerintah Kota Semarang belum memahami mekanisme evaluasi dan indikator penilaian dalam program Bangun Praja. Walaupun secara

substansi pembangunan berwawasan lingkungan sangat diharapkan dapat terlaksana di Kota Semarang.

Untuk lebih memperbaiki pelaksanaan program Bangun Praja harus ada koordinasi rutin, perlu adanya kebijakan penambahan anggaran operasional, dan diperlukan adanya petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari KLH untuk lebih menjamin konsistensi pelaksanaan di lapangan.

4.2.3.1.3. *Penerimaan (acceptability) Dinas Pertamanan dan Pemakaman Bapedalda Kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang*

Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Semarang sangat mengharapkan pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang dapat berjalan dengan baik. Sebagai Dinas yang berhubungan langsung dengan aspek pelaksanaan program Bangun Praja maka program yang ada pada Dinas Pertamanan akan terbantu dengan keikutsertaan Kota Semarang dalam program Bangun Praja.

Secara kebijakan hendaknya program Bangun Praja mendapat dukungan dari pengambil Keputusan dalam lingkungan Pemerintah Kota. Penegakan hukum juga perlu ditingkatkan agar tercipta kedisiplinan bersama warga Kota.

4.2.3.1.4. *Penerimaan (acceptability) Dinas Pekerjaan Umum Kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang*

Program Bangun Praja di Kota Semarang belum bisa dipahami substansinya karena belum ada kejelasan tentang pelaksanaan di lapangan dan jadwal kerja program Bangun Praja. Sosialisasi dan Koordinasi pelaksanaan program Bangun Praja juga belum optimal sehingga timbul pemahaman yang berbeda terhadap program Bangun Praja dalam masing-masing bidang dalam intern Dinas.

Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang memandang bahwa dukungan pimpinan Daerah masih rendah terhadap pelaksanaan Program Bangun Praja. Permasalahan lingkungan harus lintas sektor dan didukung komitmen pimpinan daerah yang kuat. Masalah utama yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang adalah : banjir, genangan lokal, banjir kiriman, dan rob yang menuntut adanya perbaikan teknis drainase dan infrastruktur lain.

Sehubungan dengan program Bangun Praja yang perlu dipertegas adalah independensi dari program Bangun Praja sendiri dengan memberikan kewenangan

lebih pada lembaga non struktural seperti Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DPPK), LSM, Perguruan Tinggi, dan Dewan Evaluasi Kota (DEK).

4.2.3.1.5. *Penerimaan (acceptability) Dinas Perhubungan Kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang*

Belum dipahami keterkaitan langsung pelaksanaan program Bangun Praja dengan lingkup kerja Dinas Perhubungan Kota Semarang. Pelaksanaan Program Bangun Praja akan sangat sangat efektif bila didukung oleh keterlibatan masyarakat. Pemerintah dalam hal ini diharapkan dapat mengakomodasi keterlibatan masyarakat tersebut secara proporsional dan dapat berfungsi sebagai katalisator sekaligus fasilitator pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan.

Peningkatan kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan dengan memberikan penghargaan (*reward*) kepada elemen masyarakat yang berjasa dan pemberian sanksi (*punishment*) kepada pelanggar peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Harus ada upaya komprehensif untuk menciptakan lingkungan Kota yang baik. Perbaikan fisik infrastruktur kota harus disertai peningkatan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan yang ada, dengan kata lain ada sinergi antara aspek fisik dan non fisik.

4.2.3.1.6. *Penerimaan (acceptability) Dinas Kesehatan Kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang*

Sebagai tim teknis dalam program Bangun Praja Dinas Kesehatan Kota pelaksanaan program Bangun Praja bisa lebih ditingkatkan kinerjanya. Suatu program untuk pelestarian fungsi lingkungan bagaimanapun harus aplikatif dan mudah dimengerti. Program Bangun Praja sendiri masih pada tatanan wacana dan belum operasional.

4.2.3.1.7. *Penerimaan (acceptability) Dinas Pasar Kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang*

Pelaksanaan program Bangun Praja belum dipahami dengan baik tentang mekanisme dan indikator penilaian. Penerimaan Dinas Pasar tentang program Bangun Praja yang dilaksanakan di Kota Semarang cukup baik. Hanya saja Dinas pasar belum bisa bisa membedakan antara program Bangun Praja dengan Adipura.

4.2.3.1.8. *Penerimaan (acceptability) Dinas Kebersihan Kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang*

Program Bangun Praja sangat diperlukan dalam menciptakan Kota Semarang yang lebih bersih dan Indah. Dimasa yang lalu Kota Semarang cukup baik di bidang kebersihan karena adanya komitmen dari pimpinan Kota. Pelaksanaan Bangun Praja sendiri belum bisa maksimal bila dukungan pimpinan Daerah rendah.

Penurunan kinerja dinas Kebersihan dibanding periode sebelumnya dimana Kota Semarang pernah mendapatkan penghargaan Adipura kencana dibidang kebersihan banyak disebabkan oleh kebijakan diluar kewenangan Dinas Kebersihan sendiri. Program Bangun Praja tanpa dukungan dana dan peran seluruh *stakeholder* akan sulit mencapai tujuan yang ingin dicapai.

4.2.3.1.9. *Penerimaan (acceptability) Dinas Pariwisata Kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang*

Program Bangun Praja belum terkoordinasi dengan baik sebagaimana program Adipura dimasa lalu. Perkembangan di Kota Semarang di masa reformasi dimana masyarakat merasa ada kebebasan justru berdampak pada penurunan ketertiban dan ketaatan masyarakat terhadap lingkungan. Muncul kesemrawutan dijalur-jalur pedestrian, berkembangnya pedagang kaki lima yang menurunkan keindahan kota ditambah masalah sampah yang makin sulit diatasi.

4.2.3.1.10. *Penerimaan (acceptability) Kantor Infokom Kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang*

Kantor infokom sebagai Kantor yang bertugas dalam penyampaian informasi pembangunan belum bisa memahami pelaksanaan program Bangun Praja, sehingga penyampaian informasi ke masyarakat tidak terlaksana. Sebagai bagian dari jajaran Pemerintah Kota Semarang Kantor Infokom mengharapkan agar bisa diberikan petunjuk mengenai mekanisme prosedur pelaksanaan dan tujuan pelaksanaan program Bangun Praja agar bisa di Informasikan secara luas kepada seluruh masyarakat. Seringkali pelaksanaan suatu program menemui banyak kendala karena sosialisasi yang masih belum maksimal.

4.2.3.2. Pemahaman (*understanding*) masing-masing Dinas/Instansi dari penggalan wawancara jajaran Pemerintah Kota Semarang terhadap program Bangun Praja

4.2.3.2.1. Pemahaman (*understanding*) Bapedalda Kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang

Lingkungan seringkali kurang mendapatkan perhatian yang proporsional dalam pembangunan sehingga dibutuhkan suatu pengelolaan yang serius oleh masing-masing daerah. Untuk menciptakan tata pemerintahan yang memperhatikan lingkungan harus disertai peran aktif segenap lapisan masyarakat dan *stakeholder* pada tiap level pengambil keputusan.

Kelebihan Program Bangun dibanding program Adipura adalah penekanan kepada mewujudkan tata pemerintahan yang lebih baik untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Untuk keberhasilan program ini mesti ada komitmen pimpinan daerah yang tinggi disertai dengan kualitas sumber daya manusia jajaran Pemerintah Kota Semarang dengan dukungan dari segenap elemen masyarakat : pers, dunia usaha, perguruan tinggi, LSM, dan peran tokoh masyarakat baik informal maupun formal.

4.2.3.2.2.. Pemahaman (*understanding*) Bappedda Kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang

Bagi Bappedda Kota pelaksanaan program Bangun Praja harus menjadi satu kesatuan utuh dengan perencanaan pembangunan Kota. Pemahaman substansi pelaksanaan program Bangun Praja belum bisa dipahami secara utuh karena dinilai sebagai suatu program yang lebih menjadi tugas Bapedalda Kota.

Untuk lebih memperbaiki pelaksanaan program Bangun Praja harus ada koordinasi rutin, perlu adanya kebijakan penambahan anggaran operasional, dan diperlukan adanya petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari KLH untuk lebih menjamin konsistensi pelaksanaan di lapangan.

4.2.3.2.3. Pemahaman (*understanding*) Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang

Pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang belum optimal dalam hal sosialisasi dan koordinasi. Hal ini diindikasikan bila ada pelanggaran terhadap

kebijakan lingkungan tidak ditindaklanjuti sehingga hanya menjadi laporan diatas kertas saja belum ada tindakan nyata.

Program Bangun Praja juga diharapkan akan mendapatkan dukungan dari *stakeholder* dan diharapkan akan mampu menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat secara lebih luas.

4.2.3.2.4. *Pemahaman (understanding) Dinas Pekerjaan Umum Kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang*

Program Bangun Praja di Kota Semarang belum bisa dipahami substansinya karena belum ada kejelasan tentang pelaksanaan di lapangan dan *schedule* kerja program Bangun Praja. Sosialisasi dan Koordinasi pelaksanaan program Bangun Praja juga belum optimal sehingga timbul pemahaman yang berbeda terhadap program Bangun Praja dalam masing-masing Dinas/Instansi.

Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang memandang bahwa dukungan pimpinan Daerah masih rendah terhadap pelaksanaan Program Bangun Praja. Permasalahan lingkungan harus lintas sektor dan didukung komitmen pimpinan daerah yang kuat. Masalah utama yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang adalah : banjir, genangan lokal, banjir kiriman, dan rob yang menuntut adanya perbaikan teknis draenase dan infrastruktur lain. Hal yang mesti dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang adalah melibatkan peran serta masyarakat, regulasi perda, mengaktifkan jalur lintas Kota terkait DAS, dan disertai oleh dukungan pemerintah pusat. Alokasi penanggulangan banjir sebenarnya visi dan misi pimpinan Daerah sangat rendah, masih terlalu banyak komitmen yang dilanggar. Kebijakan yang ada hanya mementingkan kepentingan pribadi yang cenderung memikirkan dunia usaha.

Sehubungan dengan program Bangun Praja yang perlu dipertegas adalah independensi dari program Bangun Praja sendiri dengan memberikan kewenangan lebih pada lembaga non struktural seperti Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DPPK), LSM, Perguruan Tinggi, dan Dewan Evaluasi Kota (DEK).

4.2.3.2.5. *Pemahaman (understanding) Dinas Perhubungan Kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang*

Belum dipahami keterkaitan langsung pelaksanaan program Bangun Praja dengan lingkup kerja Dinas Perhubungan Kota Semarang. Pelaksanaan Program Bangun Praja akan sangat sangat efektif bila didukung oleh keterlibatan masyarakat.

Pemerintah dalam hal ini diharapkan dapat mengakomodasi keterlibatan masyarakat tersebut secara proporsional dan dapat berfungsi sebagai katalisator sekaligus fasilitator pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan.

Peningkatan kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan dengan memberikan penghargaan (*reward*) kepada elemen masyarakat yang berjasa dan pemberian sanksi (*punishment*) kepada pelanggar peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Harus ada upaya komprehensif untuk menciptakan lingkungan Kota yang baik. Perbaikan fisik infrastruktur kota harus disertai peningkatan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan yang ada, dengan kata lain ada sinergi antara aspek fisik dan non fisik.

4.2.3.2.6. Pemahaman (*understanding*) Dinas Kesehatan Kota Kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang

Sebagai tim teknis dalam program Bangun Praja titik berat dinas Kesehatan dalam Program Bangun Praja adalah pada pusat layanan publik seperti Rumah Sakit, Puskesmas, dan sanitasi lingkungan pemukiman. Pelaksanaan program Bangun Praja perlu adanya pedoman acuan yang jelas bagi pelaksanaan di lapangan. Diperlukan adanya koordinasi rutin dan post anggaran khusus bagi pelaksanaan program Bangun Praja. Kebijakan Pimpinan Daerah belum mencerminkan keinginan yang kuat dalam menyukseskan program Bangun Praja dengan dinyatakan bahwa program Bangun Praja melekat pada masing-masing Dinas sesuai program yang telah ditetapkan.

4.2.3.2.7. Pemahaman (*understanding*) Dinas Pasar Kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang

Dalam pelaksanaannya program Bangun di Kota Semarang belum terkoordinasi dengan baik. Pengelolaan fasilitas umum khususnya pasar di Kota Semarang perlu komitmen dari pimpinan Daerah dan dukungan partisipasi masyarakat secara luas dalam pemeliharaan untuk kenyamanan fasilitas umum tersebut.

Harapan Dinas Pasar terhadap Program Bangun Praja adanya peran para stakeholder dan para pengguna keberadaan pasar agar ada rasa memiliki dan kesadaran untuk memelihara fasilitas yang ada. Masalah sampah yang ada di pasar perlu adanya peremajaan fasilitas seperti kontainer sampah dan draenase yang ada di pasar. Pengelolaan pasar saat ini diserahkan ke pihak ke tiga dalam hal ini Koperasi pasar.

Pengelola pasar diberikan target pemasukan untuk mengatur penerimaan redistribusi dari Pemerintah Kota.

4.2.3.2.8. *Pemahaman (understanding) Dinas Kebersihan Kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang*

Program Bangun Praja sangat diperlukan dalam menciptakan Kota Semarang yang lebih bersih dan Indah. Dimasa yang lalu Kota Semarang cukup baik di bidang kebersihan karena adanya komitmen dari pimpinan Kota. Pelaksanaan Bangun Praja sendiri belum bisa maksimal bila dukungan pimpinan Daerah rendah.

4.2.3.2.9. *Pemahaman (understanding) Dinas Pariwisata Kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang*

Program Bangun Praja belum terkoordinasi dengan baik sebagaimana program Adipura dimasa lalu. Perkembangan di Kota Semarang di masa reformasi dimana masyarakat merasa ada kebebasan justru berdampak pada penurunan ketertiban dan ketaatan masyarakat terhadap lingkungan. Muncul kesemrawutan di jalur-jalur pedestrian, berkembangnya pedagang kaki lima yang menurunkan keindahan kota ditambah masalah sampah yang makin sulit diatasi.

Keindahan Kota sebagai daya tarik wisata tidak bisa dilakukan secara sektoral karena banyak kepentingan yang mesti akomodasi. Penertiban pedagang kaki lima hendaknya dipandang sebagai upaya mewujudkan kepentingan umum yang lebih luas dan hal ini mesti ada pengakuan hukum dan kemauan kuat dari pimpinan Daerah.

4.2.3.2.10. *Pemahaman (understanding) Kantor Infokom Kota terhadap pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang*

Sebagai Kantor yang bertugas dalam penyampaian informasi pembangunan keterlibatan Kantor infokom dalam program Bangun Praja belum maksimal karena belum ada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari pusat. Keikutsertaan kota Semarang belum di informasikan secara maksimal dan perlu adanya kejelasan bagi masyarakat untuk mendapatkan dukungan secara luas.

4.2.3.3. Keterlibatan (*involvement*) masing-masing Dinas/Instansi dari penggalan wawancara jajaran Pemerintah Kota Semarang terhadap program Bangun Praja

4.2.3.3.1. Keterlibatan (*involvement*) Bapedalda Kota dalam pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang

Pelaksanaan program bangun Praja memiliki kaitan dengan Visi dan Misi Bapedalda Kota. Visi Bapedalda Kota Semarang adalah menjadikan Bapedalda sebagai institusi yang responsif terhadap perubahan lingkungan. Misi Bapedalda Kota Semarang adalah : (1) melaksanakan pengendalian lingkungan dalam rangka meningkatkan fungsi lingkungan dan sumber daya alam. (2) meningkatkan kemampuan sumber daya manusia menuju profesionalisma. (3) mendorong menegakkan hukum lingkungan. (4) meningkatkan kualitas pelayanan di bidang lingkungan hidup. (5) meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup. (6) mengembangkan mekanisme koordinasi dan jaringan kerjasama di bidang pengelolaan lingkungan. (7) meningkatkan kapasitas kelembagaan di bidang lingkungan hidup. (8) mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen lingkungan yang melibatkan semua *stakeholder*.

Dalam pelaksanaan Program Bangun Praja di Kota Semarang ditunjang dengan beberapa Dinas Instansi dalam jajaran Pemerintah Kota Semarang sebagai tim teknis monitoring dan tim pelaksana sesuai SK Walikota Semarang. Pemahaman Program Bangun Praja Bervariasi pada setiap Dinas Instansi di Kota Semarang karena belum maksimalnya sosialisasi.

4.2.3.3.2.. Keterlibatan (*involvement*) Bappeda Kota dalam pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang

Keterlibatan Bappeda dalam pelaksanaan program Bangun Praja dirasa belum maksimal namun keinginan yang kuat untuk menyukseskan sangat tinggi. Permasalahan yang diajukan Bappeda sehubungan dengan penurunan kualitas lingkungan Kota adalah masalah banjir dan rob, emisi kendaraan, persediaan air bersih dan sanitasi, pengelolaan limbah padat, penambangan galian C, polusi industri, proteksi kawasan pesisir dan pantai, konflik penggunaan ruang dan proteksi Daerah Aliran Sungai (DAS).

Upaya yang dilakukan oleh Bappeda kota untuk lebih meningkatkan kinerja operasional Program Bangun Praja adalah dengan mengajukan pendanaan melalui APBD. Pembiayaan pembangunan lingkungan hidup di Kota Semarang ditujukan untuk mendukung optimalisasi fungsi Kota Semarang sesuai dengan peran dan beban yang diemban sebagai Kota Metropolitan yang berciri pantai. Selain itu konsentrasi pengelolaan sumber daya alam diarahkan pada pengelolaan sumber daya air dan sumber daya lahan yang berkelanjutan. Pijakan dasarnya adalah tetap mempertimbangkan aspek ketahanan daya dukung lingkungan dalam rangka mengemban terjaminnya pembangunan berkesinambungan.

4.2.3.3.3. Keterlibatan (involvement) Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota dalam pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang

Permasalahan yang ditemui di lapangan oleh Dinas pertamanan dan pemakaman adalah sorotan masyarakat menegenai pemasangan reklame yang tidak tertib. Deferensiasi fungsi taman yang dulu sebagai aksesoris kota menjadi tempat pasang reklame. Disamping itu kendala dana operasional mengurangi kinerja Dinas pertamanan, upaya yang dilakukan adalah sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat dengan memberikan laporan komplain terhadap pemasangan reklame yang tidak tertib.

Upaya menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan taman adalah dengan melakukan revitalisasi taman. Terdapat 12 taman yang akan direvitalisasi yaitu dengan menyerahkan pengelolaan pada dunia usaha dan lembaga swasta. Upaya lain adalah dengan pemagaran taman, lokasi taman Kota diupayakan agar dipagar karena terbukti efektif dari serbuan PKL.

Program Bangun Praja juga diharapkan akan mendapatkan dukungan dari *stakeholder* dan diharapkan akan mampu menunbuhkembangkan partisipasi masyarakat secara lebih luas.

4.2.3.3.4. Keterlibatan (involvement) Dinas Pekerjaan Umum Kota dalam pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang

Program Bangun Praja di Kota Semarang belum bisa dipahami substansinya karena belum ada kejelasan tentang pelaksanaan di lapangan dan schedul kerja program Bangun Praja. Sosialisasi dan Koordinasi pelaksanaan program Bangun Praja juga

belum optimal sehingga timbul pemahaman yang berbeda terhadap program Bangun Praja dalam masing-masing Dinas/Instansi.

Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang memandang bahwa dukungan pimpinan Daerah masih rendah terhadap pelaksanaan Program Bangun Praja. Permasalahan lingkungan harus lintas sektor dan didukung komitmen pimpinan daerah yang kuat. Masalah utama yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang adalah : banjir, genangan lokal, banjir kiriman, dan rob yang menuntut adanya perbaikan teknis draenase dan infrastruktur lain. Hal yang mesti dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang adalah melibatkan peran serta masyarakat, regulasi perda, mengaktifkan jalur lintas Kota terkait DAS, dan disertai oleh dukungan pemerintah pusat. Alokasi penanggulangan banjir sebenarnya visi dan misi pimpinan Daerah sangat rendah, masih terlalu banyak komitmen yang dilanggar. Kebijakan yang ada hanya mementingkan kepentingan pribadi yang cenderung memikirkan dunia usaha.

Sehubungan dengan program Bangun Praja yang perlu dipertegas adalah independensi dari program Bangun Praja sendiri dengan memberikan kewenangan lebih pada lembaga non struktural seperti Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DPPK), LSM, Perguruan Tinggi, dan Dewan Evaluasi Kota (DEK).

4.2.3.3.5. Keterlibatan (involvement) Dinas Perhubungan Kota dalam pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang

Dinas Perhubungan dalam program Bangun Praja lebih menitik beratkan pada fisik lingkungan, sesuai dengan tupoksi Dinas Perhubungan yang bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara, Pos dan Telekomunikasi. Agar pelaksanaan program Bangun Praja dapat berjalan baik diperlukan sosialisai dan koordinasi rutin antar tim teknis. Pemberian reward terhadap kota menjadi penting sebab akan dapat memacu kinerja dinas dalam mensukseskan program Bangun Praja.

4.2.3.3.6. Keterlibatan (involvement) Dinas Kesehatan Kota dalam pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang

Sebagai tim teknis dalam program Bangun Praja titik berat dinas Kesehatan dalam Program Bangun Praja adalah pada pusat layanan publik seperti Rumah Sakit, Puskesmas, dan sanitasi lingkungan pemukiman. Pelaksanaan program Bangun Praja perlu adanya pedoman acuan yang jelas bagi pelaksanaan di lapangan. Diperlukan

adanya adanya koordinasi rutin dan post anggaran khusus bagi pelaksanaan program Bangun Praja. Kebijakan Pimpinan Daerah belum mencerminkan keinginan yang kuat dalam menyukseskan program Bangun Praja dengan dinyatakan bahwa program Bangun Praja melekat pada masing-masing Dinas sesuai program yang telah ditetapkan.

Terjadinya distorsi kepentingan dinas yang ada lebih disebabkan komunikasi dan koordinasi yang sulit diwujudkan. Penghargaan terhadap kota berupa sertifikat dan publikasi secara simbolik masih dianggap perlu, sebab akan ada beban moral dari kota yang menerima penghargaan untuk melaksanakan fungsinya dengan baik.

4.2.3.3.7. Keterlibatan (involvement) Dinas Pasar Kota dalam pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang

Pengelolaan lingkungan di Kota Semarang akhir-akhir ini menunjukkan penurunan dalam hal kualitas. Hal ini dapat dilihat dengan alokasi dana yang kurang dalam penataan fasilitas umum seperti pasar. Masalah pedagang kaki lima dalam pengeluaran izin saat ini diserahkan ke tiap Kelurahan dan Kecamatan melalui SK Walikota No 130.2/339 tahun 2000 tentang penyerahan sebagian tugas tata bangunan Dinas Kebersihan, Dinas Pertamanan dan UPD Pengelola pedagang kaki lima kepada kelurahan dan SK Walikota No 137/205 tentang pendelegasian wewenang untuk menandatangani perijinan pedagang kaki lima di wilayah Kota Semarang. Dinas terkait hanya mengurus masalah pembinaan. Hal ini menimbulkan dampak yang besar terhadap pertumbuhan pedagang kaki lima di Kota Semarang yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan dalam penataan fasilitas umum dan Kota secara keseluruhan.

Solusi yang bisa dilakukan Dinas Pasar dengan keterbatasan yang ada adalah mengoptimalkan sumber daya yang ada baik sumber daya manusia dan sumber dana yang ada dengan mengedepankan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan fasilitas umum dalam hal ini pasar.

4.2.3.3.8. Keterlibatan (involvement) Dinas Kebersihan Kota dalam pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang

Permasalahan yang dihadapi Dinas kebersihan adalah masalah sampah dan terbatasnya TPS serta armada angkutan sampah yang sudah tidak layak operasi serta dana yang kurang. Dana kebersihan diperoleh dengan pemungutan distribusi dari tarif listrik dan telepon. Upaya partisipasi masyarakat dalam mengatasi sampah dilakukan

dengan melakukan sosialisasi pada tingkatan kelurahan dan kecamatan. Keterbatasan yang ada pada Dinas Kebersihan tanpa dukungan masyarakat akan sulit mengatasi sampah yang ada di Kota Semarang. Penghargaan pada Kecamatan yang bersih juga diberikan untuk memberikan rangsangan untuk menggalakkan kebersihan.

4.2.3.3.9. Keterlibatan (involvement) Dinas Pariwisata Kota dalam pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang

Keterlibatan Dinas Pariwisata dalam Program Bangun Praja belum maksimal. Untuk lebih mematangkan kegiatan Bangun Praja perlu dilakukan koordinasi yang lebih rutin serta keinginan untuk saling mendukung antar Dinas/Instansi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Keindahan Kota sebagai daya tarik wisata tidak bisa dilakukan secara sektoral karena banyak kepentingan yang mesti diakomodasi. Penertiban pedagang kaki lima hendaknya dipandang sebagai upaya mewujudkan kepentingan umum yang lebih luas dan hal ini mesti ada pengakuan hukum dan kemauan kuat dari pimpinan Daerah.

4.2.3.3.10. Keterlibatan (involvement) Kantor Infokom Kota dalam pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang

Sebagai Kantor yang bertugas dalam penyampaian informasi pembangunan keterlibatan Kantor infokom dalam program Bangun Praja belum maksimal karena belum ada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari pusat. Keikutsertaan kota Semarang belum di informasikan secara maksimal dan perlu adanya kejelasan bagi masyarakat untuk mendapatkan dukungan secara luas.

4.2.3.4. Tindakan di Lapangan (action) masing-masing Dinas/Instansi dari penggalian wawancara jajarannya Pemerintah Kota Semarang terhadap program Bangun Praja

4.2.3.4.1. Tindak Lanjut kegiatan di lapangan (action) oleh Bapedalda Kota sehubungan dengan pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang

Bapedalda Kota memegang peran kunci dalam mengkoordinasikan kegiatan pembangunan dalam menciptakan lingkungan Kota yang baik sesuai dengan visi dan misi yang diemban. Keberadaan Bapedalda Kota Semarang menurut sejarah pembentukan kelembagaannya telah melalui beberapa kali proses perubahan. Pada periode 1988-1999 bentuk kelembagaannya diberi nama Tim Koordinasi Pembinaan

Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (TKP) dasar hukumnya adalah SK Walikotamadya KDH Tk. II Semarang No 660.1.05/205/1991. Pada saat bernama TKP banyak menghadapi kendala diantaranya : kelembagaan belum kuat, koordinasi lemah, dan kesadaran masyarakat yang rendah. Pada periode 1992-2000 bentuk lembaga adalah Bapedalda Kodya Dati II Semarang (Non Struktural), dasar hukumnya adalah SK Gubernur KDH Tk. I Jawa Tengah No 061.1/34/1992. Kendala pada periode 1992-2000 adalah kesadaran masyarakat masih kurang, kewenangan terbatas, koordinasi lemah, dan SDM kurang. Pada periode 2001 – sekarang bentuk lembaga Bapedalda Kota Semarang, dasar hukum pembentukannya adalah Perda Kota Semarang No 3 Tahun 2001.

Visi dan Misi Bapedalda Kota serta penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) sudah saling mendukung dengan program Bangun Praja dimana Bapedalda Kota memegang fungsi koordinatif dan administratif dengan didukung oleh masing-masing Dinas Instansi terkait sesuai bidang tugas yang diemban.

Isu lingkungan yang paling dominan di Kota Semarang adalah masalah sampah dan penataan Kota terutama masalah pedagang kaki lima (PKL). Kendala pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang adalah :

1. Pola koordinasi antar dan dalam Dinas instansi sendiri yang belum maksimal. Dalam lingkungan Bapedalda sendiri adalah masalah mutasi karyawan yang membidangi Bangun Praja, orang baru berarti butuh pembelajaran lagi tentang program Bangun Praja.
2. Anggaran yang belum jelas sehingga akan mempengaruhi mekanisme kerja dalam program Bangun Praja.
3. Sosialisasi yang belum maksimal, dalam tahun 2003 koordinasi antar dinas baru dilaksanakan sebanyak 3 kali.

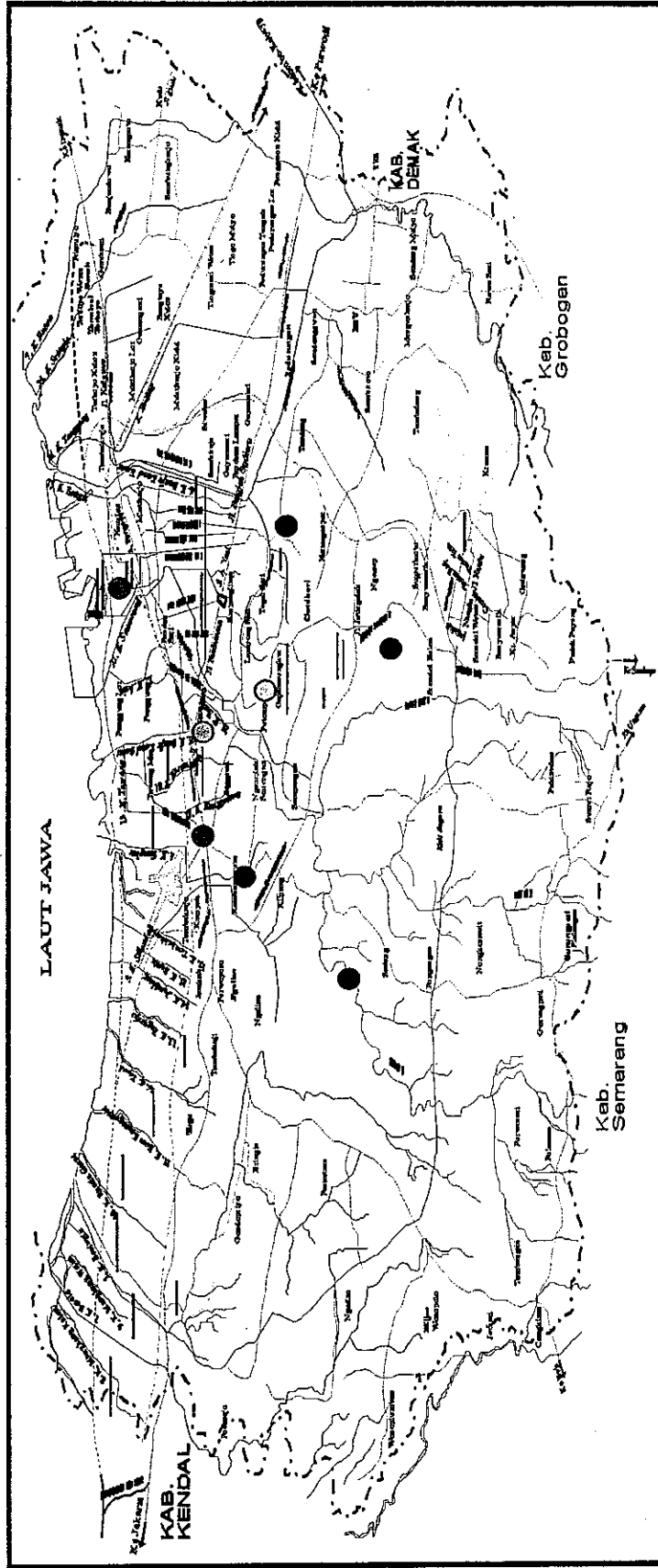
Untuk meningkatkan peran serta dari semua pihak dilakukan koordinasi antar Dinas, dengan keterbatasan dana koordinasi belum optimal dilakukan. Pemberian penghargaan juga mengalami kendala dana.

Sebaiknya penghargaan yang diberikan terhadap Kota peserta Bangun Praja diupayakan dalam bentuk program yang akan menunjang keberhasilan program Bangun Praja seperti prokasih dimasa lalu. Sebelum program Bangun Praja Kota

Semarang juga pernah mendapatkan piala Adipura Kencana periode 1990-1997 dengan ujung tombak program Kebersihan Keindahan dan Ketertiban (KKK) yang ada pada setiap Kelurahan yang terbukti efektif. Pada tahun 2004 Bapedalda Kota Semarang menetapkan 14 lokasi pengamatan (titik pantau) yang terdiri : perumahan, jalan protokol, pasar, pertokoan, perkantoran, sekolah, terminal angkutan, terminal penumpang, stasiun kereta api, rumah sakit, sungai, TPA, Hutan Kota, dan Taman Kota dengan 45 titik pengamatan.



- TPA Jatberang
- Pasar Pelerangan
- Sungai Bajir Kanal Barat
- RSU Dr. Karyadi
- Hutan Kota Tinjomoyo
- Perumahan Semarang Indah
- Pelabuhan Tanjung Mas
- Jalan Siliwangi



Gambar 12. Lokasi pantau pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang

4.2.3.4.2. Tindak Lanjut kegiatan di lapangan (action) oleh Bappeda Kota sehubungan dengan pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang

Permasalahan lingkungan di Kota Semarang adalah: banjir dan rob, emisi kendaraan, persediaan air bersih dan sanitasi, pengelolaan limbah padat, penambangan galian C, polusi industri, proteksi kawasan pesisir dan pantai, konflik penggunaan ruang dan proteksi Daerah Aliran Sungai (DAS). Pembangunan lingkungan hidup di Kota Semarang ditujukan untuk mendukung optimamalisasi fungsi Kota Semarang sesuai dengan peran dan beban yang diemban sebagai Kota Metropolitan yang berciri pantai. Selain itu konsentrasi pengelolaan sumber daya alam diarahkan pada pengelolaan sumber daya air dan sumber daya lahan yang berkelanjutan. Pijakan dasarnya adalah tetap mempertimbangkan aspek ketahanan daya dukung lingkungan dalam rangka mengemban terjaminnya pembangunan berkesinambungan.

4.2.3.4.3. Tindak Lanjut kegiatan di lapangan (action) oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota sehubungan dengan pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang

Upaya menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan taman adalah dengan melakukan revitalisasi taman. Terdapat 12 taman yang akan direvitalisasi yaitu dengan menyerahkan pengelolaan pada dunia usaha dan lembaga swasta. Upaya lain adalah dengan pemagaran taman, lokasi taman Kota diupayakan agar dipagar karena terbukti efektif dari serbuan PKL.

Program Bangun Praja juga diharapkan akan mendapatkan dukungan dari *stakeholder* dan diharapkan akan mampu menunbuhkembangkan partisipasi masyarakat secara lebih luas.

4.2.3.4.4. Tindak Lanjut kegiatan di lapangan (action) oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota sehubungan dengan pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang

Sebagai Dinas yang membidangi teknis pembangunan fisik Kota masalah utama yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang adalah : banjir, genangan lokal, banjir kiriman, dan rob yang menuntut adanya perbaikan teknis draenase dan infrastruktur lain. Hal yang mesti dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang adalah melibatkan peran serta masyarakat, regulasi perda, mengaktifkan jalur lintas Kota terkait DAS, dan disertai oleh dukungan pemerintah pusat. Alokasi penanggulangan banjir sebenarnya visi dan misi pimpinan Daerah sangat rendah, masih terlalu banyak

komitmen yang dilanggar. Kebijakan yang ada hanya mementingkan kepentingan pribadi yang cenderung memikirkan dunia usaha.

Sehubungan dengan program Bangun Praja yang perlu dipertegas adalah independensi dari program Bangun Praja sendiri dengan memberikan kewenangan lebih pada lembaga non struktural seperti Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DPPK), LSM, Perguruan Tinggi, dan Dewan Evaluasi Kota (DEK).

4.2.3.4.5. *Tindak Lanjut kegiatan di lapangan (action) oleh Dinas Perhubungan Kota sehubungan dengan pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang*

Dinas Perhubungan dalam program Bangun Praja lebih menitik beratkan pada fisik lingkungan, sesuai dengan tupoksi Dinas Perhubungan yang bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara, Pos dan Telekomunikasi. Agar pelaksanaan program Bangun Praja dapat berjalan baik diperlukan sosialisai dan koordinasi rutin antar tim teknis. Pemberian reward terhadap kota menjadi penting sebab akan dapat memacu kinerja dinas dalam mensukseskan program Bangun Praja.

4.2.3.4.6. *Tindak Lanjut kegiatan di lapangan (action) oleh Dinas Kesehatan Kota sehubungan dengan pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang*

Pelaksanaan Program Bangun Praja kaitannya dengan dinas Kesehatan dalam hal pelaksanaan di lapangan adalah mengenai sanitasi lingkungan dan pemeliharaan fasilitas publik seperti rumah sakit dan puskesmas. Namun di lapangan sendiri kegiatan tersebut masih secara sektoral dilakukan oleh dinas Kesehatan belum ada pembahasan detail dalam koordinasi Program Bangun Praja. Masalah IPAL dan IPLC di Rumah Sakitt masih menghadapi kendala keterbatasan dana. Pelaksanaan perbaikan sanitasi lingkungan lebih banyak dilakukan melalui penyuluhan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dengan swadaya untuk menjaga kesehatan lingkungannya pemukiman masing-masing.

4.2.3.4.7. *Tindak Lanjut kegiatan di lapangan (action) oleh Dinas Pasar Kota sehubungan dengan pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang*

Dalam pelaksanaannya program Bangun di Kota Semarang belum terkoordinasi dengan baik. Pengelolaan fasilitas umum khususnya pasar di Kota Semarang perlu

komitmen dari pimpinan Daerah dan dukungan partisipasi masyarakat secara luas dalam pemeliharaan untuk kenyamanan fasilitas umum tersebut.

Pengelolaan lingkungan di Kota Semarang akhir-akhir ini menunjukkan penurunan dalam hal kualitas. Hal ini dapat dilihat dengan alokasi dana yang kurang dalam penataan fasilitas umum seperti pasar. Masalah pedagang kaki lima dalam pengeluaran izin saat ini diserahkan ke tiap Kelurahan dan Kecamatan melalui SK Walikota No 130.2/339 tahun 2000 tentang penyerahan sebagian tugas tata bangunan Dinas Kebersihan, Dinas Pertamanan dan UPD Pengelola pedagang kaki lima kepada kelurahan dan SK Walikota No 137/205 tentang pendelegasian wewenang untuk menandatangani perijinan pedagang kaki lima di wilayah Kota Semarang. Dinas terkait hanya mengurus masalah pembinaan. Hal ini menimbulkan dampak yang besar terhadap pertumbuhan pedagang kaki lima di Kota Semarang yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan dalam penataan fasilitas umum dan Kota secara keseluruhan.

Solusi yang bisa dilakukan Dinas Pasar dengan keterbatasan yang ada adalah mengoptimalkan sumber daya yang ada baik sumber daya manusia dan sumber dana yang ada dengan mengedepankan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan fasilitas umum dalam hal ini pasar.

Harapan Dinas Pasar terhadap Program Bangun Praja adanya peran para stakeholder dan para pengguna keberadaan pasar agar ada rasa memiliki dan kesadaran untuk memelihara fasilitas yang ada. Masalah sampah yang ada di pasar perlu adanya peremajaan fasilitas seperti kontainer sampah dan drainase yang ada di pasar. Pengelolaan pasar saat ini diserahkan ke pihak ketiga dalam hal ini Koperasi pasar. Pengelola pasar diberikan target pemasukan untuk mengatur penerimaan redistribusi dari Pemerintah Kota.

4.2.3.4.8. *Tindak Lanjut kegiatan di lapangan (action) oleh Dinas Kebersihan Kota sehubungan dengan pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang*

Sebagai Dinas yang bertanggung jawab terhadap kebersihan Kota permasalahan yang dihadapi Dinas kebersihan adalah masalah sampah dan terbatasnya TPS serta armada angkutan sampah yang sudah tidak layak operasi serta dana yang kurang. Dana kebersihan diperoleh dengan pemungutan distribusi dari tarif listrik dan telepon. Upaya partisipasi masyarakat dalam mengatasi sampah dilakukan dengan melakukan

sosialisasi pada tingkatan kelurahan dan kecamatan. Keterbatasan yang ada pada Dinas Kebersihan tanpa dukungan masyarakat akan sulit mengatasi sampah yang ada di Kota Semarang. Penghargaan pada Kecamatan yang bersih juga diberikan untuk memberikan rangsangan untuk mengalakkan kebersihan.

Penurunan kinerja dinas Kebersihan dibanding periode sebelumnya dimana Kota Semarang pernah mendapatkan penghargaan Adipura kencana dibidang kebersihan banyak disebabkan oleh kebijakan diluar kewenangan Dinas Kebersihan sendiri. Program Bangun Praja tanpa dukungan dana dan peran seluruh *stakeholder* akan sulit mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Disamping masalah pengelolaan dan dana yang kurang memadai Dinas kebersihan Kota juga dihadapkan dengan permasalahan lokasi TPA. Lokasi TPA yang ada di Jatibarang seluas 44,5 ha yang merupakan satu-satunya TPA yang ada di Kota Semarang sudah lewat masa berlakunya sehingga membutuhkan lokasi baru.

4.2.3.4.9. Tindak Lanjut kegiatan di lapangan (action) oleh Dinas Pariwisata Kota sehubungan dengan pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang

Sebelum program Bangun Praja Dinas Pariwisata Kota telah melaksanakan program sektoral yaitu optik (operasi simpatik) yaitu program yang ditujukan pada hotel dan penginapan untuk penanganan limbah. Ada juga program Darling (sadar lingkungan) yang termasuk ke dalam program sapta pesona yang dicanangkan program Pariwisata. Program Bangun Praja sendiri sangat perlu didukung oleh Dinas Pariwisata Kota karena yang menjadi penekanan bagi Dinas Pariwisata adalah terciptanya Kota Semarang yang Indah untuk menarik sebanyak mungkin wisatawan asing dan domestik untuk berkunjung ke Kota Semarang. Andalan yang akan dikembangkan Dinas Pariwisata Kota Semarang adalah pengelolaan Bangunan bersejarah dan penciptaan lingkungan Kota yang sejuk bagi peningkatan kenyamanan Kota. Upaya pelibatan setiap lapisan masyarakat menjadi penting untuk dikembangkan.

4.2.3.4.10. Tindak Lanjut kegiatan di lapangan (action) oleh Kantor Infokom Kota sehubungan dengan pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang

Tindakan di lapangan dalam penyampaian informasi tentang program Bangun Praja belum dilaksanakan dengan baik oleh kantor Infokom. Hal ini karena belum ada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari pusat.

4.3. Analisis Hasil Penelitian

Analisis hasil dilakukan terhadap penyusunan perencanaan program Bangun Praja oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan hasil evaluasi program Bangun Praja yang dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro di Jawa Tengah. Analisis dilakukan terhadap mekanisme prosedur pemantauan dan tata laksana kegiatan.

Pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang akan dilakukan analisis berdasarkan hasil penyebaran kuisioner dan wawancara kepada Dinas Instansi yang berada di jajaran Pemerintah Kota Semarang. Data kuisioner yang dianalisis diambil dari sampel terpilih yaitu Dinas instansi di jajaran Pemerintah Kota Semarang yang terdiri dari : Bapedalda, Bappeda, Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Pasar, Dinas Kebersihan, Dinas Pariwisata, dan Kantor Informasi dan Komunikasi Kota.

Setiap Dinas Instansi diambil lima sampel untuk mengisi daftar pertanyaan terhadap variabel yang diamati. Dalam penelitian ini variabel yang diamati adalah penerimaan, pemahaman, keterlibatan, dan tindakan di lapangan. Masing-masing variabel berisi 10 pertanyaan dan pernyataan dengan menggunakan scoring data 1 sampai 6 dengan tingkat variabel dari yang terendah ke yang tertinggi. Selanjutnya scoring data yang diperoleh dilakukan analisis diskripsi dan frekwensi dari munculnya jawaban yang diperoleh. Tingkat pemahaman, peenerimaan, keterlibatan, dan Tindakan di lapangan akan diuraikan berdasarkan hasil analisis statistik ditambah dengan hasil wawancara dan observasi serta catatan lapangan yang diperoleh selama kegiatan penelitian di lapangan. Bagi kelengkapan pembahasan juga dilakukan penjelasan dari sumber data sekunder dan kajian literatur pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang.

Hasil analisis statistik dari masing-masing sampel Dinas instansi di jajaran Pemerintah Kota Semarang dan hasil wawancara coba diuraikan dalam bentuk pendiskripsian kondisi pelaksanaan Bangun Praja di Kota Semarang. Potret perencanaan program Bangun Praja sendiri akan diuraikan tentang kelebihan dan kekurangan yang ditemui pada tatanan pelaksanaan Program Bangun Praja di Kota Semarang sebagai Kota Metropolitan.

Selanjutnya akan ditampilkan model pendekatan perencanaan serta aplikasi pelaksanaan program Bangun Praja berdasarkan hasil temuan di lapangan .

4.4. Pembahasan

Dari hasil Analisis data kuisisioner terhadap variabel penerimaan (*acceptability*), pemahaman (*understanding*), keterlibatan (*involvement*), dan tindakan di lapangan (*action*) dari sampel yang diambil menunjukkan adanya keinginan yang tinggi terhadap pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang.

Keinginan tersebut tidak didukung dengan komitmen pengambil keputusan dalam hal ini Pimpinan Daerah dan DPRD sehingga belum ada alokasi dana khusus dan pembentukan tim untuk melaksanakan pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang. Dengan kata lain keinginan yang tinggi untuk melaksanakan pelaksanaan program Bangun Praja adalah merupakan keinginan idealisme Dinas/Instansi jajaran Pemerintah Kota Semarang saja dan belum ditunjukkan dengan kegiatan nyata dilpangan.

Komitmen yang belum optimal dari Pimpinan Daerah dan DPRD dalam melaksanakan pelaksanaan program Bangun Praja menyebabkan koordinasi antar Dinas/Instansi dalam jajaran Pemerintah Kota Semarang tidak optimal. Akibatnya timbul perbedaan persepsi tentang pelaksanaan program Bangun Praja antar Dinas/Instansi dalam jajaran Pemerintah Kota Semarang.

Belum maksimalnya komitmen Pimpinan Daerah dalam mengalokasikan dana kegiatan bagi pelaksanaan program Bangun Praja berpengaruh terhadap kinerja Dinas/Instansi dalam melaksanakan pelaksanaan program Bangun Praja tahap pertama.

Akan tetapi dalam perkembangannya perhatian Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan program Bangun Praja berkembang ke arah yang lebih baik. Hal ini ditunjukkan dengan dimasukkannya pelaksanaan program Bangun Praja dan penanganan lingkungan dikawasan khusus sebagai sub bagian dari kegiatan utama penanganan kebersihan dan keindahan lingkungan wilayah perkotaan. Penyusunan perencanaan pembangunan dengan memperhatikan kondisi lingkungan sudah mulai diakomodir pada musyawarah perencanaan pembangunan propinsi Jawa Tengah (Musrenbangprop) April 2004.

Penyusunan anggaran dalam musyawarah perencanaan pembangunan Propinsi (Musrenbangprop) merupakan satu bagian dari proses perencanaan anggaran pembangunan daerah Pemerintah Propinsi. Musyawarah ini merupakan forum pembahasan awal terhadap usulan prioritas kegiatan dan pembiayaan tahunan dari unit kerja Pemerintah Propinsi, pemerintah Kabupaten/Kota dan pelaku pembangunan lainnya dalam penyusunan RAPBD Propinsi Jawa Tengah tahun 2005.

Bila dilihat dari frekwensi jawaban maka skor nilai 5 yang memiliki frekwensi yang sering muncul. Hal ini menunjukkan adanya suatu keinginan yang kuat dikalangan birokrat pada level teknis dan pelaksana (jajaran Dinas Instansi Pemerintah Kota) untuk menciptakan kondisi Kota Semarang yang memperhatikan lingkungan sesuai kewenangan yang dimiliki.

Hasil wawancara lebih menunjukkan bahwa konsep Bangun Praja adalah sangat diperlukan dalam pembangunan, akan tetapi kriteria penilaian, aspek dalam program Bangun Praja, dan mekanisme pelaksanaan program Bangun Praja sendiri belum dipahami dengan baik karena belum efektifnya koordinasi dan sosialisasi.

4.4.1. Evaluasi terhadap penyusunan perencanaan perencanaan program Bangun Praja oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia

Penyusunan perencanaan program Bangun Praja oleh Kementerian Lingkungan hidup dilakukan secara sentralistik dengan prosedur yang terstandarisasi. Indikatornya adalah timbulnya pemahaman yang belum sama terhadap program Bangun Praja oleh Dinas/Instansi dalam jajaran Pemerintah Kota Semarang. Dinas/Instansi cenderung memahami program Bangun Praja sebagaimana program Adipura dan dalam operasional kegiatan masih timbul ego sektoral masing-masing Dinas/Instansi.

Berdasarkan buku pedoman umum pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program Bangun Praja aspek yang di pantau dan dievaluasi belum aplikatif karena ada beberapa komponen aspek evaluasi yang mesti disempurnakan. Beberapa komponen yang semestinya masuk ke dalam aspek manajemen ditemukan pada aspek institusi seperti komponen anggaran dan sumber daya manusia. Pada aspek fisik perlu ditambahkan komponen sarana atau fasilitas pendukung pengendalian kualitas air

mengingat upaya pengendalian kualitas air diperlukan fasilitas fisik, seperti adanya IPAL, stasiun tetap pemantauan kualitas air, dan sumur pantau (*monitoring well*).

Dalam hal tata laksana pemantauan dan evaluasi program Bangun Praja belum ada kejelasan batasan waktu pemantauan dan evaluasi program Bangun Praja tahap II yang dilaksanakan oleh kementerian lingkungan hidup. Hal ini juga belum terlihat pelimpahan wewenang pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Dari Tim Lapangan Kementerian Lingkungan Hidup kepada Tim Lapangan di Propinsi dibawah koordinasi Dewan Evaluasi Kota sesuai dengan mekanisme pelaksanaan dan pemantauan evaluasi.

Peran dan tugas dari Dewan Evaluasi Kota terhadap pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di propinsi serta teknis koordinasi antar dengan tim teknis dan tim pelaksana program Bangun Praja belum berjalan sesuai harapan. Dalam penyusunan perencanaan program Bangun Praja sendiri tidak secara operasional menjelaskan bentuk kewenangan dan tata kerja serta peran dari Dewan Evaluasi Kota yang berkaitan dengan kedudukannya dengan peran dari lembaga Pemerintah Kota dalam pelaksanaan program Bangun Praja. Disamping itu belum berfungsinya Dewan Evaluasi Kota di Kota Semarang karena belum jelasnya tentang sumber pendanaan dan belum tercipta suatu pola koordinasi yang sistematis dengan tim teknis dan tim pelaksana di lapangan yang terdiri dari Dinas/Instansi dalam jajaran Pemerintah Kota Semarang.

Kunci dari pelaksanaan program Bangun Praja adalah kegiatan pemantauan dan evaluasi yang pada pelaksanaan program Bangun Praja tahap pertama dan tahap kedua dilaksanakan oleh Tim Lapangan (TL) dari Kementerian Lingkungan Hidup. Tugas Tim Lapangan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi program boleh dikatakan sangat berat karena banyaknya komponen aspek yang dievaluasi dengan isu lingkungan secara bertahap bertambah. Aspek yang dipantau dan di evaluasi oleh Tim Lapangan adalah aspek institusi, aspek manajemen, aspek daya tanggap, dan aspek fisik. Masing-masing aspek ditujukan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan Pemerintah Kota/Kabupaten terhadap sampah, ruang terbuka hijau, fasilitas publik, dan pengendalian kualitas air pada pelaksanaan program Bangun Praja tahap pertama. Isu lingkungan yang dievaluasi akan bertambah pada tahap kedua pelaksanaan program Bangun Praja yang meliputi pengelolaan pesisir

pantai, amdal, dan tata ruang. Selanjutnya pada tahap ketiga isu lingkungan yang dipantai ditambah dengan pencemaran udara, kerusakan lingkungan hidup, dan limbah B3. Banyaknya aspek yang akan dievaluasi tidak hanya pada 1 (satu) Kota melainkan dilakukan di 59 Kota/Kabupaten di Indonesia.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sendiri membutuhkan sumber daya manusia yang menguasai tentang aspek pemantauan dan evaluasi dalam program Bangun Praja agar memperoleh hasil pemantauan dan evaluasi yang obyektif. Mengingat hal tersebut perlu dipertimbangkan dalam penyusunan perencanaan program Bangun Praja dengan melimpahkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kepada tim lapangan yang ada di daerah dibawah koordinasi Dewan Evaluasi Kota.

Antara pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tahap pertama dan tahap kedua tidak terdapat cukup waktu untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara lengkap. Waktu pemantauan dan evaluasi yang terbatas (hanya 1 tahun untuk tahap pertama) menyebabkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tidak optimal. Karena evaluasi secara lengkap baru dapat dilakukan setelah satu tahapan selesai maka implementasi satu tahapan program Bangun Praja seharusnya tidak hanya 1 (satu) tahun.

Dari uraian tentang mekanisme dan prosedur pelaksanaan program Bangun Praja tersebut maka jelas sekali terlihat bahwa penyusunan perencanaan program bersifat sentralistik dan terstandarisi dengan lingkup yang luas tentang aspek dan isu lingkungan yang dievaluasi. Disamping itu komponen aspek pemantauan evaluasi dengan isu lingkungan yang ditetapkan pelaksanaannya secara bertahap juga belum bisa dianggap mampu memberikan penilaian yang obyektif terhadap Kota/Kabupaten yang dievaluasi. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan tipologi geografis dan demografis dari Kota peserta.

Pelaksanaan program Bangun Praja sendiri harus mempertimbangkan perbedaan tipologi geografis dan demografis dari Kota peserta hal ini menjadi lebih kompleks dengan banyaknya Kabupaten/Kota peserta dimana pada tahun pertama saja pelaksanaan program Bangun Praja diikuti oleh 59 Kota/Kabupaten di seluruh Indonesia. Kota/Kabupaten yang bercirikan geografis pantai mungkin bisa dievaluasi mengenai pengelolaan pesisir pantai sedangkan Kota/Kabupaten yang bercirikan geografis pegunungan isu pengelolaan pesisir tersebut tidak bisa dievaluasi. Disamping itu pedoman pemantauan dan evaluasi disamakan antara Kota Metropolitan, Kota

Besar, Kota Sedang, dan Kota Kecil yang merugikan peringkat penilaian Kota Kecil karena memiliki fasilitas fisik yang kurang memadai dibandingkan dengan Kota yang lebih besar.

Perencanaan program Bangun Praja lebih banyak menggunakan pendekatan kepada teori perencanaan sinoptik komprehensif yang masih memiliki banyak kelemahan dalam pelaksanaannya. Pada tata laksana pemantauan dan evaluasi juga masih kental sekali dengan nuansa sentralisasi dimana pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tetap dilakukan oleh Tim Lapangan dari Kementerian Lingkungan Hidup, semestinya ada pendelegasian wewenang ke Tim Lapangan propinsi karena secara teknis tentu saja Tim Lapangan yang ada di Propinsi akan lebih menguasai kondisi dari Kota/Kabupaten dalam lingkup wilayah kerjanya.

Unsur yang sebenarnya sangat berpengaruh dalam pelaksanaan program Bangun Praja yaitu sosialisasi program belum secara eksplisit dijelaskan tentang mekanisme pelaksanaannya. Semestinya pelaksanaan sosialisasi program Bangun Praja diprioritaskan untuk dilakukan terhadap Pimpinan Daerah dan kalangan Legislatif yang menjadi tugas dari Kementerian Lingkungan Hidup. Sosialisasi tersebut menjadi penting dilakukan untuk mendapatkan dukungan bagi kesuksesan pelaksanaan pelaksanaan program Bangun Praja di Kabupaten/Kota peserta. Setelah dukungan dan Komitmen Pimpinan daerah dan DPRD jelas maka tugas sosialisasi lebih lanjut menjadi bagian dari tugas tim teknis dan tim pelaksana yang ada di Kota/Kabupaten.

Hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Lapangan dari Kementerian Lingkungan Hidup semestinya ada semacam rekomendasi yang dikeluarkan bagi perbaikan pengelolaan lingkungan Hidup yang mesti dilakukan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten. Sedapat mungkin hasil pemantauan dan evaluasi tim lapangan Kementerian Lingkungan hidup tidak hanya untuk kepentingan menentukan peringkat bagi Kota/Kabupaten yang bersangkutan. Hal ini penting bagi Pemerintah Kota/Kabupaten dalam perbaikan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah kerjanya.

Kejelasan mengenai kelanjutan program Bangun Praja setelah pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dengan hasil adanya peringkat dari Kota/Kabupaten peserta juga belum terlihat dalam perencanaan program Bangun Praja. Keinginan Kota/Kabupaten untuk menyukseskan pelaksanaan program Bangun Praja menjadi rendah karena belum

jelas mengenai kemanfaatan yang diperoleh daerah bila melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup secara baik.

Perlu kiranya dimasukkan mekanisme pemberian penghargaan (*reward*) dalam perencanaan program Bangun Praja terhadap Kota/Kabupaten peserta. Sedapat mungkin pemberian penghargaan disesuaikan dengan Kodisi dan kebutuhan Kota/Kabupaten untuk meningkatkan kinerjanya di bidang lingkungan berupa proyek yang berhubungan dengan perbaikan lingkungan.

4.4.2. Evaluasi terhadap pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang

Program Bangun Praja di Dinas Instansi pada jajaran Pemerintah Kota Semarang belum begitu dipahami tentang mekanisme dan sistem pelaksanaannya serta indikator penilaian terhadap suatu Kota. Sedangkan tujuan pelaksanaan program Bangun Praja dipahami dikalangan Dinas Instansi di Kota Semarang beragam sesuai dengan kewenangan dan bidang kerja Dinas bersangkutan yang rata-rata menganggap bahwa program Bangun Praja hanya sebagai penyerta dari sektor yang ada. Hal ini dikarenakan rendahnya komitmen pimpinan daerah dalam menyukseskan pelaksanaan Program Bangun Praja. Kondisi ini berpengaruh terhadap keterlibatan Dinas Instansi dalam lingkup Pemerintah Kota Semarang terhadap pelaksanaan Program Bangun Praja.

Tingkat pemahaman dan kepentingan yang berbeda antar Dinas Instansi terkait dalam pengelolaan lingkungan perkotaan di Kota Semarang menyebabkan sering muncul ego sektoral masing-masing Dinas dalam menterjemahkan kebijakan pembangunan, sehingga sulit memperoleh keterpaduan dalam tatanan pelaksanaan di lapangan. Dari hasil kuisisioner dan wawancara tentang tingkat penerimaan (*acceptability*), pemahaman (*understanding*), keterlibatan (*participation*), dan tindak lanjut kegiatan di lapangan (*action*) menunjukkan adanya keinginan yang kuat untuk menyukseskan Program Bangun Praja. Untuk itu diperlukan adanya penyempurnaan untuk menyusun suatu model pendekatan pelaksanaan program Bangun Praja yang lebih baik.

Penataan pola koordinasi bagi tercapainya keterpaduan pelaksanaan program Bangun Praja hendaknya didasari pada peningkatan aspek manajemen pelaksanaan. Keterbatasan dana dan sumber daya manusia pada tatanan operasional harus menjadi

perhatian utama dan perlu diupayakan tindakan nyata untuk mengatasinya yang bisa dimulai dari pimpinan Kota.

Sebelum pelaksanaan program Bangun Praja Kota Semarang sudah mengikuti program Adipura, bahkan Kota Semarang sendiri pernah mendapatkan penghargaan Adipura Kencana selama periode 1990-1997. Ada semacam pemahaman yang keliru mengenai program Bangun Praja, ada anggapan bahwa program Bangun Praja merupakan ganti nama dari program Adipura dimasa lalu.

Pola koordinasi program Bangun Praja yang berada di Bapedalda Kota masih belum maksimal. Dinas Instansi yang menunjukkan keterlibatan dan tindakan di lapangan yang begitu tinggi dari hasil kuisisioner adalah Dinas Kebersihan, Dinas Pasar, Dinas Pertamanan, dan Bapedalda sendiri yang merupakan leading sector program Bangun Praja. Hal ini lebih disebabkan bahwa Program Bangun Praja Berkaitan langsung dengan bidang kerja dan Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dari Dinas Instansi tersebut. Adapun Dinas lain walaupun menunjukkan tingkat keterlibatan dan tindakan di lapangan yang cukup baik hal ini lebih kepada adanya keinginan yang kuat untuk menciptakan Kota Semarang yang lebih baik dari kondisi saat ini.

Kriteria penilaian fisik yang meliputi isu sampah, ruang terbuka hijau, fasilitas publik (pasar, terminal, rumah sakit, taman Kota dan hutan kota) erat kaitannya dengan kemampuan non fisik pengelolaan lingkungan Kota yang terkait dengan sumber daya manusia pendukung pada setiap Dinas Instansi. Dukungan dana pengelolaan masalah sampah yang ada di Kota Semarang masih dirasa kurang. Menurut staff Dinas Kebersihan Kota bahwa kemampuan armada angkutan sampah dan jumlah TPS yang ada hanya mampu melayani 70% dari produksi sampah Kota setiap harinya. Dengan kondisi demikian Dinas Kebersihan Kota lebih menekankan pada penanganan sampah yang berhubungan langsung dengan fasilitas publik seperti pasar, terminal, dan pusat Kota. Sisanya sementara ini ditangani oleh masyarakat dengan cara swadaya di tiap kelurahan dan lingkungan pemukiman.

Aspek non fisik yang meliputi manajemen, institusi, dan daya tanggap juga menghadapi persoalan tersendiri dalam pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang. Disamping masalah koordinasi antar Dinas instansi yang masih lemah juga disebabkan adanya pola mutasi jabatan dalam lingkungan Dinas Instansi di Kota Semarang yang belum terpola dengan baik. Sehingga mutasi seringkali harus disertai

proses pembelajaran ulang tentang penanganan program Bangun Praja di masing-masing Dinas Instansi.

Kebijakan pimpinan Daerah dalam alokasi dana bagi program Bangun Praja di Kota Semarang belum memiliki sinergi secara operasional dan cenderung sektoral, hal ini dikemukakan oleh Ketua Bapedalda Kota Semarang bahwa program seperti normalisasi sungai dan gerakan nasional rehabilitasi hutan dan lahan (GNRHL) yang memiliki dana cukup besar mestinya bisa di sinergikan kegiatannya dengan program Bangun Praja. Disamping perhatian pimpinan daerah yang masih lemah, pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang juga belum disosialisasikan ke Legislatif sehingga sedikit sekali pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan, yang diindikasikan dengan belum adanya perda yang realistis dan operasional mendukung upaya perbaikan lingkungan Kota Semarang.

Hingga saat ini pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang masih pada tatanan wacana di tingkat pengambil keputusan meskipun ada keinginan yang besar pada tatanan teknis operasional (Dinas Instansi di jajaran Pemerintah Kota) untuk merealisasikan substansi tujuan dari pelaksanaan program Bangun Praja untuk menciptakan tata Pemerintahan yang baik di Bidang lingkungan (*Good Environmental Governance*).

Aspek daya tanggap ditingkat operasional Dinas Instansi pada jajaran Pemerintah Kota Semarang dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan upaya pelibatan masyarakat masih belum optimal. Terjadi distorsi pemahaman dan tindakan di lapangan antara penentu kebijakan dalam hal ini pimpinan daerah dan birokrasi pelaksana dalam hal ini Dinas Instansi di jajaran Pemerintah Kota Semarang. Pimpinan Daerah memandang bahwa ekonomi rakyat mesti diutamakan karena adanya krisis ekonomi sehingga adanya pengalihan wewenang dari Dinas Pertamanan, Dinas Pasar, dan dinas Kebersihan dalam mengeluarkan izin bagi pedagang kaki lima yang ada di Kota Semarang kepada Lurah dan Camat dengan argumentasi untuk mencegah munculnya kerawanan sosial.

Kesemrawutan dan kesan kumuh akibat menjamurnya pedagang kaki lima di Kota Semarang tidak akan tuntas bila yang menjadi alasan untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi sebagian masyarakat saja dengan mengorbankan kepentingan masyarakat yang lebih luas, misalnya masalah sampah dan kemacetan yang ditimbulkan. Menurut

Baiquni dan Susilawardani (2002), pendekatan kebutuhan dasar (*Basic need Approach*) menurut persepsi pemerintah yang cenderung pendekatan dari atas (*Top Down Approach*) dikhawatirkan akan mengikis kemandirian rakyat dan menciptakan ketergantungan baru.

Secara teoritis berdasarkan data yang diperoleh maka perencanaan program Bangun Praja memiliki kedekatan dengan teori perencanaan yang mengadopsi teori perencanaan sinoptik komprehensif. Dimana peran perencana lebih sebagai birokrat teknisi. Pendekatan program Bangun Praja akan lebih tepat bila mengadopsi teori perencanaan transaktif yang menempatkan perencana sebagai fasilitator dan mediator pendidikan dengan pembelajaran sosial untuk memperoleh kesadaran kolektif dari para *stakeholder* dan masyarakat dalam pelaksanaan program Bangun Praja. Menurut Friedman dalam Hadi (2001), tujuan utama dari perencanaan adalah bagaimana mengkaitkan pengetahuan teknis (*technical knowledge*) untuk diterjemahkan dalam *public action*.

Perencanaan suatu program seperti program Bangun Praja yang menjadi program Nasional masih membutuhkan penyempurnaan. Munculnya masalah dalam pelaksanaan Program Bangun Praja di Kota Semarang karena belum maksimalnya peran Pimpinan Daerah dalam mendukung dan mengakomodir substansi tata Pemerintahan yang baik (*good governance*). Menilik kepada program Adipura dimasa lalu maka *reward* dan *punishment* menjadi perlu dimasukkan dalam kerangka mekanisme program Bangun Praja untuk meningkatkan partisipasi peran seluruh *stakeholder*.

Aspek daya tanggap Pemerintah Kota menjadi kelemahan yang menonjol dalam pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang disamping aspek manajemen. Hal ini lebih disebabkan lemahnya komitmen pimpinan daerah dan sosialisasi program Bangun Praja kepada jajaran Pemerintah Kota Semarang. Dari aspek manajemen alokasi dana dalam program Bangun Praja belum jelas ditambah dengan kompleksitas masalah intern Dinas instansi terkait dalam jajaran Pemerintah kota Semarang. Masalah intern Dinas/Instansi sehubungan dengan program Bangun Praja adalah mekanisme mutasi jabatan dalam tubuh Dinas/instansi sendiri. Seringkali terjadi penggantian pegawai yang menangani tentang program Bangun Praja pada

Dinas/Instansi dengan konsekwensi pemahaman tentang program Bangun Praja bagi mereka yang baru tidak sama dengan pegawai yang digantikan.

Pemberian penghargaan yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan yang baik sebaiknya tidak hanya pada Kota peserta dalam hal ini Pemerintah Kota saja, akan tetapi perlu dikembangkan suatu sistem penghargaan terhadap individu dengan berbagai kriteria seperti pegawai, masyarakat umum, dan pimpinan dari lembaga dan pimpinan daerah (Lurah, Camat, Walikota/Bupati, dan Gubernur) secara lebih formal bila memungkinkan diberikan secara periodik setiap tahun. Disamping pemberian penghargaan tidak bisa dipungkuri sistem monitoring pelaksanaan di lapangan perlu dilakukan rutin.

Penciptaan kesadaran pentingnya melestarikan lingkungan pada setiap level dapat dilakukan dengan pendidikan lingkungan pada Instansi pendidikan dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Peran katalisator dan fasilitator berada pada executif dan pelaksanaan sekaligus monitoring berada pada masyarakat secara luas.

Kendala koordinasi dalam program Bangun Praja di Kota Semarang diakui sebagai sebab timbulnya persepsi yang belum sama antar Dinas Instansi yang ada di Kota Semarang. Adanya kebijakan pimpinan daerah yang menyatakan bahwa Program Bangun Praja melekat pada program yang ada dimasing-masing Dinas menjadikan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan Dinas Instansi di Kota Semarang cenderung menjadi sektoral.

4.4.3. Model penyempurnaan pelaksanaan progaram Bangun Praja

Pelaksanaan program Bangun Praja yang dimulai pada 5 juni 2002 di seluruh Indonesia cenderung dilakukan dengan pendekatan teori perencanaan sinoptik komprehensif dengan karakteristik; lingkupnya luas, rasional ilmiah, terstandarisasi, dan tersentralisasi. Menurut Hadi (2001), perencanaan sinoptik merupakan tradisi yang dominan dimana melihat perencanaan sebagai suatu yang ilmiah rasional dan non politis. Penyusunan perencanaan program Bangun Praja semestinya bisa fleksibel dalam hal pedoman pemantauan dan evaluasi yang disesuaikan dengan kondisi geografis (wilayah pesisir laut, wilayah pegunungan, wilayah sungai, dan lain-lain), demografis (penduduk yang homogen atau heterogen), dan tipologi Kota (Kota Metropolitan, Kota Besar, Kota Sedang, dan Kota Kecil), kota yang akan dievaluasi.

Perencanaan yang diusulkan dalam penyempurnaan pelaksanaan program Bangun Praja adalah pendekatan perencanaan transaktif. Pengambilan keputusan didasarkan pada 7 (tujuh) langkah perencanaan yang terdiri dari :

1) Identifikasi masalah

Pengidentifikasian masalah dalam pelaksanaan program Bangun Praja harus dilakukan dengan melibatkan *stakeholder* dalam hal ini di Kota Semarang terdiri dari tim teknis dan tim pelaksana program yang telah ditetapkan oleh pimpinan daerah dibawah satu koordinasi Bapedalda Kota. Pengintegrasian program dimasing-masing Dinas/Instansi perlu diselaraskan dengan program Bangun Praja. Masalah mengenai pengelolaan lingkungan diidentifikasi dari masing-masing Dinas/instansi dalam jajaran pemerintah Kota dan selanjutnya disesuaikan dengan isu pengelolaan sampah, ruang terbuka hijau, fasilitas publik dan pengelolaan kualitas air.

2) Perumusan masalah

Perumusan masalah pembangunan yang dilakukan dengan membuat prioritas penanganan masalah berdasarkan kondisi permasalahan dan potensi yang dimiliki oleh jajaran pemerintah Kota.

3) Penilaian

Penilaian dilakukan terhadap prioritas permasalahan yang akan dikelola dengan melakukan kajian alokasi anggaran dan waktu penyelesaian yang diperlukan.

4) Inventarisasi alternatif kebijakan

Setelah dilakukan penilaian terhadap permasalahan yang ada maka akan disusun suatu alternatif kebijakan yang akan dilaksanakan.

5) Pemilihan alternatif

Dari beberapa alternatif kebijakan yang telah disusun maka ditetapkan alternatif kebijakan yang akan dilaksanakan yang telah dipahami dan bersifat fleksibel dengan program dari masing-masing Dinas/Instansi. Fleksibel dalam artian setiap program yang dilaksanakan oleh masing-masing Dinas/Instansi tidak saling bertentangan (*overlapping*) dalam pelaksanaannya di lapangan dengan program Bangun Praja.

6) Kajian dampak

Kajian dampak dimaksudkan agar setiap pelaksanaan suatu kegiatan pembangunan sebelum dilaksanakan harus telah melalui tahapan kajian dampak agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan dampak yang luas baik terhadap lingkungan maupun dampak sosial yang luas.

7) Pengambilan keputusan

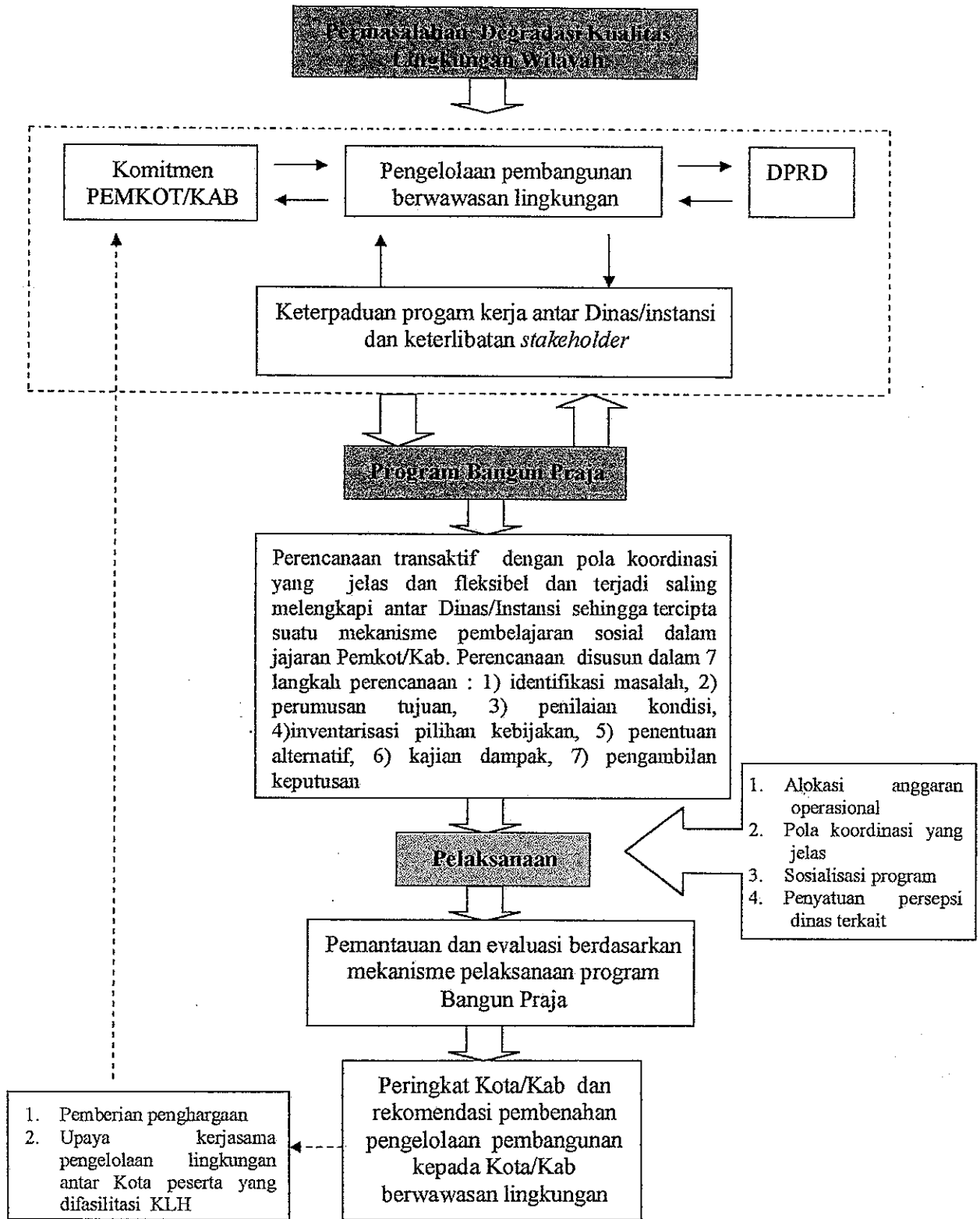
Pengambilan keputusan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten sudah harus operasional dari aspek kelembagaan dan manajemen.

Pelaksanaan program Bangun Praja dalam hal pemantauan dan evaluasi disesuaikan dengan kondisi dan tipologi Kota. Hasil pemantauan diharapkan akan memberikan rekomendasi perbaikan pengelolaan lingkungan kepada Pemerintah Kota/Kabupaten melalui mekanisme pelaksanaan program Bangun Praja.

Timbulnya persepsi yang belum sama antar Dinas Instansi pada jajaran Pemerintah Kota Semarang dan adanya distorsi kebijakan dan operasional antara pimpinan Daerah dengan Dinas teknis dalam pelaksanaan program Bangun Praja menunjukkan belum berjalannya mekanisme pembelajaran timbal balik dalam intern Pemerintahan Kota Semarang.

Berdasarkan temuan penelitian ini untuk menciptakan suatu tata pemerintahan yang berwawasan lingkungan diperlukan tumbuhnya kesadaran kolektif segenap lapisan masyarakat, *executif*, *legislatif*, dan lembaga *Independen*. Pendekatan perencanaan yang paling tepat dalam program Bangun Praja adalah pendekatan teori perencanaan *transaktif*. Model penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan program Bangun Praja yang diusulkan dapat dilakukan secara terpadu dengan melibatkan peran serta *stakeholder* secara *proaktif* disertai dengan tumbuhnya komitmen daerah dalam melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan (gambar 8).

Gambar 0.13. Model penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan Program Bangun Praja



BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan maka dapat disimpulkan bahwa penyusunan perencanaan program Bangun Praja oleh Kementerian Lingkungan Hidup memiliki ciri dan karakteristik lingkup yang luas, tersentralisasi, tidak fleksibel, dan terstandarisasi. Penyusunan perencanaan program Bangun Praja dapat dikategorikan pada perencanaan sinoptik komprehensif yang menempatkan perencana sebagai birokrat/teknisi ternyata memiliki kelemahan terutama dalam upaya peningkatan peran *stakeholder* dalam program Bangun Praja.

Berdasarkan buku pedoman umum pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program Bangun Praja tahun pertama maka perlu adanya penyempurnaan mekanisme pemantauan dan tatalaksana pelaksanaan program Bangun Praja di lapangan. Penyempurnaan tersebut diharapkan akan lebih mampu mengakomodasi kondisi tipologi geografis dan demografis Kota peserta.

Pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang belum tersosialisasi dengan optimal. Hal ini ditunjukkan dengan pemahaman yang beragam dari Dinas/Instansi terkait dalam jajaran Pemerintah Kota Semarang tentang pelaksanaan program Bangun Praja. Dinas/Instansi terkait dalam jajaran Pemerintah Kota Semarang cenderung memahami program Bangun Praja secara sektoral sesuai bidang tugas dan kewenangan yang dimiliki. Tingkat penerimaan, pemahaman, keterlibatan, dan tindakan dilapangan yang tinggi dalam pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang dari hasil kuisioner lebih merupakan suatu keinginan ideal dari jajaran Pemerintah Kota Semarang dan belum terealisasi di lapangan.

Peran pimpinan daerah di Kota Semarang masih belum optimal dalam menyukseskan Program Bangun Praja di Kota Semarang. Belum adanya acuan jelas berupa petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) juga menjadi persoalan disamping belum optimalnya koordinasi yang dilakukan.

Keterlibatan *stakeholder* secara luas belum terakomodir secara baik karena belum maksimalnya peran pemerintah Kota Semarang sebagai fasilitator program Bangun Praja. Perhatian pimpinan daerah yang masih lemah berpengaruh terhadap alokasi dana bagi pelaksanaan Program Bangun Praja yang selanjutnya mempengaruhi

kinerja keseluruhan jajaran Pemerintah kota Semarang untuk melaksanakan program Bangun Praja.

Pelaksanaan program Bangun Praja yang diharapkan akan mampu meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Semarang dalam pengelolaan sampah, ruang terbuka hijau, pengelolaan fasilitas publik, dan pengendalian kualitas air masih belum sesuai dengan harapan. Hal ini disebabkan keinginan yang tinggi untuk melaksanakan program Bangun Praja oleh Dinas/Instansi masih merupakan keinginan ideal (*expected*) dan belum ditunjang dengan realisasi kegiatan dilapangan secara nyata (*real action*).

5.2. Saran

Perencanaan program Bangun Praja lebih tepat dilakukan dengan pendekatan teori perencanaan transaktif dengan pengupayaan semaksimal mungkin tumbuhnya kesadaran dan kepedulian *stakeholder* dalam program Bangun Praja melalui proses pembelajaran timbal balik dengan lebih menekankan keterpaduan pelaksanaan di setiap level pengambilan keputusan. Peran Pemerintah adalah sebagai fasilitator dan mediator pendidik. Menurut Hadi (2001), tradisi pembelajaran sosial memiliki fokus eksplisit dalam mengkaitkan antara teori dengan praktek, pengetahuan dengan tindakan.

Penyamaan persepsi pada setiap *stakeholder* dalam program Bangun Praja perlu dilakukan agar pengambilan keputusan pelaksanaan pembangunan dan operasional di lapangan saling sinergi. Pembelajaran timbal balik antar *stakeholder* ditujukan untuk menumbuhkan kesadaran kolektif untuk menciptakan suatu pengelolaan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Sosialisasi program menjadi penting dilakukan terhadap Pimpinan Daerah dan DPRD Kota/Kabupaten peserta agar program Bangun Praja mendapatkan perhatian dan menjadi pertimbangan bagi pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pembangunan.

Disamping itu yang tidak kalah pentingnya adalah pemberian penghargaan dalam rangka meningkatkan peran segenap jajaran Pemerintah Kota/ Kabupaten. Penghargaan dapat diberikan kepada pimpinan daerah, Dinas/Instansi, swasta, dan perorangan yang terbukti memiliki kontribusi dalam peningkatan kualitas lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous.2004. *Panduan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004*. Bappeda Propinsi Jawa Tengah.
- Anonimous. 2004. *Musyawarah Perencanaan Pembangunan Propinsi (Musrenbangprop) Jawa Tengah. Bahan Sidang Kelompok Daftar Skala Prioritas Tahun 2005*. Bappeda Propinsi Jawa Tengah.
- Anonimous. 2003. *Program Bangun Praja*. Deputi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kewilayahan. Kementerian Lingkungan Hidup.
- Anonimous. 2003. *Draft Laporan Akhir Kajian Terhadap Pelaksanaan Program Bangun Praja tahun 2002*. Kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup dengan Program Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro.
- Anonimous. 2001. *Semarang Dalam Angka*. BPS Kota Semarang.
- Adnan., G. *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam pengelolaan Lingkungan Hidup Di Daerah*. Makalah Disampaikan Dalam Rapat Kerja Nasional II Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia, tanggal 1 Oktober 2002 di Semarang.
- Bintarto. R. 1984. *Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Baiquni., M. Susilawardani. 2002. *Pembangunan yang Tidak Berkelanjutan Refleksi Kritis Pembangunan Indonesia*. Transmedia Global Wacana. Yogyakarta.
- Douglas. I. 1983. *The Urban Environment*. Edward Arnold Publishers Ltd. London
- Hadi., S. P. 2001. *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Hadi ., S. P. 2003. *Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi*. Presentasi pada Acara Pemaparan Tim evaluasi Magister Ilmu Lingkungan Undip Terhadap Pelaksanaan Program Bangun Praja di Jawa Tengah.
- Hufschmidt., M. M. James., D. E. Meister., A. D. Bower., B. T. Dixon., J.A. 1983. *Environment Natural System and Development. An Economic Valuation Guide*. East West Center. East West Environment and Policy Institute. USA.
- Jayadinata., J. T. 1986. *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah*. ITB. Bandung.
- Keraf. A.S. 2002. *Etika Lingkungan*. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.

- Moleong, L. J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Ryadi., A. L. S. 1984. *Tata Kota Suatu Pendekatan Dari Aspek Kesehatan Lingkungan*. Bina Indra Karya. Surabaya.
- Soegijoko., B. T. S. 1997. *Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Singarimbun., M., Effendi., S. 1989. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES. Jakarta.
- WCED. Alih Bahasa Oleh Bambang Sumatri. *Our Common Future*. 1998. PT. Gramedia. Jakarta.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuisisioner penelitian

Lampiran 1. 1. Kuisisioner variabel penerimaan (acceptability)

1. Apakah anda mengetahui tentang program Bangun Praja :
 - a. Sangat tahu
 - b. Tahu
 - c. Ragu-ragu mungkin tahu
 - d. Ragu-ragu mungkin tidak tahu
 - e. Tidak tahu
 - f. Sangat tidak tahu

2. Menurut anda pengelolaan pembangunan seharusnya memperhatikan kelestarian lingkungan seperti konsep yang dilaksanakan dalam program Bangun Praja
 - a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Ragu-ragu mungkin setuju
 - d. Ragu-ragu mungkin tidak setuju
 - e. Tidak setuju
 - f. Sangat tidak setuju

3. Menurut anda sosialisasi program Bangun Praja di Kota Semarang harus terus dilaksanakan
 - a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Ragu-ragu mungkin setuju
 - d. Ragu-ragu mungkin tidak setuju
 - e. Tidak setuju
 - f. Sangat tidak setuju

4. Jika ada suatu program dari Pemerintah Pusat untuk pengelolaan pembangunan berwawasan lingkungan maka sikap Dinas/ Instansi anda akan
 - a. Sangat mendukung
 - b. Mendukung
 - c. Ragu-ragu mungkin mendukung
 - d. Ragu-ragu mungkin tidak mendukung
 - e. Tidak mendukung
 - f. Sangat tidak mendukung

5. Posisi yang diharapkan Dinas anda dalam pengelolaan pembangunan berwawasan lingkungan adalah *sebagai peserta*
 - a. Sangat aktif
 - b. Aktif
 - c. Ragu-ragu mungkin aktif
 - d. Ragu-ragu mungkin tidak aktif
 - e. Tidak aktif
 - f. Sangat tidak aktif

6. Apakah perlu adanya evaluasi tentang pengelolaan pembangunan yang mengacu pada kelestarian lingkungan di Kota Semarang
 - a. Sangat perlu
 - b. Perlu
 - c. Ragu-ragu mungkin perlu
 - d. Ragu-ragu mungkin tidak perlu
 - e. Tidak perlu
 - f. Sangat tidak perlu

7. Kinerja pengelolaan pembangunan berwawasan lingkungan menuntut adanya pengawasan
 - a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Ragu-ragu mungkin setuju
 - d. Ragu-ragu mungkin tidak setuju

- c. Ragu-ragu mungkin setuju e. Tidak setuju
 f. Sangat tidak setuju
8. Apakah anda mengetahui bahwa Kota Semarang telah memiliki Dewan Evaluasi Kota (DEK)
- a. Sangat tahu d. Ragu-ragu mungkin tidak tahu
 b. Tahu e. Tidak tahu
 c. Ragu-ragu mungkin tahu f. Sangat tidak tahu
9. Menurut anda keberadaan Dewan Evaluasi Kota (DEK) di Kota Semarang apakah dianggap perlu
- a. Sangat perlu d. Ragu-ragu mungkin tidak
 b. Perlu perlu
 c. Ragu-ragu mungkin perlu e. Tidak perlu
 f. Sangat tidak perlu
10. Menurut anda apakah proyek pembangunan memerlukan studi AMDAL
- a. Sangat perlu d. Ragu-ragu mungkin tidak
 b. Perlu perlu
 c. Ragu-ragu mungkin perlu e. Tidak perlu
 f. Sangat tidak perlu

Lampiran 1.2. Kuisisioner variabel pemahaman (understanding)

1. Apakah Dinas anda mengetahui tentang pedoman evaluasi yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dalam program Bangun Praja
- a. Sangat tahu d. Ragu-ragu mungkin tidak tahu
 b. Tahu e. Tidak tahu
 c. Ragu-ragu mungkin tahu f. Sangat tidak tahu
2. Apakah Menurut anda program Bangun Praja yang bertujuan untuk merealisasikan pelaksanaan pengelolaan pembangunan berwawasan lingkungan penting
- a. Sangat penting d. Ragu-ragu mungkin tidak
 b. Penting penting
 c. Ragu-ragu mungkin penting e. Tidak penting
 f. Sangat tidak penting
3. Apakah anda memahami konsep Tata Pemerintahan yang baik di bidang lingkungan (*Good Environmental Governance*)
- a. Sangat paham d. Ragu-ragu mungkin tidak
 b. Paham paham
 c. Ragu-ragu mungkin paham e. Tidak paham
 f. Sangat tidak paham
4. Apakah anda memahami tentang aspek pedoman evaluasi yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dalam program Bangun Praja
- a. Sangat paham d. Ragu-ragu mungkin tidak

- b. Paham paham
 c. Ragu-ragu mungkin paham e. Tidak paham
 f. Sangat tidak paham
5. Apakah anda setuju bahwa pengelolaan lingkungan Kota Semarang harus dilakukan secara terpadu oleh jajaran Pemerintah Kota
 a. Sangat setuju d. Ragu-ragu mungkin tidak setuju
 b. Setuju e. Tidak setuju
 c. Ragu-ragu mungkin setuju f. Sangat tidak setuju
6. Apakah perlu bahwa pengelolaan lingkungan Kota Semarang harus lintas sektor
 a. Sangat perlu d. Ragu-ragu mungkin tidak perlu
 b. Perlu e. Tidak perlu
 c. Ragu-ragu mungkin perlu f. Sangat tidak perlu
7. Bagaimanakah Visi dan Misi Dinas anda dalam pengelolaan pembangunan berwawasan lingkungan selama dua tahun terakhir
 a. Sangat baik d. Ragu-ragu mungkin tidak baik
 b. Baik e. Tidak baik
 c. Ragu-ragu mungkin baik f. Sangat tidak baik
8. Kondisi lingkungan Kota Semarang saat ini menurut Dinas anda apakah perlu adanya perbaikan dengan mengacu pada pelaksanaan program Bangun Praja
 a. Sangat perlu d. Ragu-ragu mungkin tidak perlu
 b. Perlu e. Tidak perlu
 c. Ragu-ragu mungkin perlu f. Sangat tidak perlu
9. Tata pemerintahan yang baik (bebas KKN, demokratis, akuntabel, transparan, dan akomodatif) akan menciptakan lingkungan yang baik
 a. Sangat setuju d. Ragu-ragu mungkin tidak setuju
 b. Setuju e. Tidak setuju
 c. Ragu-ragu mungkin setuju f. Sangat tidak setuju
10. Pelanggaran terhadap suatu kegiatan pembangunan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan di kota Semarang apakah perlu diberikan sanksi yang berat
 a. Sangat perlu d. Ragu-ragu mungkin tidak perlu
 b. Perlu e. Tidak perlu
 c. Ragu-ragu mungkin perlu f. Sangat tidak perlu

Lampiran 1. 3. Kuisiener variabel keterlibatan (involvement)

1. Apakah perlu dinas anda mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang
 a. Sangat perlu d. Ragu-ragu mungkin tidak perlu
 b. Perlu e. Tidak perlu
 c. Ragu-ragu mungkin perlu f. Sangat tidak perlu

2. Apakah Bagi Dinas anda penting untuk memperhatikan kelestarian lingkungan dalam setiap proyek yang dikerjakan
 - a. Sangat penting
 - b. penting
 - c. Ragu-ragu mungkin penting
 - d. Ragu-ragu mungkin tidak penting
 - e. Tidak penting
 - f. Sangat tidak penting

3. Apakah Dinas anda pernah terlibat dalam suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi taman Kota, jalur hijau, dan hutan Kota
 - a. Selalu terlibat
 - b. Pernah terlibat
 - c. Ragu-ragu mungkin pernah terlibat
 - d. Ragu-ragu mungkin tidak pernah terlibat
 - e. Belum pernah terlibat
 - f. Tidak akan terlibat

4. Apakah Dinas anda pernah terlibat dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Kota Semarang
 - a. Selalu terlibat
 - b. Pernah terlibat
 - c. Ragu-ragu mungkin pernah terlibat
 - d. Ragu-ragu mungkin tidak pernah terlibat
 - e. Belum pernah terlibat
 - f. Tidak akan terlibat

5. Apakah perlu Dinas anda menjadi penggerak bagi pengelolaan pembangunan yang berwawasan lingkungan di kota Semarang
 - a. Sangat perlu
 - b. Perlu
 - c. Ragu-ragu mungkin perlu
 - d. Ragu-ragu mungkin tidak perlu
 - e. Tidak perlu
 - f. Sangat tidak perlu

6. Apakah pegawai pada Dinas anda pernah terlibat dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan mengenai sistem pembangunan berwawasan lingkungan di Kota Semarang atau Kota lain
 - a. Selalu terlibat
 - b. Pernah terlibat
 - c. Ragu-ragu mungkin pernah terlibat
 - d. Ragu-ragu mungkin belum pernah terlibat
 - e. Belum pernah terlibat
 - f. Tidak akan terlibat

7. Menurut anda partisipasi Dinas anda dalam pengelolaan pembangunan berwawasan lingkungan di Kota Semarang hingga saat ini
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Ragu-ragu mungkin baik
 - d. Ragu-ragu mungkin tidak baik
 - e. Tidak baik
 - f. Sangat tidak baik

8. Apakah perlu adanya peningkatan keterlibatan Dinas anda dalam pengelolaan pembangunan yang berwawasan lingkungan di Kota Semarang
 - a. Sangat perlu
 - b. Perlu
 - c. Ragu-ragu mungkin perlu
 - d. Ragu-ragu mungkin tidak perlu
 - e. Tidak perlu
 - f. Sangat tidak perlu

9. Tanpa peran aktif Dinas anda maka pengelolaan pembangunan berwawasan lingkungan di Kota Semarang akan sulit mencapai sasaran yang diinginkan

- a. Sangat setuju
- b. Setuju
- c. Ragu-ragu mungkin setuju
- d. Ragu-ragu mungkin tidak setuju
- e. Tidak setuju
- f. Sangat tidak setuju

10. Menurut anda apakah Dinas anda perlu terlibat dalam gerakan kebersihan Kota yang pernah dicanangkan Walikota Semarang

- a. Sangat perlu
- b. Perlu
- c. Ragu-ragu mungkin perlu
- d. Ragu-ragu mungkin tidak perlu
- e. Tidak perlu
- f. Sangat tidak perlu

Lampiran 1. 4. Kuisisioner variabel tindakan di lapangan (Action)

1. Apakah menurut Dinas anda Kerusakan lingkungan Kota Semarang perlu dijadikan prioritas kerja untuk diperbaiki dan dicarikan solusi yang cepat dan tepat sasaran

- a. Sangat perlu
- b. Perlu
- c. Ragu-ragu mungkin perlu
- d. Ragu-ragu mungkin tidak perlu
- e. Tidak perlu
- f. Sangat tidak perlu

2. Lingkup kerja Dinas anda seharusnya memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan di Kota Semarang

- a. Sangat setuju
- b. Setuju
- c. Ragu-ragu mungkin setuju
- d. Ragu-ragu mungkin tidak setuju
- e. Tidak setuju
- f. Sangat tidak setuju

3. Menurut anda lingkup kerja Dinas anda perlu memberikan perhatian kepada masalah pengendalian pencemaran

- a. Sangat perlu
- b. Perlu
- c. Ragu-ragu mungkin perlu
- d. Ragu-ragu mungkin tidak perlu
- e. Tidak perlu
- f. Sangat tidak perlu

4. Apakah menurut anda dalam melaksanakan pembangunan sesuai bidang kerja dari Dinas anda perlu berkoordinasi dengan Dinas lain agar tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan dimana pembangunan tersebut dilakukan

- a. Sangat perlu
- b. Perlu
- c. Ragu-ragu mungkin perlu
- d. Ragu-ragu mungkin tidak perlu
- e. Tidak perlu
- f. Sangat tidak perlu

5. Menurut anda pengelolaan masalah lingkungan di Kota Semarang paling tepat dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat secara bersama

- a. Sangat setuju
- b. Setuju
- c. Ragu-ragu mungkin setuju
- d. Ragu-ragu mungkin tidak setuju
- e. Tidak setuju
- f. Sangat tidak setuju

6. Menurut anda keterlibatan Dinas anda untuk memperbaiki kondisi lingkungan di Kota Semarang

- a. Sangat baik
- d. Ragu-ragu mungkin tidak baik

- b. Baik
c. Ragu-ragu mungkin baik
- e. Tidak baik
f. Sangat tidak baik
7. Kinerja jajaran Dinas/Instansi Pemerintah Kota Semarang hingga saat ini *sudah* menerapkan konsep pengelolaan pembangunan berwawasan lingkungan dalam setiap kegiatan pembangunan sesuai kewenangan yang dimiliki
- a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Ragu-ragu mungkin setuju
- d. Ragu-ragu mungkin tidak setuju
e. Tidak setuju
f. Sangat tidak setuju
8. Kinerja jajaran Dinas/Instansi Pemerintah Kota Semarang hingga saat ini *belum* menerapkan konsep pengelolaan pembangunan berwawasan lingkungan dalam setiap kegiatan pembangunan sesuai kewenangan yang dimiliki
- a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Ragu-ragu mungkin setuju
- d. Ragu-ragu mungkin tidak setuju
e. Tidak setuju
f. Sangat tidak setuju
9. Apakah perlu Pemerintah Kota Semarang menerapkan konsep pengelolaan pembangunan berwawasan lingkungan dalam setiap kegiatan pembangunan sesuai kewenangan yang dimiliki
- a. Sangat perlu
b. Perlu
c. Ragu-ragu mungkin perlu
- d. Ragu-ragu mungkin tidak perlu
e. Tidak perlu
f. Sangat tidak perlu
10. Pemerintah Kota Semarang akan melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan
- a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Ragu-ragu mungkin setuju
- d. Ragu-ragu mungkin tidak setuju
e. Tidak setuju
f. Sangat tidak setuju

Lampiran 2. Panduan wawancara bebas

1. Bagaimana pendapat anda mengenai pelaksanaan program Bangun Praja di Kota Semarang?
2. Apa yang menjadi persoalan utama pelaksanaan pengelolaan pembangunan di Kota Semarang?
3. Apakah agenda pembangunan Kota Semarang telah memperhatikan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan?
4. Apa yang menjadi persoalan utama peneglolaan lingkungan di Kota Semarang?